

BSNP

Badan Standar Nasional Pendidikan



LAPORAN BSNP

TAHUN 2010

LAPORAN BSNP

Tahun 2010



Kata Pengantar

Adalah suatu kebahagiaan bagi kami, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), bahwasanya semua program kegiatan tahun 2010 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan amanah yang diberikan kepada BSNP. Puji syukur, kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberi kita petunjuk, pertolongan, rahmat dan karuniaNya sehingga kita semua dapat berkarya dan memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan pendidikan nasional.

BSNP yang diberikan tugas untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan pencapaian dan mengevaluasi standar nasional pendidikan, pada tahun 2010, mempunyai sembilan program strategis, yaitu: (1) Program pengembangan Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI, (2) Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Program Vokasi, (3) Penyusunan Standar Dosen Pendidikan Vokasi, (4) Penyusunan Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Tinggi, (5) Penyusunan Standar Biaya SMK dan Indeks Biaya Pendidikan Tahun 2010, (6) Pemantauan Implementasi Standar Nasional Pendidikan, (7) Evaluasi Implementasi Standar Nasional Pendidikan, (8) Pengembangan Instrumen Modifikasi Buku Teks Pelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, dan (9) Penyelenggaraan dan Pemantauan Ujian Nasional (UN).

Dalam menjalankan program di atas, BSNP bekerjasama dan menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu,

izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada: Menteri Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri, Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan SMK, Pusat Perbukuan Kemdiknas, Pusat Penilaian Pendidikan, Inspektorat Jenderal Kemdiknas, Kementerian Agama, Kantor Dinas Pendidikan Provinsi se Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Indonesia, LPMP, Tim Ahli BSNP, staf profesional BSNP, staf keuangan dan administrasi BSNP.

Buku laporan BSNP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh atas keterlaksanaan kesembilan program di atas sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban serta transparansi BSNP dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan, kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Jakarta, Januari 2010
Badan Standar Nasional Pendidikan

Ketua,



Prof. Dr. Djemari Mardapi

Sekretaris,



Prof. Dr. Edy Tri Baskoro

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Pengembangan Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI.....	9
Bab 3 Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Program Vokasi.....	35
Bab 4 Penyusunan Standar Dosen Pendidikan Vokasi	49
Bab 5 Penyusunan Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Tinggi.....	79
Bab 6 Penyusunan Standar Biaya SMK dan Indeks Biaya Pendidikan Tahun 2010	91
Bab 7 Pemantauan Penerapan Standar Nasional Pendidikan	111
Bab 8 Evaluasi Implementasi Standar Nasional Pendidikan..	133
Bab 9 Pengembangan Instrumen Modifikasi Buku Teks Pelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus	145
Bab 10 Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2010	155

Bab 11	Pencapaian dan Evaluasi Kegiatan Standar untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan	165
Bab 12	Pleno BSNP dan Kegiatan Narasumber.....	193
Bab 13	Epilog	221



PENDAHULUAN

Badan Standar Nasional Pendidikan

BAB 1. PENDAHULUAN

1 | Latar belakang

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 dengan tugas: a) mengembangkan standar nasional pendidikan, (b) menyelenggarakan ujian nasional, (c) memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, (d) merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan (e) menilai kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan kegrafikaan buku teks pelajaran. Dalam mengembangkan standar nasional pendidikan, BSNP membentuk tim ahli yang berasal dari berbagai perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, para ahli dan praktisi lapangan. Dalam melaksanakan ujian nasional BSNP didukung oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam menjalankan tugas penilaian buku teks matapelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah, BSNP didukung oleh Pusat Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.

Pada awal BSNP dibentuk pada bulan Mei tahun 2005, anggota BSNP membuat suatu kesepakatan, yaitu: a) Masa kerja Ketua dan Sekretaris BSNP adalah satu tahun, b) kepemimpinan BSNP bersifat kolegial, yaitu sebagai koordinator kegiatan, c) semua keputusan BSNP ditetapkan pada rapat pleno BSNP, d) semua anggota BSNP wajib

hadir pada rapat pleno mingguan pada hari Selasa sejak jam 09.00 sampai dengan jam 16.00, e) semua anggota BSNP harus memahami semua standar dan hal-hal yang berkaitan yang dikembangkan BSNP, f) setiap anggota BSNP diharapkan aktif dalam tiga kegiatan tim yang dibentuk BSNP, g) semua informasi yang diperoleh pimpinan BSNP disampaikan kepada semua anggota BSNP.

Pada periode September 2009 – Januari 2011, kepengurusan BSNP melaksanakan dua program, yakni: menyelesaikan program kerja BSNP 2009 (September 2009 – Desember 2010), dan melaksanakan program kerja BSNP 2010 (Januari – Desember 2010).

2 | Pelaksanaan Program

Program kerja BSNP tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan standar dosen akademik dan profesi pendidikan tinggi, dengan koordinator: Prof. Dr. Djaali.
- b. Pengembangan standar isi pendidikan tinggi, dengan koordinator: Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd, Kons.
- c. Pengembangan standar sarana prasarana pendidikan tinggi program sarjana, dengan koordinator: Prof. Dr. Edy Tri Baskoro.
- d. Pengembangan standar pendidikan anak usia dini, dengan koordinator: Dr. Anggani Sudono, M.A.
- e. Updating standar biaya dan pengembangana indeks biaya pendidikan, dengan koordinator: Prof. Dr. Zaki Baridwan.
- f. Pemantuan implementasi standar nasional pendidikan, dengan koordinator: Prof. Dr. Bambang Suhendro dan diteruskan oleh Prof. Dr. Mohammad Aman Wirakartakusumah, M.Sc.
- g. Pengembangan instrumen penilaian buku teks pelajaran, dengan koordinator, Prof. Dr. Fawzi Aswin Hadis dan diteruskan oleh pdt. Weinata Sairin. M.Th.
- h. Penilaian buku teks pelajajaran, dengan koordinator: Prof. Dr.

Fawzi Aswin Hadis dan diteruskan oleh Pdt. Weinata Sairin. M. Th

- i. Penyelenggaraan ujian nasional, dengan ketua: Prof. Dr. Djemari Mardapi dan sekretaris: Prof. Dr. Furqon.

Pelaksanaan program pengembangan didukung oleh tim ahli dan tim adhoc yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan unit/pihak yang relevan. Perubahan yang terjadi adalah pada kebijakan ujian nasional, yaitu ada pendatanganan fakta kejujuran oleh dinas pendidikan provinsi dan ketua BSNP dengan disaksikan oleh Mendiknas, dan adanya ujian ulangan untuk ujian nasional sekolah menengah. Berkat kerja sama yang sinergis antara BSNP, Balitbang Kemendiknas, bagian keuangan, dan sekretariat BSNP, semua program kerja tahun 2009 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Laporan secara rinci dari kegiatan BSNP 2009 dapat dilihat dalam Laporan BSNP 2009.

Program kerja BSNP tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Paradigma Pendidikan Nasional, dengan koordinator: Prof. Dr. dr. Farid Anfasa Moeloek Sp. OG.
2. Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Program vokasi, dengan koordinator: Prof. Dr. Edy Tri Baskoro.
3. Pengembangan Standar Dosen Pendidikan Vokasi, dengan koordinator Prof. Dr. Djaali.
4. Pengembangan Standar Proses Pendidikan Tinggi, dengan koordinator Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo M.Pd. Kons.
5. Pengembangan Standar Biaya SMK, dengan koordinator Prof. Dr. Zaki Baridwan.
6. Pemantauan Penerapan Standar Nasional Pendidikan, dengan koordinator Prof. Dr. Mohammad Aman Wirakartakusumah M.Sc.
7. Evaluasi Implementasi Standar Nasional Pendidikan: Standar Isi

- dan Standar Kompetensi Lulusan, dengan koordinator: Prof. Dr. Furqon.
8. Pengembangan Instrumen Modifikasi Buku Teks Pelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, dengan koordinator Pdt. Weinata Sairin M.Th.
 9. Penilaian buku teks pelajaran, dengan koordinator: Pdt. Weinata Sairin M.Th.
 10. Penyelenggaraan ujian nasional, dengan ketua Prof. Dr. Djemari Mardapi.
 11. Kegiatan rutin BSNP.

Buku laporan ini akan memberikan gambaran proses kegiatan BSNP nomor 1-11 di atas yang diselenggarakan pada tahun 2010 dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program tersebut.

Namun, sebelum dipaparkan semua laporan kegiatan pada bab selanjutnya, ijinkan kami menyampaikan keanggotaan BSNP, struktur kepemimpinan, tenaga administrasi dan keuangan serta tim ahli BSNP.

3 | Anggota

BSNP mempunyai anggota berjumlah 15 orang, yang diangkat oleh Menteri Pendidikan Nasional dalam masa bakti 4 tahun. Keanggotaan BSNP periode 2009-2013 adalah sebagai berikut (dalam urutan alfabetis):

1. Prof.Dr.Abdi A.Wahab (mengundurkan diri)
2. Prof.Dr.Djaali
3. Prof.Dr.Djemari Mardapi
4. Prof.Dr.Edy Tri Baskoro
5. Prof.Dr.dr.Farid Anfasa Moeloek, Sp.OG
6. Prof.Dr.Furqon

7. Prof. Dr. rer.nat Gunawan Indrayanto
8. Prof. Dr. Jamaris Jamna, M.Pd.
9. Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH
10. Prof. Dr. Ir. Moehammad Aman Wirakartakusumah, M.Sc
11. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd.Kons.
12. Prof. Dr. Richardus Eko Indrajit
13. Dr. Teuku Ramli Zakaria
14. Pdt. Weinata Sairin, MTh.
15. Prof. Dr. Zaki Baridwan

4 | Struktur Kepemimpinan

Dalam menjalankan roda organisasinya, BSNP dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris, yang berasal dari dan dipilih oleh anggota secara demokratis berdasarkan Sidang Pleno BSNP. Semua keputusan organisasi ditetapkan melalui Sidang Pleno dengan korum setengah tambah 1 dan diusahakan diambil berdasarkan asas kemufakatan.

Kepemimpinan BSNP (ketua dan sekretaris) dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1-1. Ketua dan Sekretaris BSNP

No	Ketua dan Sekretaris BSNP	Periode
1	Ketua : Bambang Soehendro, Prof. Dr Sekretaris : Djaali, Prof. Dr	Mei 2005 s.d. Agustus 2006
2	Ketua : M. Yunan Yusuf, Prof. Dr Sekretaris : Suharsono, Dr., MM., M.Pd	September 2006 s.d. Agustus 2007
3	Ketua : Djemari Mardapi, Prof. Dr Sekretaris : Furqon, Prof. Dr.	September 2007 s.d. September 2008
4	Ketua : Mungin Eddy Wibowo, Prof. Dr. M.Pd., Kons Sekretaris : Edy Tri Baskoro, Prof. Dr.	September 2008 s.d. Juli 2009
5	Ketua : Djemari Mardapi, Prof. Dr Sekretaris : Edy Tri Baskoro, Prof. Dr.	Agustus 2009 s.d. Januari 2011
6	Ketua : Moehammad Aman Wirakartakusumah, Prof. Dr. Ir. M.Sc. Sekretaris : Richardus Eko Indrajit, Prof. Dr.	Januari 2011 s.d. Januari 2012

5 Tenaga Profesional, Administratif dan Keuangan

BSNP, dalam menjalankan perannya, didukung oleh sekretariat dan keuangan (di bawah koordinasi Kepala Balitbang), serta tenaga administrasi, tenaga profesional (konsultan) dan tim ahli.

Staf profesional yang membantu BSNP dalam melaksanakan program tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Gaguk Margono, Prof. Dr.
2. Bambang Suryadi, Ph.D
3. Kaharuddin Arafah, Drs. M.Si

Tenaga administratif dan keuangan BSNP yang sangat membantu meningkatkan kinerja BSNP dalam menjalankan tugasnya, terdiri atas 16 orang sebagaimana tertulis dalam Tabel 1-2.

Tabel 1-2. Staf Administratif dan Keuangan BSNP

Staf Administratif BSNP	Staf Keuangan BSNP
1. Ning Karningsih	1. Dra. Neneng Tresnaningsih, MSi.
2. Nurul Najmah, M.Si.	2. Sugi Wahono, S.Sos.
3. Renny Wulansari, S.Kom	3. Hans Mangundap, M.Pd.
4. Djuandi	4. Rosmalina
5. Ibar Warsita, SE	5. Joko Muhyono
6. Reyman Aryo, SE	6. Soesilo Hadi
	7. Samsudin
	8. Djadja Halimi
	9. Novani Budianti
	10. Eko Haryanto

6 Tim Ahli

Dalam penyusunan standar nasional pendidikan, BSNP berwenang untuk membentuk tim ahli yang terdiri dari para pakar dari berbagai bidang keilmuan dan institusi terkait. Masa kerja tim ahli tersebut adalah 1 tahun. Susunan tim ahli untuk setiap standar yang dikembangkan pada tahun 2010 dapat dilihat dalam laporan masing-masing kegiatan.



PENGEMBANGAN PARADIGMA PENDIDIKAN NASIONAL ABAD XXI

Badan Standar Nasional Pendidikan



**Tim Ahli Pengembangan Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI
bersama narasumber**

BAB 2 PENGEMBANGAN PARADIGMA PENDIDIKAN NASIONAL ABAD XXI

1 | Pendahuluan

Era globalisasi dan keterbukaan telah mengubah wajah dunia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Mengalirnya informasi dan beragam sumber daya secara bebas dalam lingkungan interaksi lintas negara telah membawa berbagai perubahan dahsyat yang belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Untuk dapat tetap bertahan menjadi bangsa yang unggul dan relevan dalam konteks kehidupan modern ini, berbagai negara berlomba-lomba untuk meningkatkan daya saingnya, agar selain mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, sanggup pula menjadi komunitas terbaik yang diperhitungkan keberadaannya dalam percaturan pergaulan dunia. Adalah merupakan suatu kenyataan, bahwa daya saing sebuah negara tidak lagi terletak pada sumber daya alam yang dimiliki, namun terletak pada kualitas sumber daya manusia dengan pengetahuan dan kompetensi yang dimilikinya untuk mengubah berbagai aset dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini jelas terlihat bahwa aspek pendidikan – baik yang bersifat formal, non-formal, maupun informal – menjadi kunci bagi keberhasilan pengembangan sumber daya manusia suatu bangsa.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa setelah lima puluh tahun merdeka, sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia tidak pernah

luput dari gugatan berbagai ahli pendidikan maupun masyarakat luas. Walaupun telah mengalami sejumlah perubahan sejalan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, sistem pendidikan di Indonesia dipandang masih jauh dari ekspektasi berbagai pemangku kepentingannya. Bahkan dalam sebuah pandangan ekstrim, sejumlah ahli pendidikan kerap merasa bahwa sistem pendidikan yang ada berada pada “jalur yang keliru”. Walaupun sepintas terkesan tuduhan tersebut terlampau berlebihan, namun jika direnungkan secara jernih dan obyektif, terutama dengan melihat berbagai fenomena negatif yang terjadi belakangan ini di tanah air terkait dengan sektor pendidikan, tidak sepenuhnya pendapat tersebut dapat disalahkan. Lihatlah sejumlah kejadian yang belakangan ini marak mengemuka di masyarakat pendidikan Indonesia:

- Maraknya aksi demo dan perkelahian antar mahasiswa dari dua perguruan tinggi maupun antara mahasiswa dengan pimpinan institusi yang berakhir pada aksi pengrusakan, anarkis, dan perilaku destruktir lainnya;
- Terbongkarnya kasus plagiarisme dari individu maupun kelompok individu berlatar belakang pendidikan akademik terhormat dari berbagai institusi perguruan tinggi terkemuka di tanah air;
- Terselenggaranya berbagai kecurangan dalam berbagai lapisan masyarakat mulai dari penyelenggara, pengawas, pendidik, hingga peserta didik dalam pelaksanaan Ujian Nasional;
- Terbukanya berbagai kasus korupsi yang melibatkan individu-individu terhormat yang sangat dikenal integritasnya selama ini di kalangan akademik dan pendidikan;
- Tertinggalnya mutu dan kualitas pendidikan nasional jika dibandingkan dengan negara tetangga Asia lainnya, terutama jika dilihat dari indikator HDI (Human Development Index) dan berbagai indikator kinerja lainnya; dan lain sebagainya.

Jika memang sistem pendidikan di Indonesia selama ini

dibangun di atas dasar yang kokoh, maka terasa mustahil akan menghasilkan buah kejadian negatif seperti yang disampaikan di atas. Di samping itu, berbagai keluhan yang disampaikan oleh pihak guru, orang tua, maupun peserta didik itu sendiri, terutama terjadi dalam sistem pendidikan dasar dan menengah, tidak dapat disepelekan keberadaannya, seperti:

- Terasa semakin bertambah besar beban belajar seorang anak, yang ditandai dengan begitu banyaknya buku, konten, tugas, ulangan, dan pekerjaan rumah yang dibebankan kepadanya, sehingga terkesan proses belajar hanya menekankan pada pencapaian intelegensia kognitif semata;
- Masih difokuskannya pendidikan pada pencapaian kecerdasan intelijen (IQ), yang ditandai dengan konten dan cara pembelajaran yang menekankan pada pengembangan aspek kognitif seorang peserta didik, jauh dari pembentukan seorang manusia pembelajar unik dan memiliki talenta kreativitas, inovasi, minat, bakat, kompetensi, dan keahlian yang berbeda-beda;
- Penekanan pendidikan yang terasa masih berfokus pada guru sebagai pihak yang layak dan harus di-“gugu” dan di-“tiru” sehingga berbagai keterbatasan yang dimiliki seorang guru akan mempengaruhi mutu atau kualitas hasil pendidikan yang diperoleh peserta didik;
- Diterapkannya berbagai standar baku yang belum tentu sesuai dengan kondisi keberagaman dan heterogenitas lingkungan pendidikan yang ada di seluruh wilayah tanah air, sehingga kerap mendatangkan permasalahan berbeda-beda pada setiap satuan pendidikan yang ada; dan lain sebagainya.

Tentu saja keberadaan isu serta permasalahan di atas tidak terlepas dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keluaran hasil sistem dan model pendidikan yang diterapkan dan dikembangkan. Isu-isu yang awalnya menggejala di pendidikan dasar dan menengah ini pada akhirnya berpengaruh pula pada hasil keluaran pendidikan tinggi,

seperti: profil lulusan yang tidak relevan dengan kebutuhan industri, kemampuan “soft skill” yang sangat kurang, kecerdasan emosi (EQ) yang buruk, kompetensi dan keahlian yang tidak mutakhir, dan lain sebagainya. Jika isu dan permasalahan ini dibiarkan, tidak mustahil bangsa Indonesia akan semakin diasingkan dalam pergaulan dunia karena tidak mampu menjawab berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi.

2 | Tujuan dan Manfaat

Melihat hal tersebut di atas, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku lembaga independen yang memiliki tugas antara lain “mengembangkan Standar Nasional Pendidikan” dan “memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan” merasa terpanggil untuk memecahkan sejumlah permasalahan strategis dimaksud (sebagai tujuan pertama). Oleh karena itulah sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki, BSNP memutuskan untuk mengembangkan sebuah standar baru yang diberi nama “Standar Paradigma Pendidikan Nasional” sebagai salah satu usaha untuk mereformasi sistem dan model pendidikan di Indonesia saat ini (tujuan kedua). Dalam perkembangan lebih lanjut Paradigma tidak dapat distandarkan oleh karena itu nama berubah menjadi “Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI”

Berbeda dengan beragam standar yang pernah dihasilkan BSNP selama ini, keluaran dari Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI adalah sejumlah prinsip dasar mengenai landasan filosofis dan esensial dalam menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran di berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat formal, non-formal, maupun informal. “Paradigma” ini diharapkan menjadi panduan bagi para penyelenggara dan pemangku kepentingan

sistem pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, agar berbagai pendekatan, proses, dan mekanisme dalam lingkungan sistem pendidikan maupun pembelajaran yang diselenggarakan benar-benar memenuhi sejumlah asas dan kaidah pendidikan yang hakiki (sebagai manfaat pertama). "Paradigma" ini pun akan dipergunakan oleh BSNP dalam usahanya untuk mengevaluasi, menilai, menyusun, dan mengembangkan berbagai standar pendidikan yang telah dihasilkan selama ini – agar keberadaannya selalu relevan dengan dinamika kebutuhan dan perubahan yang terjadi di masyarakat (manfaat keduaaaa).

3 | Tim Ahli

A. Anggota BSNP

NO	NAMA	ASAL
1.	Prof. Dr. dr. Farid Anfasa Moeloek, Sp. OG. (Koordinator)	UI Jakarta
2.	Prof. Dr. Ir. Moehammad Aman Wirakartakusumah, M.Sc.	IPB Bogor
3.	Prof. Dr. rer. nat. Gunawan Indrayanto	Unair Surabaya
4.	Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H.	Unpar Bandung
5.	Prof. Dr. Richardus Eko Indrajit	Jakarta
6.	Prof. Dr. Jamaris Jamna, M.Pd.	UNP Padang
7.	Pdt. Weinata Sairin, M.Th	Jakarta

B. Tim Ahli Paradigma Pendidikan Nasional

NO	NAMA	INSTANSI	ASAL
1.	Prof. Dr. Edi Sedyawati (Ketua)	AIPI	Jakarta
2.	Prof. (E) M. Ansjar, Ph.D.	ITB	Bandung
3.	Prof. Dr. H. AT Soegito, SH, MM	Unnes	Semarang
4.	Prof. Ir. Eko Budihardja, M.Sc.	Undip	Semarang
5.	Prof. Dr. Ichlasul Amal	UGM	Yogyakarta
6.	Prof. Dr. Toeti Herati Ruseno (non-aktif)	UI	Jakarta
7.	Dr. Imam B. Prasodjo	UI	Jakarta
8.	Prof. Dr. Muh. Mulyohadi Ali, dr., Sp FK	Unibraw	Malang
9.	Prof. (E) Imam Buchori Zainuddin	ITB	Bandung
10.	Prof. Dr. Bambang Hidayat	AIPI	Bandung
11.	Prof. Dr. Budiono Kusumohamidjojo, S.H.	Unpar	Bandung
12.	Dr. Terry Mart	UI	Jakarta
13.	Prof. Dr. Gaguk Margono	UNJ	Jakarta

4 Tahapan Kegiatan

Kegiatan penyusunan paradigma pendidikan nasional meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Tempat
1	Kam, Jum, Sab 20 – 22 Mei	Penyusunan Desain	Jakarta
2	Rab, Kam, Jum 30 Jun – 2 Juli	Kajian Bahan Dasar	Jakarta
3	Rab, Kam, Jum 21, 22, 23 Juli	Penyusunan Draft Standar	Jakarta
4	Jum, Sab, Min 13, 14, 15 Agustus	Reviu dan Perbaikan Draft Standar	Jakarta
5	Sel, Rab, Kam 28 – 30 September	Validasi Draft Standar	4 Provinsi Malang (Jatim) Yogyakarta (DIY) Medan (Sumut) Makassar (Sulsel)

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Tempat
6	Jum, Sab, Min 1 – 3 Oktober	Analisis Hasil Validasi Draft Standar	Jakarta
7	Jum, Sab, Min 15 – 17 Oktober	Perbaikan Draft Standar Hasil Validasi	Jakarta
8	Sen, Sel, Rab 1 – 3 November	Pembahasan Draft Standar dengan Unit Utama	Jakarta
9	Jum, Sab, Min 5 – 7 November	Finalisasi Draft Standar Untuk Uji Publik	Jakarta
10	Min, Sen, Sel 21 – 23 November	Uji Publik Draft Standar	4 Provinsi Denpasar (Bali) Banjarmasin (Kalsel) Palembang (Sumsel) Semarang (Jateng)
11	Sab, Min, Sen 27 – 29 November	Finalisasi Standar	Jakarta

1. **Penyusunan Desain**

Pada tahap ini dimulai dengan brainstorming seluruh anggota Tim untuk menentukan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah yang sudah ditetapkan BSNP. Dari hasil brainstorming tersebut diubah dari heading semula “Standar Paradigma Pendidikan Pendidikan Tinggi” menjadi “Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI”

2. **Kajian Bahan Dasar**

Kegiatan ini dimulai dengan penyusunan kerangka draft “Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI” dan dihasilkan draft pertama “Paradigma”

3. **Penyusunan Draft Standar**

Kegiatan ini melanjutkan diskusi yang telah beredar di email (yahogroups) kembali atas draft pertama dan mengalami perubahan yang cukup banyak dan menjadi draft kedua.

4. **Reviu Draft Standar**

Sebagai kegiatan lanjutan yang disertai diskusi baik di alam

maya maupun reliatas draft kedua direviu lagi dan dihasilkan draft ketiga; draft ini dipresentasi di BSNP pada tanggal 24 Agustus 2010. Langsung diperbaiki kembali diperoleh draft keempat untuk persiapan validasi ke 4 provinsi.

5. Validasi Draft Standar
Pada kegiatan ini draft keempat yang telah adadisertasi instrumen keterbacaan divalidasi di 4 provinsi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Malang (Jatim), Makassar (Sulsel), dan Medan (Sumut).
6. Analisis Hasil Validasi Draft Standar
Hasil validasi dari 4 provinsi dikompilasi kemudian dianalisis; berdasarkan analisis tersebut dipilah dan dipilih mana yang akan dipakai mana yang tidak.
7. Perbaikan Draft Standar Hasil Validasi
Berdasarkan kegiatan keenam di atas, draft kemudian diperbaiki lagi untuk diperbaiki kembali; di samping untuk menyiapkan pembahasan draft dengan unit utama.
8. Pembahasan Draft Standar dengan Unit Utama
Kegiatan ini diadakan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan mengundang para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan, Lemhanas, pakar pendidikan, stakeholders, dan juga 20 perguruan tinggi negeri melalui teleconference. Ini merupakan pengalaman pertama BSNP menggunakan fasilitas teleconference.
9. Finalisasi Draft Standar untuk Uji Publik
Kegiatan ini dilaksanakan guna menampung masukan saat pembahasan draft dengan unit utama, draft diperbaiki lagi berdasarkan masukan dari unit utama.
10. Uji Publik Draft Standar
Kegiatan ini dilaksanakan di 4 provinsi yaitu Semarang (Jateng), Palembang (Sumsel), Denpasar (Bali), dan Banjarmasin (Kalsel), menggunakan draft yang telah diperbaiki pada kegiatan

sebelumnya.

11. Finalisasi Draft Standar

Kegiatan ini dipergunakan untuk memperbaiki draft yang ada berdasarkan uji publik di 4 provinsi tersebut di atas, namun belum selesai sepenuhnya karena masih menunggu presentasi kembali di BSNP.

5 | Hasil yang Diperoleh

Kegiatan ini menghasilkan naskah “Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI” yang dapat digunakan sebagai pedoman atau panduan bagi seluruh stakeholders di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Naskah ini terdiri dari 5 bab, sebagai berikut:

Bab pertama, berupa sajian tentang aras pendidikan dalam ujud pengertian dasar, falsafah dan paradigma pendidikan. Bab kedua, memuat makna pendidikan nasional yang mengajak mandiri dan membebaskan diri dari kemiskinan. Sampai tahun ke 66 Kemerdekaan kita asas pendidikan itu telah berhasil mengangkat beberapa generasi yang mencitrakan keinginan jiwa pendidikan nasional. Bab ketiga, berisi azas, profil, rona dan interaksi pendidikan dunia nir-batas geografi, tetapi berbatasan kemampuan teknologi dan sains. Tantangan abad ke 21 membawa konsekuensi paradigmatik pendidikan nasional. Bab keempat, paradigma pendidikan abad XXI yang berujud wawasan, pengembangan, dan profil manusia pengemban amanat abad ini. Masalah kurang merataan akses pendidikan harus menghilangkan perbatasan gender, etnisitas, dan kewilayahan dalam memajukan usaha berbangsa. Dan bab kelima, sebuah cara memandang dan menerapkan paradigma pendidikan. Uraian diagramatik disertakan dalam ujud diagram alir, serta keterangan yang bertautan.

Mengapa perlu dikembangkan Paradigma Pendidikan Nasional

Abad XXI? Pertama, amanat Proklamasi adalah terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia yang duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kedua, perubahan drastis abad XXI. Perubahan drastis abad XXI terjadi di seluruh dunia, yaitu berkembangnya globalisasi dan makin besarnya pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin menyatu terhadap kehidupan umat manusia, baik dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi, yang mulai dikenal dengan sebutan tekno-sains. Amanat proklamasi harus dilaksanakan dan perubahan dunia harus dihadapi oleh segenap warga negara Indonesia dengan semangat kemandirian, walaupun kerjasama antara bangsa perlu dibina sebagai warga dunia, dan dimanfaatkan dengan tetap menjunjung tinggi semangat kemandirian. Kemampuan warga negara melaksanakan dan menghadapi semua ini hanya dapat diperoleh melalui pendidikan.

Berdasarkan dua alasan tersebut dan mengamati pelaksanaan serta hasil pendidikan dewasa ini, dirasa perlu adanya paradigma pendidikan nasional yang baru yang lebih sesuai, yang disusun sebagai Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI.

Beberapa pemikiran dalam penyusunan Paradigma Pendidikan Abad XXI sebagai berikut: pertama tentang pengertian paradigma pendidikan nasional. Paradigma Pendidikan Nasional adalah cara memandang dan memahami pendidikan nasional, dan dari sudut pandang ini kita mengamati dan memahami masalah dan permasalahan yang dihadapi dan mencari cara mengatasi permasalahan tersebut. Termasuk dalam hal ini tantangan dasar yang dihadapi manusia dalam kaitannya dengan tata sosial, kebudayaan serta lingkungan alamnya.

Kedua, pengertian pendidikan. Sebagai ide dasar pendidikan adalah membangun manusia supaya dia dapat survive melindungi diri terhadap alam serta mengatur hubungan antar manusia. Melalui pendidikan terjadi proses meneruskan suatu kompleks pengetahuan dan kecakapan (capacities) dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Setiap generasi akan menggali dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru yang diperlukan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan yang belum dikenal melalui pendidikan pengetahuan dan kecakapan sebelumnya. Berikut beberapa definisi pendidikan:

1. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003): pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif menyumbangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepirtual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Ki Hajar Dewantoro: pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak. Ketiga-tiganya tidak boleh dipisah-pisahkan, agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak didik selaras dengan dunianya.
3. Mohammad Sjafei mendirikan "Perguruan Ruang Pendidik INS Kayutanam" di suatu desa kecil bernama Kayutanam di Sumatera Barat. Ada lima garapan utama yang dikembangkan oleh perguruan tersebut, yaitu: (a) kemerdekaan berpikir (dalam bentuk inovasi/kreativitas), (b) pengembangan ilmu pengetahuan, talenta/bakat (sebagai rakhmat Tuhan), dan potensi diri, (c) kemandirian dan entrepreneurship, (d) etos kerja, serta (e) akhlak mulia (sebagai pengejawantahan dari agama, etika, dan estetika).

Ketiga, tentang abad XXI, lahirnya sains dan teknologi komputer memicu kepesatan kemajuan ilmu pengetahuan, yang mencakup cognitive science, bio-molecular, information technology, dan nano-science, yang mencirikan abad XXI ini. Yang paling menonjol adalah makin bertautnya dunia ilmu pengetahuan, sehingga sinergi diantaranya makin cepat.

Karakteristik abad XXI, sebagai berikut:

- a. Perhatian yang semakin besar terhadap masalah lingkungan hidup, berikut implikasinya, terutama terhadap: pemanasan global, energi, pangan, kesehatan, lingkungan binaan, dan mitigasi.
- b. Dunia kehidupan akan semakin dihubungkan oleh teknologi informasi, berikut implikasinya, terutama terhadap: ketahanan dan sistem pertahanan, pendidikan, industri, dan komunikasi.
- c. Ilmu pengetahuan akan semakin converging, berikut implikasinya, terutama terhadap: penelitian, filsafat ilmu, paradigma pendidikan, dan kurikulum.
- d. Kebangkitan pusat ekonomi di belahan Asia Timur dan Tenggara, berikut implikasinya terhadap: politik dan strategi ekonomi, industri, dan pertahanan,
- e. Perubahan dari ekonomi berbasis sumber daya alam serta manusia ke arah ekonomi berbasis pengetahuan, berikut dengan implikasinya terhadap: kualitas sumber daya insani, pendidikan, dan lapangan kerja,
- f. Perhatian yang semakin besar pada industri kreatif dan industri budaya, berikut implikasinya, terutama terhadap: kekayaan dan keanekaagaman ragam budaya, pendidikan kreatif, entrepreneurship, technopreneurship, dan rumah produksi.
- g. Budaya akan saling imbas mengimbas dengan tekno-sains berikut implikasinya, terutama terhadap: karakter, kepribadian, etiket, etika, hukum, kriminologi, dan media.
- h. Perubahan paradigma universitas, dari "Menara Gading" ke "Mesin Penggerak Ekonomi". Investasi yang ditanamkan dari sektor publik ke perguruan tinggi untuk riset ilmu dasar dan terapan serta inovasi teknologi/desain yang memberikan dampak pada pengembangan industri dan pembangunan ekonomi dalam arti luas akan cenderung meningkat.

Pada abad XXI, permasalahan yang dihadapi manusia makin kompleks, karena saling berkaitan, cepat berubah dan penuh

paradoks. Permasalahan pada seluruh kehidupan manusia yang timbul sebagai dampak pertumbuhan penduduk yang luar biasa cepatnya (mulai dari kelangsungan hidup sampai ke pendidikan) makin kompleks bila dihubungkan dengan kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena kebhinnekaan sistem dan nilai antara bangsa, suku bangsa dan individu. Kapesatan pertumbuhan penduduk berdampak pada daya dukung alam yang makin lama tidak akan mencukupi, karena sumber mineral tidak bertambah, dan sumberdaya hayati dan nabati tetap akan 'mengganggu' keseimbangan ekosistem, walaupun dapat dibudayakan. Karena itu, masalah lingkungan hidup merupakan salah satu isu utama untuk mengubah paradigma lama yang terlalu menekankan pada ilmu pengetahuan demi ilmu pengetahuan dan seni demi seni, kearah paradigma baru yang lebih mengedepankan makna dan nilai pengembangan yang bersifat berkelanjutan.

Dalam pembahasan paradigma pendidikan nasional ini muncul istilah "teknosains". Istilah tekno-sains awalnya dimunculkan setelah mencermati bahwa teknologi dan sains tidak dapat dipisahkan, saling mendukung pengembangannya. Kemudian konsep ini digunakan untuk menengarai munculnya masyarakat modern yang tidak dapat terlepas pengaruh sains dan teknologi ini. Simbiosis teknologi dan sains dalam interaksi dan pemberdayaan sosialnya (mencakup juga aspek politik, ekonomi, dan budaya), memberikan pengaruh baik dari aspek positifnya maupun aspek negatifnya. Pemberdayaan itu seolah-olah menubuh (embedded) dalam diri pribadi dan spirit masyarakat.

Keempat, potret pendidikan nasional dewasa ini, ditinjau dari paradigma pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan pengejawantahan tuntutan reformasi untuk memburu ketertinggalan bangsa dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan global. Beberapa butir diantaranya adalah berkaitan dengan:

- (i) Desentralisasi menggantikan paradigma sentralisasi.

- (ii) Tanggungjawab pengelolaan sistem pendidikan nasional berada di tangan menteri pendidikan nasional.
- (iii) Pengelolaan pendidikan dasar dan menengah sebagai satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal di setiap kabupaten dan kota.
- (iv) Adanya satuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (v) Mengakomodasikan pendidikan jarak jauh di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, sebagai layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan reguler.

Tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung-jawab .

Paradigma pendidikan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 ada empat paradigma universal, sebagai berikut:

- (i) Pemberdayaan manusia seutuhnya sebagai fondasi pendidikan yang menyiapkan peserta didik sebagai pribadi yang mandiri, unsur sistem sosial yang saling berinteraksi dan saling mendukung, dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi.
- (ii) Pembelajaran sepanjang hayat yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran sebagai proses yang berlangsung seumur hidup, diselenggarakan secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal, dapat diakses setiap saat, tidak dibatasi oleh usia, tempat dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian,

- program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system)
- (iii) Pendidikan untuk semua. Pendidikan dasar (minimal) adalah bagian hak asasi manusia dan setiap warga negara. Pemu-
nuhan hak mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu
merupakan: ukuran keadilan, pemerataan hasil pembangunan,
menjadi investasi sumber daya manusia untuk mendukung ke-
berlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan
pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah
menjadi komitmen global. Karena itu, program pendidikan
untuk semua diselenggarakan pada jalur pendidikan formal,
nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka,
demokratis dan berkesetaraan gender agar dapat menjangkau
mereka yang berdomisili di tempat terpencil, dan yang mem-
punyai kendala ekonomi dan sosial.
- (iv) Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau
Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B). Pendidikan mengha-
silkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi
semesta alam, yang berarti bahwa manusia ini harus memenuhi
kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi
saat ini dan masa mendatang. Manusia harus berpikir tentang
keberlanjutan dunia dan alam semesta. Pendidikan harus
menumbuhkan pemahaman pentingnya keberlanjutan dan
keseimbangan ekosistem, yang berarti bahwa manusia ada-
lah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pe-
mahaman tentang nilai-nilai tanggung-jawab sosial dan natural,
dan peserta didik merasakan bahwa mereka adalah bagian dari
sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain, bagian
dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam dan seluruh
isinya. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman
kritis tentang lingkungan
- Lulusan perguruan tinggi dan sekolah menengah kita yang

berprestasi baik dalam berbagai profesi, dan dalam studi lanjut di berbagai universitas ternama di luar negeri, ini menunjukkan sisi baik kualitas pendidikan kita di berbagai lembaga. Lulusan perguruan tinggi dan sekolah menengah yang berkiprah baik di berbagai profesi, walaupun di luar bidang pendidikannya; ini menunjukkan, bahwa disamping memperoleh ilmu, peserta didik juga memperoleh kearifan, sikap dan kemampuan menyerap nilai-nilai yang ditumbuhkan selama belajar, melalui hakikat ilmu yang dipelajari, maupun melalui proses belajar atau kehidupan bermakna yang dialami di lembaga pendidikan mereka; keberhasilan siswa dan mahasiswa dalam berbagai kontes keilmuan; ini menunjukkan adanya keberhasilan pembinaan peserta didik yang baik, walau tidak berarti mencerminkan hasil pendidikan yang sebenarnya; pengalaman menunjukkan bahwa banyak peserta didik yang tahu banyak, tetapi tidak mengerti apa yang diketahui; fenomena tak terpuji yang marak dalam masyarakat (tawuran antara siswa, antara mahasiswa dan antara masyarakat, KKN dan korupsi di berbagai lembaga, sampai ke penegak hukum), menunjukkan ketidakberhasilan pendidikan kita menanamkan nilai-nilai luhur pada peserta didik di semua jenjang pendidikan; keberhasilan siswa dan mahasiswa dalam berbagai kontes keilmuan; ini menunjukkan adanya keberhasilan pembinaan peserta didik yang baik, walau tidak berarti mencerminkan hasil pendidikan yang sebenarnya; pengalaman menunjukkan bahwa banyak peserta didik yang tahu banyak, tetapi tidak mengerti apa yang diketahui; fenomena tak terpuji yang marak dalam masyarakat (tawuran antara siswa, antara mahasiswa dan antara masyarakat, KKN dan korupsi di berbagai lembaga, sampai ke penegak hukum), menunjukkan ketidakberhasilan pendidikan kita menanamkan nilai-nilai luhur pada peserta didik di semua jenjang pendidikan; mahasiswa lebih suka mengutarakan pendapat melalui unjuk rasa daripada melakukan analisis, merumuskan hasil pemikiran dan menyampaikannya dengan santun; ini menunjukkan kegagalan pendidikan tinggi kita menghasilkan cendekiawan yang diharapkan

akan membangun masyarakat yang berbudaya.

Semua yang dikemukakan hanyalah beberapa yang menunjukkan belum cukup terpenuhi apa yang dirumuskan dalam paradigma pendidikan selama ini, terutama yang diungkapkan dalam fungsi pendidikan nasional.

Beberapa catatan tentang paradigma pendidikan nasional abad XXI:

- (i) Pendidikan pada hakekatnya adalah proses penemuan diri yang berlangsung sepanjang hayat untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki seseorang secara penuh, yang memberikan kepuasan dan makna pada kehidupannya.
- (ii) Pendidikan adalah pengawal peradaban (the guardian of civilization).
- (iii) Pendidikan merupakan kekuatan moral dan kekuatan intelektual yang berjalan seimbang, tidak boleh timpang.
- (iv) Menurut paradigma pendidikan yang demokratis : Education does not depend on teaching, but rather on the self-motivated curiosity and self-initiated actions of the learner (Ackoff & Greenberg).

Tujuan Pendidikan Nasional abad XXI, hendaknya untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya.

Kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat kehidupan bermasyarakat yang nyaman, saling menghormati dan dihormati mulai dari lingkungan keluarga sampai ke lingkungan antarabangsa. Ini hanya akan tercapai apabila masing-masing anggota masyarakat berpegang pada nilai-nilai luhur yang tercermin dalam sikap dan perbuatan, saling menghormati dan saling menghargai, memiliki rasa

kebersamaan, empati, memiliki sikap-sikap yang terpuji, yang berupa kesediaan dan kemauan untuk saling membantu dan berbuat untuk kemanfaatan bersama, termasuk menaati kesepakatan bersama yang berupa berbagai aturan dalam keluarga, sampai dengan peraturan perundangan lokal, nasional, sampai antarbangsa. Kesejahteraan dalam kehidupan: hidup berkecukupan, terbebas dari kemiskinan, walaupun tidak harus berupa kemewahan, ini hanya akan terwujud apabila: masing-masing warga negara memiliki dan menguasai kecakapan dan keilmuan, disertai dengan kemauan dan kemampuan memanfaatkannya untuk kepentingan bersama. Penguasaan ilmu bukan hanya menguasai materi ilmu semata, melainkan juga memiliki sikap keilmuan dan sikap terhadap ilmu.

Dengan menarik pelajaran dari perkembangan tersebut di atas, paradigma pendidikan nasional abad XXI dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk menghadapi abad XXI yang makin sarat dengan teknologi dan sains dalam masyarakat global, maka pendidikan kita haruslah berorientasi pada ilmu pengetahuan matematika dan sains alam disertai dengan sains sosial dan kemanusiaan (humaniora) dengan keseimbangan yang wajar.
- b. Pendidikan ilmu pengetahuan bukan hanya membuat seorang peserta didik berpengetahuan, melainkan juga menganut sikap keilmuan, yaitu kritis, logis, inventif dan inovatif, serta konsisten, namun disertai pula dengan kemampuan beradaptasi secara sosial. Di samping memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan harus disertai dengan pamrih menanamkan nilai-nilai luhur dan menumbuhkan kembangkan sikap terpuji untuk hidup dalam masyarakat yang sejahtera dan bahagia di lingkup nasional maupun di lingkup antarbangsa dengan saling menghormati dan saling dihormati.
- c. Untuk mencapai tujuan ini mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi haruslah

merupakan suatu sistem yang tersambung erat tanpa celah, setiap jenjang menunjang penuh jenjang berikutnya, menuju ke frontier ilmu. Namun demikian penting pula bahwa pada akhir setiap jenjang, di samping jenjang untuk ke pendidikan berikutnya, terbuka pula jenjang untuk langsung terjun ke masyarakat.

- d. Bagaimanapun juga, pada setiap jenjang pendidikan perlu ditanamkan jiwa kemandirian, karena kemandirian pribadi mendasari kemandirian bangsa, kemandirian dalam melakukan kerjasama yang saling menghargai dan menghormati untuk kepentingan bangsa.
- e. Khusus di perguruan tinggi, dalam menghadapi konvergensi berbagai bidang ilmu pengetahuan, maka perlu dihindarkan spesialisasi yang terlalu awal dan terlalu tajam.
- f. Dalam pelaksanaan pendidikan perlu diperhatikan kebhinnekaan etnis, budaya, agama dan sosial, terutama di jenjang pendidikan awal. Namun demikian, pelaksanaan pendidikan yang berbeda ini diarahkan menuju ke satu pola pendidikan nasional yang bermutu.
- g. Untuk memungkinkan semua warganegara mengenyam pendidikan sampai ke jenjang pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya, pada dasarnya pendidikan harus dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (pusat dan daerah).
- h. Untuk menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas, perlu dikembangkan sistem monitoring yang benar dan evaluasi yang berkesinambungan serta dilaksanakan dengan konsisten. Lembaga pendidikan yang tidak menunjukkan kinerja yang baik harus ditutup.

Strategi pengambilan kebijakan. Dengan memperhatikan: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkeanekaragaman geodemografis, budaya, tantangan global dan lokal adanya potensi

yang masih harus dikembangkan, maka strategi pencapaian tujuan pendidikan nasional abad XXI harus mencakup: tanggung jawab pemangku kepentingan yang terkait, dalam menentukan kebijakan dan kemauan politik untuk menghadapi tantangan perubahan paradigma.

Strategi pendidikan yang meliputi pelaksanaan operasional untuk mencapai sasaran paradigma:

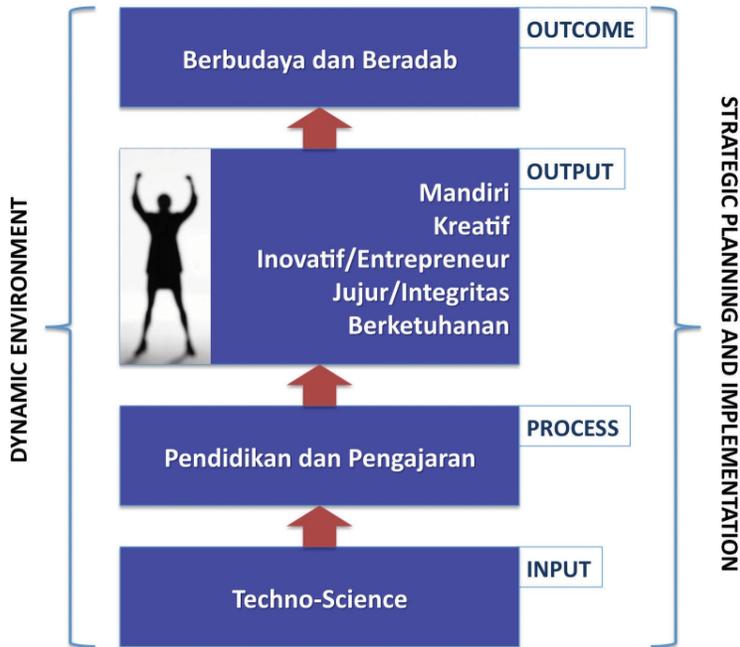
- a. Menumbuhkan komitmen, meningkatkan daya pemangku kepentingan antara lain badan eksekutif pusat sampai daerah dan jajarannya maupun badan legislatif pusat dan daerah melalui tugas dan fungsi terkaitnya masing-masing.
- b. Meningkatkan keterlibatan sektor informal dan lembaga swadaya masyarakat terutama dalam pendidikan nonformal maupun informal sesuai dengan paradigma baru.
- c. Menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas inovatif masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan paradigma yang sesuai dengan budaya setempat.
- d. Menumbuhkan dan meningkatkan sumber daya manusia bidang pendidikan yang mengacu pada implementasi paradigma.
- e. Meningkatkan dan pemeratakan keberadaan pendidikan formal, seras nonformal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi pengembangan daerah masing-masing.

Strategi pelaksanaan pendidikan nasional berbasis perubahan paradigma meliputi perencanaan dan pelaksanaan input, proses, target luaran dan outcome yang akan dicapai baik melalui pendidikan formal, nonformal dan informal. Diharapkan dokumen ini dapat membantu para pemangku kepentingan dalam mencerna keterkaitan antara beberapa aspek penting dan esensial. Perlu diingat bahwa dokumen ini bukan bertujuan untuk menyederhanakan atau menggampangkan pemahaman terhadap berbagai isu dimaksud, namun lebih ditujukan sebagai pengantar maupun pendahuluan bagi mereka yang berniat untuk mendalami pembahasan terkait

dengan paradigma pendidikan nasional Indonesia pada Abad XXI.

Untuk mempermudah pemahaman, maka instrumen yang dapat dipergunakan adalah penggabungan antara Diagram IPOO (Input-Process-Output-Outcome). Dalam IPOO, terdapat 4 (empat) aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu masing-masing terkait dengan: (i) input (masukan); (ii) process (proses); (iii) output (luaran); dan (iv) outcome (hasil). Sementara itu ada dua faktor utama yang penting dan mempengaruhi keempat aspek tersebut, yaitu: (i) Dinamika Lingkungan; dan (ii) Strategi Perencanaan dan Implementasi.

Lingkungan Masyarakat yang Dinamis. Abad XXI ditandai dengan dinamika lingkungan kehidupan yang menggelora, dengan tingkat kecepatan dan fluktuasi perubahan yang sangat tinggi. Pengaruh globalisasi, agenda reformasi, kemajuan teknologi, konvergensi industri, pergeseran nilai dan budaya, krisis ekonomi dan politik, pergeseran kekuatan dunia, dan pemanasan global hanyalah merupakan sebagian isu termutakhir yang menandai dinamika perubahan yang terjadi dari masa ke masa dengan tingkat akselerasi yang semakin cepat. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, komunitas, masyarakat, bahkan bangsa ditantang untuk menunjukkan dan mempertahankan jati dirinya dari gempuran perubahan yang semakin menggejala ini. Berbagai negara di dunia saling berlomba dalam menghadapi tantangan dan peluang perubahan global ini dalam membangun strategi yang cocok untuk meningkatkan daya saing bangsanya, melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya manusianya. (Lihat Bagan di bawah)



Bagan 1. Diagram I-P-O-O

Input: Tekno-Sains sebagai Pemicu Perubahan. Pendidikan Abad XXI terbentuk karena pengaruh kental dari perkembangan Techno-Science, yang dipicu oleh kemajuan dunia komputer, teknologi informasi dan komunikasi, serta internet (baca: Cyber Space). Dengan berhasil didigitalisasikannya beragam sumber daya pembelajaran (berbasis teks, gambar, audio, dan video) serta proses belajar mengajar (e-learning dan e-education), dan melalui terbentuknya jejaring raksasa internet yang menghubungkan hampir 25% dari penduduk dunia saat ini, maka terkikis sudahlah hambatan ruang dan waktu yang selama ini menjadi momok manusia dalam melakukan proses pembelajaran. Jika dahulu dapat terbayangkan bagaimana sulitnya seorang individu menghabiskan waktu dan biaya untuk mencari

ilmu, saat ini seluruh ilmu yang ada di dunia ini sudah berada dalam genggaman tangan setiap individu melalui kehadiran internet.

Process: Pendekatan Pendidikan dan Pembelajaran. Akibat dinamika lingkungan yang sedemikian rupa, ditambah dengan pengaruh tekno-sains yang sangat kental, maka pendekatan model pendidikan dan pembelajaran pun haruslah diubah sedemikian rupa agar relevan dan efektif. Perubahan pendekatan dalam menyusun model dan mekanisme pendidikan serta pengajaran inilah yang perlu diubah paradigmanya. Perubahan paradigma dimaksud meliputi banyak aspek, antara lain: model kurikulum, konten pengetahuan, pendekatan belajar mengajar, model keterlibatan guru/dosen, jenis materi, standar kompetensi dan keahlian, cara evaluasi, postur institusi pendidikan, peran pemerintah dan regulator, sistem pengawasan, dan lain sebagainya. Tanpa adanya perubahan pola pikir dan paradigma dimaksud, mustahil akan dihasilkan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan yang diharapkan oleh bangsa dan negara untuk dapat unggul di abad XXI ini. Perlu diperhatikan bahwa dalam kerangka pendidikan dan pengajaran, perubahan paradigma tidak hanya berlaku untuk jenis pendidikan formal, namun juga perlu diterapkan bagi pendidikan non-formal dan informal.

Output: Karakteristik Manusia Pembelajar yang Dituju. Salah satu cara untuk dapat menjadi bangsa besar di tengah-tengah lingkungan global yang penuh dengan tantangan dan persaingan ini adalah melalui kehadiran sumber daya manusia atau masyarakat yang memiliki karakteristik sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara tersebut dalam proses pencapaian cita-citanya. Belajar dari negara maju dan negara berkembang lainnya yang telah berhasil menjawab tantangan serta peluang abad XXI adalah terciptanya sumber daya manusia atau masyarakat yang tidak hanya cerdas dari segi pengetahuan atau kognitif semata, namun memiliki pula ciri sebagai berikut: (i) mampu menjadi manusia yang mandiri; (ii) memiliki kreativitas tinggi; (iii) memiliki jiwa kewirausahaan (entrepreneurship)

dalam menciptakan beragam inovasi; (iv) jujur dan berintegritas tinggi; serta (v) bermoral dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam konteks inilah sistem pendidikan di Indonesia pada abad XXI harus bertumpu, yaitu menciptakan manusia yang berkarakter.

Outcome: Hasil dan Dampak Nyata Pendidikan. Dengan dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter tersebut sebagai output dari sebuah sistem pendidikan nasional, maka secara langsung maupun tidak langsung akan menciptakan sebuah komunitas bangsa yang beradab dan berbudaya – sehingga sesuai dengan definisi dan khitahnya, pendidikan akan benar-benar menjadi sebuah pilar peradaban bangsa yang berbudaya. Oleh karena itulah maka perlu diingat, bahwa paradigma pendidikan yang harus diadopsi untuk abad XXI bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan merupakan suatu jalan yang harus ditempuh dari sistem pendidikan nasional Indonesia dalam membentuk sebuah komunitas dan negara yang beradab serta berbudaya, sebagai sebuah pilar jati diri bangsa yang perlu dipertahankan dan dipromosikan dalam menghadapi gelombang perubahan dan dinamika lingkungan global yang sedemikian rupa.

6 | Refleksi

Tidak ada hambatan yang berarti kecuali keterlambatan pelaksanaan kegiatan; seperti standar lainnya dimulai pada bulan Maret namun untuk kegiatan kelompok ini baru dimulai pada bulan Mei. Satu lagi ada anggota Tim yang tidak pernah bisa dihubungi sehingga non aktif dari awal sampai akhir kegiatan.

Teleconference baik dilaksanakan untuk kegiatan pengembangan standar pada tahun-tahun yang akan datang oleh BSNP, sehingga standar dapat tersosialisasi menjangkau seluruh wilayah RI dengan biaya yang relatif murah.



PENYUSUNAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM VOKASI

Badan Standar Nasional Pendidikan



Tim ahli standar sarana dan prasarana pendidikan vokasi

BAB 3 PENYUSUNAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM VOKASI

1 | Pendahuluan

Pendidikan nasional Indonesia dilaksanakan dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945. Secara operasional pelaksanaan pendidikan merupakan realisasi dari UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan nasional menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan nasional. Melalui pendidikan nasional setiap warga negara Indonesia diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi, baik dalam pergaulan nasional maupun internasional. Dalam hubungan ini, segala upaya perlu dilakukan agar tujuan pelaksanaan pendidikan nasional, di antaranya melalui jalur pendidikan formal, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dapat diwujudkan.

Pendidikan tinggi di Indonesia diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. Perguruan tinggi tersebut dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa agar memiliki keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma empat setara dengan program sarjana. Dengan pengertian lain, pendidikan vokasi pada perguruan tinggi lebih menekankan kepada aspek psikomotorik (*skills*) daripada aspek kognitif.

Perbedaan tersebut di atas memiliki implikasi dalam proses pembelajaran dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan. Pendidikan vokasi diselenggarakan dalam empat jenjang, yaitu jenjang diploma satu, diploma dua, diploma tiga, dan diploma empat. Hal yang membedakan masing-masing jenjang adalah kompetensi lulusan dan masa studi. Kompetensi utama yang dikembangkan melalui program pendidikan diploma satu adalah kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan dan atau memecahkan masalah yang bersifat rutin di bawah program pembimbingan. Kompetensi utama yang dikembangkan melalui program pendidikan diploma dua adalah kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan dan atau memecahkan masalah yang bersifat rutin secara mandiri dan bertanggung jawab. Program pendidikan diploma tiga mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, yang belum akrab dengan sifat-sifat ataupun konstekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan dan tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya. Program pendidikan diploma empat memiliki kompetensi utama dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan keahlian terapan tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan,

pengetahuan, dan teknologi di bidang keahliannya.

Perguruan tinggi memiliki peranan yang sangat penting dalam mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks), menjaga dan melestarikan budaya, menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan keterampilan serta meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perguruan tinggi sebagai lembaga melaksanakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengelola Ipteks. Dalam melaksanakan Tridarmanya, perguruan tinggi dilengkapi dengan komponen-komponen pendukung pendidikan yang sesuai dengan tuntutan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sarana dan prasarana adalah komponen pendukung utama selain kurikulum, sumber daya manusia, pengelolaan, dan pembiayaan.

Berdasarkan data dari Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) DIKTI, jumlah pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi terdiri dari 268 universitas, 25 institut, 404 sekolah tinggi, 1.039 akademi, dan 166 politeknik. Jumlah perguruan tinggi dan program studi tersebut diperkirakan akan meningkat sesuai dengan peningkatan animo masyarakat untuk masuk perguruan tinggi. Data ini menunjukkan program diploma yang ada lebih banyak dikelola oleh lembaga pendidikan tinggi swasta dibandingkan lembaga pendidikan tinggi negeri. Sementara itu, kualitas perguruan tinggi tersebut sangat beragam baik dari sisi penyelenggaraan, proses, sarana dan prasarana, maupun lulusannya. Keragaman kondisi sarana dan prasarana Perguruan Tinggi dapat dilihat mulai dari sarana dan prasarana yang sangat layak sampai pada yang sangat tidak layak. Misalnya, ada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di Rumah Toko (Ruko), di rumah, tidak memiliki laboratorium, tidak memiliki ruang terbuka, dan lain-lain. Kondisi ini sudah barang tentu akan merugikan peserta didik karena tidak menerima layanan

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Rendahnya mutu pendidikan tersebut di atas disebabkan antara lain sarana dan prasarana yang belum memadai. Kondisi ini terjadi karena belum adanya kriteria minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang menjadi acuan dari setiap perguruan tinggi dalam penyelenggaraan program pendidikan. Atas dasar kenyataan itu, perlu disusun standar sarana dan prasarana perguruan tinggi di Indonesia, agar keberadaan sarana dan prasarana mampu mendukung proses pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi merupakan salah satu dari delapan standar pendidikan yang harus disiapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) berdasarkan amanat yang dituangkan dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Standar sarana dan prasarana ini disusun untuk lingkup pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Standar sarana dan prasarana ini mencakup:

1. kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib tersedia untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, dan
2. kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib tersedia untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

2 | Landasan Penyusunan Standar

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

3 | Tujuan dan Fungsi Standar

Tujuan standar sarana dan prasarana adalah untuk:

1. menentukan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana minimal yang harus dimiliki perguruan tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. mendukung tercapainya mutu pendidikan.

Fungsi standar sarana dan prasarana adalah sebagai acuan dasar yang bersifat nasional bagi semua pihak yang berkepentingan dalam:

1. perencanaan dan perancangan sarana dan prasarana,
2. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana,
3. pengawasan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana.

4 | Hasil yang Dicapai

Kegiatan ini menghasilkan naskah akademik dan standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi program vokasi. Secara garis besar isi standar tersebut mencakup lahan, bangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, ruang manajemen, ruang akademik umum, ruang akademik khusus, dan ruang penunjang.

Ruang manajemen yang diatur dalam standar ini meliputi ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang rapat, ruang manajemen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan ruang penjaminan mutu. Ruang akademik umum meliputi ruang kuliah, ruang perpustakaan, ruang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan ruang dosen.

Untuk ruang akademik khusus mengingat banyaknya program studi pendidikan vokasi, maka diklasifikasikan menjadi delapan rumpun keilmuan, yaitu ruang akademik khusus bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang MIPA dan geografi, bidang teknik, bidang computer, bidang sosial, bidang humaniora, dan bidang seni dan desain. Sedangkan ruang penunjang meliputi tempat beribadah, ruang konseling, ruang kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, jamban, gudang, kantin, dan tempat parkir.

5 | Tim Ahli

Peserta tim penyusunan standar sarana dan prasarana pendidikan vokasi pendidikan tinggi berjumlah 20 (dua puluh) orang yang terdiri atas unsur BSNP (6 orang) dan tim ahli (14 orang).

Anggota BSNP

No	Nama	Instansi	Asal
1	Prof. Dr. Edy Tri Baskoro (Koordinator)	BSNP	Bandung
2	Prof. Dr. M. Aman Wirakartakusumah	BSNP	Bogor
3	Dr. T Ramli Zakaria	BSNP	Jakarta
4	Prof. Dr. Zaki Baridwan	BSNP	Yogyakarta
5	Pdt. Weinata Sairin, M.Th	BSNP	Jakarta
6	Prof. Dr. Jamaris Jamna	BSNP	Padang

Tim Ahli

No	Nama Tim Ahli	Instansi/Bidang Keahlian	Keterangan
1.	Bambang Suryadi, Ph.D	UIN Jakarta, Psikologi	Ketua
2.	Dr. Murdiyanto, M.Pd,MM	UNY Ekonomi	Wakil Ketua
3.	Paramita Atmodiwirjo M. Arch, Ph.D	UI, Arsitek	Sekretaris
4.	Ir. Eko Purwono MS.Arch.S	ITB, Arsitek	Anggota
5.	Ari Moesriami Barmawi, Ph.D	STT Telkom Bdg	Anggota
6.	Dr. Danny Meirawan	UPI, Teknik	Anggota
7.	Dr. Denny Zulkaidi, M.UP	ITB, Planologi	Anggota
8.	Prof. Dr. Ir. Johnny Wahyuadi	Poltek UI	Anggota
9.	Ahmad Firdaus Jamaah, ST	Polines Semarang, Teknik Elektrik	Anggota
10.	Dr. Kokok Haksono	Polman Bandung	Anggota
11.	Dr. Rahmat Timbang Tricahyono	Poltek Bandung, Elektronika	Anggota
12.	Dr. Sri Palupi, M.Pd	UNY, Tata Boga	Anggota
13.	Drg. Rosita Gusfourini, MM	Depkes Pusdiknaker PPSDM Kesehatan Jakarta	Anggota
14.	Dr. H. Asmuji,MM	Politeknik Negeri Jember	Anggota

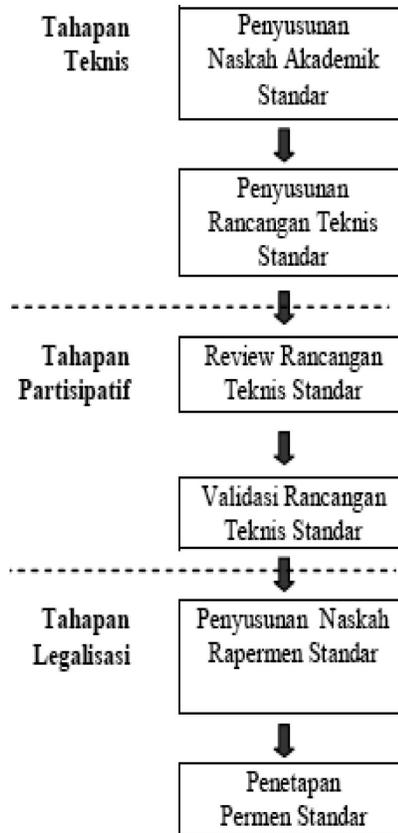
6 | Metode Penyusunan Standar

Proses penyusunan standar sarana dan prasarana pendidikan vokasi pada perguruan tinggi mencakup tahapan teknis, partisipatif dan legal. Pada tahapan teknis, proses ini menghasilkan naskah akademik dan rancangan teknis standar. Pada tahap partisipatif, penyusunan rancangan standar ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang mewakili para pengguna dan pemerintah.

Pada tahap ini, rancangan teknis standar dikaji secara terbatas melalui proses *review* oleh praktisi, pengguna, dan asosiasi profesi, dan secara terbuka melalui proses validasi dari pemangku kepentingan lainnya. Tahap terakhir adalah tahap legalisasi. Setelah disempurnakan berdasarkan masukan dari proses *review* dan validasi, rancangan teknis standar tersebut dikaji dari aspek hukumnya (oleh Biro Hukum Kementerian Pendidikan Nasional). Setelah melalui perbaikan dalam aspek hukumnya, naskah teknis standar tersebut menjadi naskah rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, dan diajukan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri. Secara singkat proses tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut (Gambar 1.1).

Penyusunan standar sarana dan prasarana pendidikan vokasi pada perguruan tinggi dilakukan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses untuk pendidikan vokasi pada perguruan tinggi. Standar sarana dan prasarana minimal juga mempertimbangkan perubahan paradigma pendidikan tinggi – terutama pendidikan vokasi pada perguruan tinggi-, dan pengelolaan badan hukum pendidikan tinggi di Indonesia.

Selain itu, Untuk mencapai kompetensi minimal lulusan setiap program studi, maka standar kompetensi minimal dari Badan Akreditasi Nasional (BAN), perguruan tinggi dan asosiasi profesi terkait juga menjadi pertimbangan untuk menentukan sarana dan prasarana

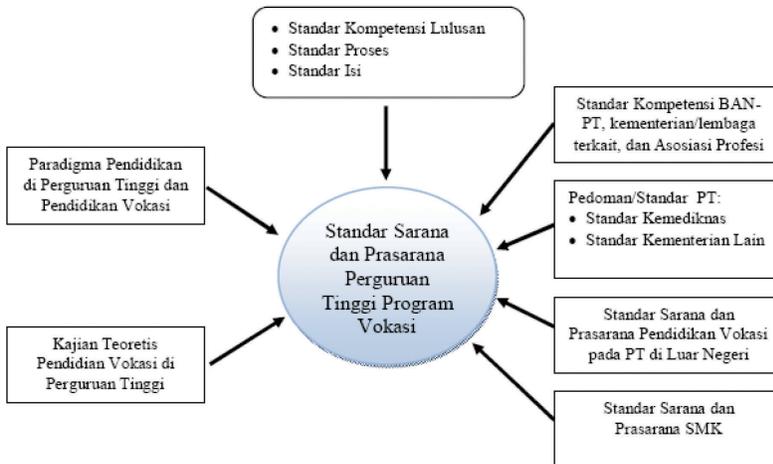


Gambar 1.1
Proses Penyusunan Standar

minimum yang harus disediakan. Selain mempertimbangkan standar dan ketentuan penyediaan sarana dan prasarana minimal yang telah ada di Indonesia (yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi), sumber literatur mengenai pedoman/standar sarana dan prasarana pendidikan vokasi padaperguruan tinggi di negara lain juga dikaji untuk memperoleh gambaran standar yang berlaku di negara maju.

Kajian teoretis akan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan vokasi pada perguruan tinggi dilakukan dengan memperhatikan aspek psikologis perkembangan kejiwaan peserta didik dan proses kegiatan pembelajaran pada umumnya, serta keahlian pada disiplin ilmu masing-masing pada khususnya. Pedoman sarana dan prasarana pendidikan yang ada, seperti yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi), kementerian lain yang terkait, dan asosiasi profesi, menjadi bahan masukan untuk memberikan arahan tentang cakupan komponen standar secara wajar beserta dengan spesifikasinya.

Dalam menyusun standar sarana dan prasarana yang bersifat umum, Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Program Sarjana dan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk SMK/MAK yang sudah disusun terlebih dahulu dijadikan acuan. Pendekatan dalam penyusunan standar sebagaimana diuraikan di atas dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 1.2.
Pendekatan Penyusunan Standar Pendidikan Vokasi pada Perguruan Tinggi

7 Tahapan Penyusunan Standar

Kegiatan penyusunan standar sarana dan prasarana pendidikan vokasi pendidikan tinggi dilaksanakan di Jakarta, kecuali tahapan kegiatan tertentu dilaksanakan di daerah. Kegiatan dimulai pada bulan Mei 2010 dan berakhir pada bulan November 2010, dengan sebelas langkah kegiatan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Waktu	Tempat	Peserta
1	Penyusunan Desain	22-24 Mei (Sabtu-Senin)	Jakarta	20 orang
2	Kajian Bahan Dasar	4-6 Juni (Jumat-Ahad)	Jakarta	20 orang
3	Penyusunan Draf Standar	3-5 Juli (Sabtu-Senin)	Jakarta	20 orang
4	Reviu dan Perbaiki Draf Standar Undangan (DKI : 9, Dalam Jawa : 3 Luar Jawa : 2)	16-18 Juli (Jumat-Ahad)	Jakarta	34 orang
5	Validasi Draf Standar 4 Provinsi (Dalam Jawa 2 dan Luar Jawa 2).	3-5 Agustus (Selasa-Kamis)	Sumatera Barat, Jawa Tengah, DKI, dan Sulawesi Selatan	40 org/ Prov
6	Analisis Hasil Validasi Draf Standar	27-29 Agustus (Jumat-Ahad)	Jakarta	20 orang
	Presentasi di BSNP	31 Agustus 2010 Selasa	Jakarta	3 orang
7	Perbaiki Draf Standar Hasil Validasi	2-4 Oktober (Sabtu-Senin)	Jakarta	20 orang
8	Pembahasan Draf Standar dengan Unit Utama Undangan (DKI : 9, Dalam Jawa : 3 Luar Jawa : 2)	9-11 Okt (Sabtu-Senin)	Jakarta	34 orang
9	Finalisasi Standar untuk Uji Publik	16-18 Oktober (Sabtu-Senin)	Jakarta	20 orang
10	Uji Publik Draf Standar 4 Provinsi (2 dalam Jawa: dan 2 luar Jawa)	1-5 Nov (Senin-Jumat)	Jawa Timur, DIY, Sumatera Utara, dan Bali	40 org/ prov
11	Finalisasi Standar	12-14 Nov (Jumat-Ahad)	Jakarta	20 orang

8 | Hambatan dan Solusi

Dalam penyusunan standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi program vokasi ini tidak lepas dari kendala dan hambatan. Diantaranya adalah kenyataan di lapangan yang menunjukkan banyaknya variasi bidang keahlian dalam pendidikan vokasi dibandingkan dengan jumlah tim ahli yang terlibat dalam penyusunan standar. Dengan pengertian lain, keanggotaan tim ahli tidak sebanding dengan jumlah program studi yang ada. Permasalahan ini diatasi dengan mengundang perwakilan dari masing-masing program studi dan keahlian yang diperlukan pada saat pelaksanaan validasi, pembahasan dengan unit utama, dan uji publik.

Kendala lain adalah waktu pelaksanaan kegiatan terlambat tiga bulan dibandingkan dengan kegiatan standar yang lain. Jika penyusunan standar yang lain dimulai pada bulan Februari 2010, kegiatan penyusunan standar ini baru dimulai pada bulan Mei. Hal ini terkait dengan proses persetujuan anggaran oleh DPR-RI. Namun demikian, Alhamdulillah, seluruh tahapan kegiatan dapat diselesaikan pada pertengahan bulan November 2010. Hal ini tidak lepas dari komitmen, partisipasi, dan dedikasi para tim ahli yang terlibat dalam penyusunan standar ini.



PENYUSUNAN STANDAR DOSEN PENDIDIKAN VOKASI

Badan Standar Nasional Pendidikan



Tim ahli standar dosen pendidikan tinggi

BAB 4 PENYUSUNAN STANDAR DOSEN PENDIDIKAN VOKASI

1 | Pendahuluan

Kualitas manusia Indonesia dapat dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi yang didukung oleh tenaga pendidik yang berkualitas tinggi pula, dan memenuhi standar kualifikasi serta kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan yang dihadapi. Pada jenjang pendidikan tinggi, dosen memegang peran penting untuk mewujudkan visi pendidikan. Tugas pokok, fungsi, peran, dan tanggung jawab dosen adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang maju, cerdas, beradab, berkeadilan, dan makmur.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamamentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas Tri Dharma ini dilaksanakan secara terpadu dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi pendidikan nasional. Dalam hal menyebarluaskan ilmu pengetahuan, di dalamnya mencakup pengembangan sikap keilmuan, kreativitas, dan keterbukaan serta minat melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan delapan standar pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dosen termasuk salah satu tenaga pendidik profesional dan ilmuwan yang harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dituntut oleh PP No. 19 Tahun 2005 tersebut. Untuk itu perlu ditetapkan standar kualifikasi dan kompetensi dosen.

Penyusunan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pendidikan vokasi dimaksudkan untuk memberi kepastian agar dosen vokasi benar-benar mampu menjalankan misi pendidikan di perguruan tinggi dan memenuhi tuntutan kualitas tenaga pendidik yang profesional.

Kondisi pendidikan vokasi saat ini masih memerlukan perhatian karena antara lain: 1) masih adanya persepsi masyarakat bahwa pendidikan vokasi bukan merupakan pilihan utama; 2) masih banyak dosen pendidikan vokasi belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi; 3) masih banyak dosen yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahlian; 4) masih banyak dosen pendidikan vokasi yang belum mendapatkan pelatihan, dan/atau pengalaman yang dibutuhkan sebagai dosen vokasi; 5) penghargaan pemerintah terhadap dosen pendidikan vokasi masih kurang antara lain: adanya pembatasan jenjang kepangkatan maksimal IVc; 6) saat ini tidak ada lembaga penyelenggara yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan ketrampilan dan pengalaman dosen vokasi seperti *Polytechnic Education Development Center* (PEDC) yang pernah ada pada awal pendirian politeknik pada tahun 1980-1995. Berdasarkan kondisi ini, maka perlu ditetapkan standar kualifikasi dan kompetensi dosen vokasi.

2 | Tujuan dan Manfaat Standar

Pendidikan vokasi bertujuan menyediakan tenaga terampil untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang mampu memenuhi tuntutan dunia usaha dan industri Indonesia.

Dosen pendidikan vokasi yang profesional diharapkan mampu meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan tinggi di bidangnya masing-masing, sehingga menjadi insan profesional yang senantiasa mengembangkan diri secara berkelanjutan, menjunjung tinggi tata nilai luhur, mau dan mampu mengabdikan dirinya sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan kemanusiaan.

Pendidikan vokasi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi serta pemecahan berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, membantu mengentaskan kemiskinan, serta mampu menciptakan wirausaha baru dalam mengurangi tingkat pengangguran.

3 | Landasan Penyusunan Standar

Landasan penyusunan standar pendidikan vokasi adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

4 Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari penyusunan standar pendidikan vokasi adalah standar yang akan dihasilkan merupakan acuan nasional bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan mutu dosen pendidikan vokasi pada perguruan tinggi khususnya.

5 Tim ahli

a. Anggota BSNP

No.	Nama	Instansi	Asal
1.	Prof. Dr. Djaali	UNJ Jakarta	Jakarta
2.	Prof. Djemari Mardapi, Ph.D.	UNY Yogyakarta	Yogyakarta
3.	Prof. Dr. Furqon	UPI Bandung	Bandung
4.	Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd. Kons.	UNNES Semarang	Semarang
5.	Prof. Dr. Rer. Nat. Gunawan Indrayanto	UNAIR	Surabaya
6.	Prof. Dr. Richardus Eko Indrajit	Perbanas	Jakarta

b. Tim Ahli Penyusunan Standar Dosen Pendidikan Vokasi

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	INSTANSI ASAL	Bidang Keahlian	Nomor Handphone
1.	Prof. Dr. M. Nasikin	Ketua	UI Jakarta	Teknik kimia, new product design	0812 9001 645
2.	Prof. Dr. Baso Intang Sappaile, M.Pd.	Sekretaris	Politeknik Pertanian Negeri Pangkep	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	0852 1311 8825
3.	Prof. Dr. Sukardi	Anggota	Universitas Negeri Yogyakarta	Pend teknologi & kejuruan/ research & evaluation	0816 4220 230

4.	Prof. Dr. M.Zairin Jr	Anggota	Institut Pertanian Bogor	Perikanan, pertanian, program diploma	0812 802 7624
5.	Dr. Ir. Jayadi, MP	Anggota	Politani Pangkep	Budidaya perikanan (pembenihan)	0812 4144 0440
6.	Dr. Rendy Munadi, Ir., MT	Anggota	Institut Teknologi Telkom Bandung	Teknik elektro, penelitian & publikasi.	0813 2244 5320
7.	Dr. Ir. Rusmini	Anggota	Poltekes Kem. Kes. Jakarta II	Teknik elektromedik, radiologi & manajemen pend	0812 9239 199
8.	Dr. Hj. Lucky Herawati, M.Sc.	Anggota	Politeknik Kesehatan Depkes Yogyakarta	Kesehatan masyarakat & PEP	0813 6457 7488
9.	Dr. Tuti Tarwiyah, M.Si	Anggota	Universitas Negeri Jakarta	Pendidikan, Musik/seni	0817 776 332
10.	Ir. Siswoyo, MSIE	Anggota	Politeknik Negeri Bandung	Teknik elektro, teknik industri	0812 211 8151
11.	Ir. Ahmad Rifandi, M.Sc.	Anggota	Politeknik Negeri Bandung	Teknik kimia, vocational education & training	0812 2378 618
12.	Drs. Ludfi Djajanto, MBA	Anggota	Politeknik Negeri Malang	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	0812 3587 271
13.	Ir. Syaukat Ali, M.Si	Anggota	Universitas Gaja Mada	Sipil transportasi - lingkungan	0811 283 453
14.	Dra. Budiarti, M.Pd.	Anggota	Universitas Negeri Jakarta	Pariwisata	0812 8695 240

6 | Kegiatan penyusunan standar

Kegiatan penyusunan standar pendidikan vokasi dilakukan 11 (sebelas) kali pertemuan dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

- 1) Temu awal
Tim telah merangkum beberapa definisi tentang pendidikan vokasi, menguraikan tentang jenis pendidikan vokasi, dan menjelaskan tentang dokumen yang akan disusun dan acuan yang dipakai oleh Tim.
- 2) Kajian bahan dasar
Tim pendidikan vokasi telah menetapkan: jumlah dan jenis peserta dalam pengumpulan data, nama-nama anggota adhoc yang akan mengumpulkan data, nama-nama provinsi tempat pengumpulan data, membuat instrumen pengumpulan data lapangan, dan telah menetapkan nama-nama nara sumber untuk pertemuan ke-4 (pengolahan data).
- 3) Penyusunan Draf Standar
Dalam penyusunan draf standar, tim memperbaiki draf Naskah Akademik, khususnya Latar Belakang dan Landasan Konseptual, disamping itu juga memperbaiki draf standar, khususnya kompetensi profesional.
- 4) Reviu dan Perbaikan Draf Standar
Dalam mereviu, tim memperbaiki draf naskah akademik, draf standar kompetensi, membuat powerpoint draf naskah akademik dan draf standar kompetensi untuk persiapan pertemuan dengan para undangan, serta masukan dari para undangan.
- 5) Validasi Draf Standar
Tim melakukan validasi draf standar di Provinsi pada tabel berikut.

No.	Provinsi	Nara Sumber	Hari "H"
1.	Jawa Barat	1. Ir. Syaikat Ali, M.Si	Kamis 27 Mei 2010
		2. Prof. Sukardi, M.Sc, Ph.D	
		3. Drs. Ludfi Djajanto MBA	
2.	Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Dra. Budiarti, M.Pd	Selasa 1 Juni 2010
		2. Dr. Ir. Rusmini	
		3. Ir. Ahmad Rifandi, M.Sc	
3.	Sumatera Utara • •	1. Dr. Ir. Jayadi, MP	Sabtu 29 Mei 2010
		2. Prof. Dr. Baso Intang Sappaile, M.Pd	
		3. Siswoyo Ir. Drs.MSIE	
4.	Sulawesi Selatan	1. Dr. Hj. Lucky Herawati, MSc	Kamis 27 Mei 2010
		2. Dr. Tuti Tarwiyah Adi S., M.Si	
		3. Prof. Dr. Muhammad Zairin Jr.	

- 6) Analisis Hasil Validasi Draf Standar
- Setiap tim yang bertugas ke tiap provinsi tempat validasi, mendiskusikan hasil validasi di dalam timnya. Masing-masing hasil diskusi tim, mempresentasikan di depan anggota BSNP dan Tim Adhoc. Hasil presentasi keempat tim kecil dirangkum dan didiskusikan dalam pleno, serta menganalisis hasil pleno. Draf standar kompetensi dan naskah akademik dilengkapi atas dasar hasil pleno
- 7) Perbaikan Draf Standar Hasil Validasi
- Perbaikan draf standar dosen pendidikan vokasi didasarkan atas masukan hasil validasi, yaitu: 1) memasukkan klausul UU Nomor 14 Pasal 46 Ayat 3 dan 4, dan 2) memasukkan klausul keahlian vokasi yang diserahkan kepada PT masing-masing yang terakreditasi (yang terakreditasi adalah program studi), dan 3) dalam hal linearitas, tidak ada perubahan (dalam satu rumpun).
- 8) Pembahasan Draf Standar dengan Unit Utama
- Pertemuan anggota tim pengembang standar, anggota BSNP dengan para undangan dengan acara yang telah dilaksanakan

adalah: (1) pembukaan oleh Koordinator Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilanjutkan pengenalan tim pengembang standar dengan para undangan, (2) ketua tim pengembang standar menginformasikan nama-nama, kualifikasi tim pengembang standar beserta nama lembaga yang bersangkutan, selanjutnya menugaskan bapak Ludfi untuk mempresentasikan hasil kerja tim pengembang standar, (3) melakukan presentasi draf naskah akademik dan standar dosen vokasi (09.30 – 10.00) dan tanya jawab.

Masukan dari para “Undangan Tanggal 7 Agustus 2010” yaitu: (1) Prof. Retno (UGM), (a) perlu ada pembatas yang jelas antara program vokasi dengan program akademik, (b) pada kompetensi dinyatakan Magister dan menguasai *keonsep teoritis*, sebaiknya menguasai teori dan praktik, (c) pada kompetensi kepribadian, mengubah kata bersikap menjadi berperilaku, (2) Rektor Unimed, (a) perlu dipertimbangkan apakah perlu distukan atau disederhanakan poin 1.3; 1.4; dan 1.11., (b) dalam pedagogik ada 5 (lima) yang mendasar, yaitu: *karakteristik, model pembelajaran, perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi*, (c) kompetensi sosial, sebaiknya lebih eksplisit; (3) Prof. Dr. Ansjar dosen vokasi bukan hanya berpengalaman 6 bulan, tetapi berpengalaman vokasi di industri; (4) Prof. Dr. Nyoman Dantes, (a) kualifikasi Magister perlu dikaitkan dengan vokasi tertentu, (b) kompetensi 1.3 tidak hanya pada karakteristik mahasiswa tetapi juga pada karakteristik bahan ajar, (c) kompetensi profesional masih perlu lebih tajam, (d) poin 4.1 sangat berat jika diakui secara nasional atau internasional tetapi dipresentasikan secara nasional atau internasional; (5) Prof. Djonny (politeknik Jakarta) draf standar ini sangat berat, memungkinkan tidak ada dosen vokasi yang memenuhi; (6) Prof. Santos (Polban), (a) sebelum Magister perlu magang 1 (satu) tahun di industri, (b) menguasai aplikasi base.

9) Finalisasi Standar untuk Uji Publik

Finalisasi draf naskah akademik dan draf kualifikasi akademik dosen pendidikan vokasi yang didasarkan atas masukan hasil pertemuan: tim pengembang standar dengan unit utama pada tanggal, 7 Agustus 2010 yang dituliskan dalam bentuk matriks. Perbaikan pada naskah akademik khususnya terletak pada landasan empiris dengan melengkapi kalimat “Penerapan standar kualifikasi dosen pendidikan vokasi yang mengharuskan dosen pendidikan vokasi berpendidikan minimal magister dan memiliki keahlian vokasi yang relevan akan berimplikasi pada terjadinya kesenjangan pemenuhan kualifikasi tersebut. Untuk itu, pemenuhan standar dosen pendidikan vokasi dapat dilengkapi pada saat sertifikasi dosen, sedangkan untuk penerimaan dosen, perguruan tinggi dapat menetapkan persyaratan minimal di bawah standar namun harus berkualifikasi magister sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk pemenuhan standar, khususnya pemenuhan keahlian vokasi yang relevan dapat dilakukan melalui RPL (*Recognition of Prior Learning*).

10) Uji Publik Draft Standar

Nama-nama tim pengembang standar dosen pendidikan vokasi yang bertugas dalam melakukan uji publik adalah sebagai berikut.

No.	Provinsi	Nara Sumber	Hari 'H'
1.	Jawa Timur	1. Dr. Hj. Lucky Herawati, MSc	Rabu 29 Sep 2010
		2. Prof. Dr. M. Nasikin	
		3. Prof. Dr. Muhammad Zairin Jr.	
		4. Prof. Djemari Mardapi, Ph.D.	
2.	Jawa Tengah	1. Dr. Jayadi	Kamis 30 Sep 2010
		2. Siswoyo Ir. Drs.MBIE	
		3. Dra. Budiarti, M.Pd	
		4. Prof. Dr. Rer. Nat. Gunawan Indrayanto	

No.	Provinsi	Nara Sumber	Hari 'H'
3.	Kalimantan Timur	1. Dr. Rendy Munadi, Ir. MT	Kamis 30 Sep 2010
		2. Ir. Ahmad Rifandi, M.Sc.	
		3. Prof. Dr. Baso Intang Sappaile, M.Pd.	
		4. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., M. Kons	
4.	Sulawesi Utara	1. Drs. Ludfi Djajanto MBA	Rabu 6 Okt 2010
		2. Prof. Sukardi, M.Sc, Ph.D	
		3. Dr. Tuti Tarwiyah Adi S., M.Si	
		4. Prof. Dr. Djaali	

11) Finalisasi Standar

Finalisasi standar didasarkan atas hasil uji publik yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Utara. Perbaikan pada standar, pada umumnya terletak pada kualifikasi akademik pada poin-4, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian, baik perubahan konsep maupun pada perubahan istilah. Pertemuan Tim Standar Dosen Pendidikan Vokasi dilakukan selama tiga hari, yaitu pada tanggal, 9 – 11 Oktober 2010.

7 Hasil Pengembangan Standar Dosen Pendidikan Vokasi

Dalam Pengembangan Standar Dosen Pendidikan Vokasi diperoleh 2 (dua) hasil, yaitu a. Draf Naskah Akademik dan b. Draf Standar Dosen Pendidikan Vokasi. Kedua draf dikemukakan berikut ini.

a. Draf Naskah Akademik

Draf Naskah Akademik terdiri dari beberapa bagian, yaitu: latar belakang, landasan penyusunan dan pengembangan standar dosen vokasi (landasan filosofis, landasan yuridis, landasan konseptual,

landasan empiris), tugas pokok dan fungsi dosen vokasi, dan daftar pustaka.

1) Latar Belakang

Salah satu penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta tersusunnya Rencana Strategis Kemendiknas tahun 2010-2014 yang antara lain memuat visi, dan misi Pendidikan Nasional. Visi Pendidikan Nasional adalah menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Misi Pendidikan Nasional adalah: 1) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, 2) meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan, 3) meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan, 4) meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, dan 5) meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Insan Indonesia yang dimaksud dalam visi pendidikan nasional adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

Kualitas manusia Indonesia seperti itu dapat dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi yang didukung oleh tenaga pendidik yang berkualitas tinggi pula, dan memenuhi standar kualifikasi serta kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan yang dihadapi.

Pada jenjang pendidikan tinggi, dosen memegang peran penting untuk mewujudkan visi pendidikan di atas. Tugas pokok, fungsi, peran, dan tanggung jawab dosen adalah mencerdaskan kehidupanbangsadanmeningkatkan kualitas manusia Indonesia yang maju, cerdas, beradab, berkeadilan, dan makmur.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I ayat (2), disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas Tri Dharma ini dilaksanakan secara terpadu dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi pendidikan nasional. Dalam hal menyebarkan ilmu pengetahuan, di dalamnya mencakup pengembangan sikap keilmuan, kreativitas, dan keterbukaan serta minat melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan delapan standar pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dosen termasuk salah satu tenaga pendidik profesional dan ilmuwan yang harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dituntut oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tersebut. Untuk itu perlu ditetapkan standar kualifikasi dan kompetensi dosen.

Penyusunan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen vokasi dimaksudkan untuk memberi kepastian agar dosen vokasi benar-benar mampu menjalankan misi pendidikan di perguruan tinggi dan memenuhi tuntutan kualitas tenaga pendidik yang profesional.

Dosen vokasi yang profesional diharapkan mampu meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan tinggi di bidangnya masing-masing, sehingga menjadi insan profesional yang senantiasa mengembangkan diri secara berkelanjutan, menjunjung tinggi tata nilai luhur, mau dan mampu mengabdikan dirinya sehingga

bermanfaat bagi masyarakat dan kemanusiaan.

Kondisi pendidikan vokasi saat ini masih memerlukan perhatian karena antara lain: 1) masih adanya persepsi masyarakat bahwa pendidikan vokasi bukan merupakan pilihan utama; 2) masih banyak dosen pendidikan vokasi belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi; 3) masih banyak dosen yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahlian; 4) masih banyak dosen pendidikan vokasi yang belum mendapatkan pelatihan, dan/atau pengalaman yang dibutuhkan sebagai dosen vokasi; 5) penghargaan pemerintah terhadap dosen pendidikan vokasi masih kurang antara lain: adanya pembatasan jenjang kepangkatan maksimal IVc; 6) saat ini tidak ada lembaga penyelenggara yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan ketrampilan dan pengalaman dosen vokasi seperti *Polytechnic Education Development Center (PEDC)* yang pernah ada pada awal pendirian politeknik pada tahun 1980-1995.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan standar kualifikasi dan kompetensi dosen vokasi. Keberadaan dosen pendidikan tinggi vokasi yang memenuhi standar diharapkan mampu memperbaiki kualitas pendidikan tinggi vokasi.

Pendidikan vokasi bertujuan menyediakan tenaga terampil untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang mampu memenuhi tuntutan dunia usaha dan industri Indonesia. Pendidikan vokasi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi serta pemecahan berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, membantu mengentaskan kemiskinan, serta mampu menciptakan wirausaha baru dalam mengurangi tingkat pengangguran.

2) Landasan Penyusunan dan Pengembangan Standar Dosen Pendidikan Vokasi

Standar dosen pendidikan vokasi disusun dan dikembangkan dengan beberapa landasan, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, landasan konseptual, dan landasan empiris.

a) Landasan filosofis

Dosen adalah pengawal dan pengembang peradaban, agen perubahan, sumber kekuatan moral, profesional dan intelektual. Dosen sebagai pendidik profesional merupakan suatu profesi.¹ Dalam pendidikan vokasi, dosen merupakan perekonstruksi pengalaman belajar, pebelajar sepanjang hayat, pencari inovasi, pembangun kemauan dan kreativitas mahasiswa. Dosen vokasi diupayakan untuk selalu terhubung dengan struktur sosial, masyarakat dan lembaganya yang selalu berubah. Oleh karena itu, dosen vokasi harus berperan sebagai ujung tombak pengetahuan bagi mahasiswanya dalam persiapan dan adaptasi.

Dengan kemampuannya, dosen vokasi menjadikan mahasiswa sebagai masyarakat produktif, bernilai ekonomis, dan berpartisipasi dalam masalah aktual dan sosial di lingkungannya. Dosen vokasi memberikan solusi alternatif terhadap masalah pembelajaran dalam bentuk inovasi dan kreasi di bidang keahlian masing-masing. Dalam melaksanakan tugas utamanya, dosen vokasi mengemban amanah untuk dapat menjadi model dalam praktek vokasi, memotivasi, meningkatkan kerjasama dan interpersonal dengan sesama, agar mahasiswa mampu mengaitkan

¹ Blackington (1968) mengartikan profesi sebagai: *"a vocation which is organized, incompletely, no doubt, but genuinely for the performance of function"*. McCully (1999:130) mengemukakan profesi sebagai *"a vocation in which professed knowledge of some department of learning or science is used in its application upon it"* Edgard H. Schein dan Diana W Kammers (1998) mengemukakan bahwa *"The profession is a set of occupation that have developed a very special set of norms deRepublik Indonesiaving from their special role in society"*.

antara belajar dengan kehidupan, dan melengkapi interaksi aktif dengan lingkungannya melalui berbagai sumber.

b) Landasan Yuridis

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, ayat (2), menyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 45 dan Pasal 46 menyatakan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 menjelaskan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian yang diampunya. Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana, dan lulusan program doktor untuk program magister. Seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen. Pendidikan vokasi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan yaitu merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana, sedangkan sebagai penyelenggara pendidikan vokasi dapat diselenggarakan di perguruan tinggi berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.

- c) Landasan Konseptual
Perguruan tinggi merupakan pusat keilmuan dan pusat budaya yang mencerminkan nilai-nilai luhur. Perguruan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi,

atau politeknik dapat menyelenggarakan program vokasi. Perguruan tinggi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hendaknya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Perguruan tinggi wajib menghasilkan lulusan yang berkualitas baik dan beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Perguruan tinggi di Indonesia harus didorong untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bersifat universal sehingga dapat bersaing dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi terkemuka di seluruh dunia.

Pendidikan vokasi lebih menekankan pada misi penyelenggaraan pendidikan yang mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan kedalam kinerja standar yang dibutuhkan di tempat kerja. Pelaksanaan misi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di pendidikan vokasi harus diarahkan pada penelitian yang berorientasi terapan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Penerapan ilmu hendaknya lebih ditekankan hanya sampai pada pembuatan *blueprint/prototype*, dan implementasinya diserahkan pada masyarakat.

Dosen sebagai bagian sivitas akademika perguruan tinggi bertanggung jawab atas pelaksanaan misi tersebut yaitu menjadi ilmuwan yang berbudaya, berkepribadian, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, serta memiliki berbagai kompetensi lainnya yang diperlukan. Dosen vokasi sebagai tenaga profesional dalam pekerjaannya menggunakan teknik dan prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual.

Dosen dalam melakukan tugasnya melaksanakan pembelajaran yang intensif dan komprehensif. Untuk itu, dosen harus mampu membuat keputusan, baik secara individu

maupun kelompok, memahami pembelajaran dan bertanggung jawabkan hasilnya kepada pemangku kepentingan. Selain itu, dosen juga dituntut berdedikasi tinggi dalam memberikan layanan, mampu bekerjasama dengan berbagai profesi serta menghormati kode etik. Dosen profesional bertugas melaksanakan pembelajaran yang mendidik melalui perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Selain itu juga melaksanakan bimbingan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tridharma perguruan tinggi yang menjadi tugas pokok dan fungsi dosen dilakukan saling terkait antara satu dharma dengan dharma yang lainnya dan membentuk satu kesatuan sesuai dengan fungsi perguruan tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk dapat mengemban amanah Tridharma perguruan tinggi maka seorang dosen selain harus memiliki kualifikasi akademik, juga harus menguasai berbagai kompetensi yang terdiri atas kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang ditekankan pada aplikasi pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan vokasi menekankan pada aplikasi pengetahuan dan keterampilan ke dalam kinerja standar yang dibutuhkan di tempat kerja.

d) Landasan Empiris

Pendidikan vokasi di Indonesia dimulai pada tahun 1972, saat Institut Teknologi Bandung bekerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum mendirikan *Lembaga Politeknik Pekerjaan Umum (LPPU)* sebagai jawaban atas tantangan kebutuhan tenaga teknik yang mampu menerjemahkan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam tugas-

tugas praktis yang diperlukan di lapangan. Pada tahun yang sama dibangun kerjasama antara Institut Teknologi Bandung dengan pemerintah Swiss untuk mendirikan pendidikan yang serupa yang diberi nama *Politeknik Mekanik Swiss*. Selain itu, di Solo juga didirikan *Akademi Teknik Mesin Indonesia (ATMI)*. Kemudian pada tahun 1979 pemerintah mendirikan lima politeknik negeri di lima perguruan tinggi, yaitu: Politeknik ITB di Bandung, Politeknik UI di Jakarta, Politeknik UNDIP di Semarang, Politeknik USU di Medan, Politeknik UNSRI di Palembang. Bersamaan dengan didirikannya lima politeknik tersebut dibentuk Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik (PEDC) di Bandung, sebagai tempat pelatihan bagi calon dosen politeknik se Indonesia.

Pada tahun 1985 Departemen Kesehatan Republik Indonesia mendirikan Pendidikan Ahli Madya Kesehatan di beberapa provinsi di Indonesia dan sejak tahun 2002 menjadi politeknik kesehatan sebanyak 33 di ibukota provinsi. Selanjutnya pemerintah Republik Indonesia mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di departemen teknis, seperti: pendidikan vokasi pariwisata, kelautan, perikanan, penyuluhan pertanian, perhubungan, pertanahan, asuransi, refraksionis. Dengan pinjaman dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, pemerintah Republik Indonesia mendirikan 20 politeknik negeri bidang rekayasa, tata niaga dan enam politeknik pertanian di seluruh Indonesia.

Pendidikan vokasi di Indonesia, atau dikenal dengan pendidikan program diploma, juga diselenggarakan di universitas, seperti di Fakultas Teknik UGM bernama Pendidikan Ahli Teknik (PAT), dan di Fakultas Ekonomi UGM bernama Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan (PAAP). Selanjutnya program diploma di masing-masing Fakultas

tersebut diarahkan untuk berdiri sendiri sebagai program diploma agar lebih fokus pada pendidikan vokasi. Sejak tahun 1998 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, telah mengizinkan beberapa politeknik yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Lulusan pendidikan vokasi dapat berperan sebagai berikut.

- (1) Menjembatani atau sebagai *supervisor* antara perencana dengan pelaksana di perusahaan.
- (2) Memanfaatkan hasil riset di pendidikan tinggi dan lembaga riset yang menghasilkan produk atau jasa yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
- (3) Menghasilkan para wirausaha yang mandiri, tangguh dan menciptakan peluang usaha baru yang produktif.

Berdasarkan peran tersebut di atas sudah seharusnya Indonesia mengembangkan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang, antara lain bidang kesehatan, kepariwisataan, teknik produksi, teknik industri, kimia, pertanian, kelautan, peternakan dsb. Idealnya komposisi angkatan kerja berbentuk struktur Piramid. Namun dalam kenyataannya berdasarkan data BPS (2009) menunjukkan perbandingan angkatan kerja lulusan sarjana, vokasi, dan menengah atas (15,3% : 11,3 % : 73,4 %). Tampak ada ketimpangan jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi harus lebih besar dibandingkan dengan lulusan sarjana.

Setelah kurang lebih 30 tahun perkembangannya, pendidikan vokasi di Indonesia masih banyak menghadapi kendala yang menyangkut mutu pendidikan, diantaranya adalah masalah kompetensi dan relevansi dosen. Politeknik di Indonesia sampai tahun 2010 telah berkembang menjadi sekitar 200 yang terdiri dari 27 politeknik negeri, 14 po-

liteknik daerah dan sisanya dikelola oleh pihak swasta. Adapun jumlah program studi diploma III sebanyak 230 program studi dan program studi diploma IV sebanyak 74 program studi. Sampai saat ini masih banyak permintaan izin untuk pembukaan program studi baru untuk program studi vokasi, baik di universitas maupun politeknik dari berbagai daerah di Indonesia.

Kondisi penyelenggaraan yang beragam pada semua institusi pendidikan vokasi telah menimbulkan perbedaan mutu lulusan. Perbedaan mutu lulusan pendidikan vokasi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut.

- (1) Dibubarkannya lembaga Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik pada tahun 1996 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Sejak itu calon dosen Politeknik tidak lagi mendapatkan pelatihan pedagogi dan pelatihan kompetensi keahlian vokasi.
- (2) Perkembangan teknologi yang cepat tidak dengan serta merta dapat diikuti oleh pendidikan vokasi menyangkut keterbatasan fasilitas perangkat penunjang pembelajaran yang memerlukan investasi yang besar.
- (3) Globalisasi dan perdagangan bebas telah menyebabkan perpindahan orang dan keterampilan secara bebas dari satu negara ke negara lainnya. Hal ini merupakan potensi yang dapat digali oleh negara yang banyak penduduknya, seperti Indonesia untuk mengirimkan tenaga terampil ke negara yang memerlukannya.
- (4) Meningkatnya ancaman persaingan dengan masuknya perguruan tinggi asing ke Indonesia, diperlukan kualitas pendidikan yang memadai dan selanjutnya

akan ditentukan oleh kualifikasi dan kompetensi dosen pendidikan vokasi.

Oleh karena itu diperlukan usaha pemerintah untuk mendorong peningkatan mutu dan perluasan akses pendidikan vokasi dengan cara mengembangkan tempat uji kompetensi pada institusi pendidikan vokasi yang bekerja sama dengan organisasi profesi atau industri/instansi terkait. Selain itu, diperlukan pendirian lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai tempat untuk peningkatan keterampilan dan kompetensi dosen vokasi. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus jenjang kepangkatan dosen vokasi yang selama ini hanya dibatasi sampai dengan golongan IVc untuk disetarakan dengan jenjang kepangkatan dosen akademik.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dibatasinya kualifikasi pendidikan diploma yang hanya sampai dengan jenjang Diploma-IV dan seolah-olah merupakan pendidikan tinggi tingkat bawah yang merupakan terminal pada jenjang Diploma-IV, sehingga pendidikan vokasi menjadi kurang menarik. Sementara dilain pihak muncul kebutuhan lulusan vokasi pada jenjang yang lebih tinggi seperti halnya kebutuhan dosen vokasi yang harus memiliki kualifikasi Magister yang berpengetahuan dan berketrampilan vokasi. Untuk itu sudah selayaknya pendidikan vokasi dapat ditingkatkan kualifikasinya pada jenjang yang lebih tinggi seperti Magister Sain Terapan dan Doktor Sain Terapan sehingga pendidikan vokasi bukan merupakan pendidikan terminal pada jenjang Diploma-IV. Bagi dosen yang telah memiliki pengalaman mengajar minimal 20 tahun dan/atau berusia minimal 55 tahun diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri secara mandiri dengan tetap mengacu pada standar dosen vokasi.

Sedang bagi dosen yang memiliki pengalaman mengajar kurang dari 20 tahun, diwajibkan untuk mengikuti standar minimal dosen vokasi.

Penerapan standar kualifikasi dosen vokasi yang mengharuskan dosen vokasi berpendidikan minimal magister dan memiliki keahlian vokasi yang relevan akan berimplikasi pada terjadinya kesenjangan pemenuhan kualifikasi tersebut. Untuk itu, pemenuhan standar dosen pendidikan vokasi dapat dilengkapi pada saat sertifikasi dosen, sedangkan untuk penerimaan dosen, perguruan tinggi dapat menetapkan persyaratan minimal di bawah standar namun harus berkualifikasi magister sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk pemenuhan standar, khususnya pemenuhan keahlian vokasi yang relevan dapat dilakukan melalui RPL (*Recognition of Prior Learning*).

Sampai saat ini penjabaran standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen vokasi belum tersedia. Untuk menjamin agar pendidikan vokasi di Indonesia mampu mewujudkan visi dan melaksanakan misi pendidikan nasional, serta berdasarkan landasan filosofis, yuridis, konseptual dan empiris, maka diperlukan penjabaran standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen vokasi.

3) Tugas Pokok dan Fungsi Dosen Vokasi

- a) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Tugas utama dosen dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran yang mendidik, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam lingkup tugas pembelajaran yang mendidik, dosen bertanggungjawab atas pendidikan moral dan etika, adab dan kesantunan, mengasah nurani, membentuk karakter dan kepribadian terpuji melalui keteladanan.

- c) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 3, UU No. 14 Tahun 2005) dan berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdikan kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (Pasal 5, UU No. 14 Tahun 2005).
- d) Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
- e) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

4) Daftar Pustaka

Ikenberry, O.S (1974). *American Education Foundations An Introduction*. Columbus Ohio: Published by Charles E. Publising Company.

Lorin W. Anderson and David R. Krathwohl (2001). *A Taxonomy for Learning Teaching and Assessing*. Wesley Longman. Boston: New York.

Miller, M.D. (1986). *Principles and Philosophy for Vocational Education*. Colombus Ohio: Pubshed by the National Center for

Research in Vocational Education VE.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

b. Draf Standar Dosen Pendidikan Vokasi

Draf standar dosen pendidikan vokasi terdiri dari: 1) kualifikasi akademik dosen pendidikan vokasi, dan 2) kompetensi dosen pendidikan vokasi.

1) Kualifikasi Akademik Dosen Pendidikan Vokasi

- a) Kualifikasi akademik dosen pendidikan vokasi minimal berpendidikan magister dari program studi terakreditasi dan memiliki keahlian vokasi yang relevan yang diperoleh dari pendidikan/pelatihan dan/atau pengalaman minimal 6 (enam) bulan yang disertai bukti tertulis dan diakui oleh masing-masing perguruan tinggi.
- b) Dosen yang memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada butir 1 mempunyai kewenangan mampu mata kuliah sesuai dengan keahliannya.
- c) Pengakuan atas relevansi latar belakang pendidikan dan keahlian vokasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi.

- d) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen. Keahlian dengan prestasi luar biasa ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi.

2) Kompetensi Dosen Pendidikan Vokasi

Kompetensi Dosen Pendidikan Vokasi terdiri dari 4 (empat) kompetensi, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik terdiri dari 11 (sebelas) sub-kompetensi, kompetensi kepribadian terdiri dari 6 (enam) sub-kompetensi, kompetensi sosial terdiri dari 4 (empat) sub-kompetensi, dan kompetensi profesional terdiri dari 12 (dua belas) sub-kompetensi. Lebih jelasnya ditunjukkan pada tabel berikut.

No.	Kompetensi	Sub-Kompetensi
1.	Kompetensi Pedagogik	1.1 Mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran
		1.2 Melaksanakan pembelajaran berdasarkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran
		1.3 Menerapkan berbagai pendekatan pembelajaran sesuai dengan ciri pendidikan vokasi
		1.4 Mengembangkan strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan bahan ajar
		1.5 Menerapkan berbagai metode pembelajaran yang inspiratif, komunikatif, interaktif, kreatif, inovatif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi
		1.6 Mengembangkan bahan ajar, lembar kerja, checklist yang menunjang pembelajaran di kelas, laboratorium, bengkel kerja, studio, klinik dan/atau sejenisnya
		1.7 Melaksanakan prosedur operasi standar (POS) kegiatan di kelas, laboratorium, bengkel kerja, studio, klinik dan/atau sejenisnya
		1.8 Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran
		1.9 Membimbing mahasiswa dengan pendekatan belajar tuntas (mastery learning)
		1.10 Menerapkan metode yang tepat dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian mahasiswa
		1.11 Melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pendidikan vokasi

No.	Kompetensi	Sub-Kompetensi	
2.	Kompetensi Kepribadian	2.1	Menjadi pribadi yang disiplin, teliti, tekun, jujur, gigih, adil, bertanggung jawab dan memiliki integritas tinggi yang patut diteladani
		2.2	Menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi pada pengembangan berkelanjutan
		2.3	Berperilaku sesuai dengan ajaran agama, norma, hukum, dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan budaya Indonesia
		2.4	Memiliki etos kerja dan dedikasi yang tinggi
		2.5	Memiliki loyalitas terhadap institusi
		2.6	Berperilaku sesuai dengan kode etik dosen dan/atau kode etik profesi
3.	Kompetensi Sosial	3.1	Bersikap inklusif dan menghargai keragaman agama, sosial dan budaya
		3.2	Berkomunikasi secara efektif dan santun dengan pemangku kepentingan
		3.3	Menjalin kerja sama dalam tim dan dengan berbagai pihak terkait
		3.4	Menghargai pendapat, saran dan kritik yang membangun
4.	Kompetensi Profesional	4.1	Melakukan penelitian terapan yang bermanfaat bagi masyarakat dan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni, dan mempresentasikan hasil penelitiannya di tingkat lokal dan/atau nasional
		4.2	Melakukan pengembangan dan pemutakhiran ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan
		4.3	Menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan bidang keahlian berdasarkan pendekatan inter disiplin atau multi disiplin
		4.4	Mengembangkan budaya kerja secara profesional dalam penyelesaian masalah
		4.5	Menguasai konsep teoretis dan keterampilan praktis di bidang keahliannya
		4.6	Menguasai minimal satu bahasa internasional
		4.7	Menerapkan prosedur operasi standar kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja
		4.8	Menerapkan standar nasional dan/atau standar internasional yang terkait
		4.9	Mengelola dan mensupervisi kelompok kerja
		4.10	Memiliki kemampuan belajar mandiri secara berkelanjutan
		4.11	Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya
		4.12	Menyusun laporan tertulis secara komprehensif

8 | Hambatan, Permasalahan dan Saran

Hambatan

Hambatan dalam penyusunan standar pada umumnya dipandang tidak ada.

- a. Pihak anggota tim penyusun datang dan cek out tepat waktu.
- b. Pihak anggota sekretariat yang bertugas di hotel tekun dan tepat di tempat.
- c. Fasilitas kantor yang digunakan di hotel cukup terkendali.
- d. Pihak anggota sekretariat yang bertugas di kantor
 - 1) Pihak pensuratan melakukan tugasnya dengan cepat.
 - 2) Pihak pelaksana fax surat melakukan tugasnya sesuai prioritas undangan.
- e. Pihak hotel, kadang terjadi tidak ada kamar kosong yang seyogiannya anggota tim telah memperoleh fasilitas kamar sebelum acara (jam 14.00) dimulai.

Saran

Dalam rekrutmen calon tim penyusun standar untuk berikutnya, disarankan bukan pejabat atau yang memiliki kesibukan relatif kurang.



PENYUSUNAN STANDAR PROSES UNTUK SATUAN PENDIDIKAN TINGGI

Badan Standar Nasional Pendidikan



Tim Standar Proses Pendidikan Tinggi

BAB 5 PENYUSUNAN STANDAR PROSES UNTUK SATUAN PENDIDIKAN TINGGI

1 | Pendahuluan

Salah satu penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, serta tersusunnya Rencana Strategis Kemendiknas yang antara lain memuat visi, dan misi Pendidikan Nasional. Visi Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 2010-2014 adalah “terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif”. Sedangkan misi pendidikan nasional adalah : “meningkatkan **ketersediaan** layanan pendidikan, memperluas **keterjangkauan** layanan pendidikan, meningkatkan **kualitas/mutu** dan relevansi layanan pendidikan, mewujudkan **kesetaraan** dalam memperoleh layanan pendidikan, menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan”.

Selanjutnya Visi tersebut digunakan sebagai dasar merumuskan visi pendidikan tinggi yaitu : Terwujudnya sistem pendidikan tinggi yang menghasilkan insan yang **berkarakter, cerdas, dan terampil** untuk membangun bangsa Indonesia yang bermartabat dan berdaya saing melalui pengembangan ilmu, teknologi, dan seni untuk

kemajuan dan kesejahteraan umat manusia yang berkelanjutan.

Insan Indonesia yang **berkarakter** adalah mereka yang bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki integritas, jujur, toleran, bersemangat kebangsaan, serta menjunjung tinggi nilai dan norma universal; sedangkan **cerdas** dalam hal ini dimaksudkan adalah insan yang memiliki kecerdasan komprehensif yang meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan kinestetik. Di samping itu **terampil** dimaksudkan bahwa lulusan perguruan tinggi memiliki keterampilan baik yang secara langsung terkait dengan bidang ilmu yang dipelajari (*hard skills*) maupun keterampilan pelengkap (*soft skills*) yang menjadikan mereka sebagai sumber daya manusia (*human capital*) yang unggul.

Kualitas manusia Indonesia seperti itu dapat dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu yang didukung oleh proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. Proses pendidikan dan pembelajaran tersebut harus diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut pendidik harus dapat memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta mengembangkan potensi, kreativitas dan kemandiriannya sesuai dengan bakat, minat serta perkembangan fisik dan psikologis. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran.

Paradigma pembelajaran memberikan peluang yang luas pada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas diri dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkarakter, berkepribadian, kecerdasan, estetika, sehat jasmani rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam rangka menyelenggarakan pendidikan berdasarkan paradigma ter-

sebut, diperlukan acuan dasar bagi setiap satuan pendidikan yang meliputi serangkaian kriteria dan kriteria minimal sebagai pedoman untuk proses pembelajaran yang bersifat demokratis, mendidik, mendorong kreativitas, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik. Di samping hal tersebut, demi perkembangan keilmuan secara berkelanjutan, proses pendidikan dan pembelajaran di pendidikan tinggi harus dapat menjamin adanya otonomi perguruan tinggi baik yang menyangkut kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam bidang ilmu, teknologi, seni berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang pasal 91 ayat (1) menyatakan bahwa, "pimpinan perguruan tinggi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan". Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

Sedangkan kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk: melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual; melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya

bangsa dan negara Indonesia; menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; serta memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi keilmuan.

Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Dengan demikian proses pembelajaran di pendidikan tinggi harus menggunakan pendekatan-pendekatan pembelajaran inovatif dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga, baik yang menyangkut teori maupun praktik, diselenggarakan di dalam kelas maupun di luar kelas, dengan tujuan agar pembelajaran bermakna (*meaningful*), dan berguna (*useful*) dengan mengimplementasikan prinsip pembelajaran kontekstual (*contextual learning*) dan pembelajaran berpusat pada peserta didik (*student center learning*) dapat terjadi. Ini berarti proses pembelajaran di pendidikan tinggi juga harus mengakomodasi adanya peserta didik dalam kelompok heterogin yang terdiri atas pribadi-pribadi yang mempunyai karakteristik, kondisi dan kebutuhan yang berbeda, yang perlu mendapat perlakuan sedemikian rupa sehingga potensi masing-masing pribadi tersebut dapat berkembang secara optimal. Untuk itu harus dikembangkan inovasi pembelajaran di pendidikan tinggi baik yang terkait dengan muatan kurikulum maupun di luar kurikulum yang secara keseluruhan menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk terbentuknya lulusan yang unggul dan kompetitif.

Pemberdayaan peserta didik agar mampu untuk membangun diri sendiri berdasarkan potensi diri dan pengaruh lingkungan yang diperolehnya sesuai dengan taraf perkembangan psikis, fisik dan sosial memerlukan interaksi aktif antara pendidik dengan peserta didik, antar peserta didik, dan antara peserta didik dengan lingkungan, dalam suasana yang menyenangkan dan menggairahkan, serta sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai yang ada dilingkungannya.

Secara akademik dan empirik, tidak ada satupun model pembelajaran yang sesuai untuk semua matakuliah dengan bidang kajian dan peserta didik yang beragam. Untuk itu semua pendidik harus mampu memilih, mengembangkan, dan menerapkan model-model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik matakuliah, peserta didik, serta kondisi dan situasi lingkungan. Hal ini menunjukkan pentingnya standar proses untuk menghasilkan lulusan yang bermutu.

Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik mahasiswa, dengan keragaman bidang studi yang diselenggarakan, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, maka proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan tinggi harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah menetapkan delapan standar yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Salah satu standar nasional untuk pendidikan tinggi yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan

pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada perguruan tinggi yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran, untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

2 | Landasan Penyusunan Standar

Penyusunan standar proses pendidikan tinggi didasarkan pada landasan yuridis sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang *Badan Hukum Pendidikan (UU BHP)*
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*

3 | Tujuan dan Manfaat Standar

Tujuan standar proses pembelajaran adalah untuk menjamin mutu proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan formal, agar terlaksana proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Manfaat ditetapkannya standar proses pembelajaran adalah

agar dapat dijadikan:

1. Pedoman umum bagi para pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di setiap satuan pendidikan formal.
2. Dasar bagi Pemerintah dalam mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pembelajaran di setiap satuan pendidikan formal.
3. Petunjuk bagi masyarakat atas peran sertanya dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan program pembelajaran di setiap satuan pendidikan formal.

4 | Hasil yang Dicapai

Kegiatan ini menghasilkan naskah akademik dan standar proses pada satuan pendidikan tinggi. Secara garis besar isi standar tersebut mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

Dalam standar ini, perencanaan pembelajaran tiap mata kuliah diwujudkan dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Sehubungan dengan pelaksanaan proses pembelajaran, standar ini mengatur tentang persyaratan pelaksanaan pembelajaran, misalnya penetapan rombongan belajar, beban kerja dosen, penyiapan sumber belajar, dan pengelolaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran terdiri atas tiga kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Pada bagian penilaian hasil pembelajaran, standar ini mengatur tentang pengertian, fungsi, lingkup dan pendekatan penilaian. Selain itu juga menjelaskan tentang sasaran penilaian pelaksanaan penilaian, dan bentuk hasil penilaian. Bagian lain yang diatur dalam standar ini adalah pengawasan proses pembelajaran.

5 | Tim Ahli

Peserta tim penyusunan standar sarana dan prasarana pendidikan vokasi pendidikan tinggi berjumlah 20 (dua puluh) orang yang terdiri atas unsur BSNP (6 orang) dan tim ahli (14 orang).

a Anggota BSNP

No	Nama	Instansi	Asal
1	Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons (Koordinator)	BSNP	Semarang
2	Prof. Dr. Gunawan Indrayanto	BSNP	Surabaya
3	Prof. Dr. Johannes Gunawan	BSNP	Bandung
4	Prof. Dr. Djaali	BSNP	Jakarta
5	Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek	BSNP	Jakarta
6	Prof. Dr. Richardus Eko Indrajit	BSNP	Jakarta

Tim Ahli

No	Nama	Instansi Asal	Keterangan
1.	Prof. Dr. Nyoman Dantes	UNDIKSA - Bali	Ketua
2.	Dr. Abd.Rahman A.Ghani	UHAMKA- Jakarta	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Prayitno	UNP - Padang	Anggota
4.	Prof. Dr. Soesanto	UNIMUS - Semarang	Anggota
5.	Prof. Dr. Sugiyo, M.Si	UNNES- Semarang	Anggota
6.	Prof. Dr. Suparno Eko Widodo	UNJ - Jakarta	Anggota
7.	Prof. Dr. Syafsyir Akhlus, M.Sc.	ITS-Surabaya	Anggota
8.	Dr. Mukminan	UNY-Yogyakarta	Anggota
9.	Wono Setiabudi, Ph.D.	ITB - Bandung	Anggota
10.	Dr. Fakhruddin Arbach, M.Pd	UNJ-Jakarta	Anggota
11.	Jose Rizal Manua, S.Sn	IKJ-Jakarta	Anggota
12.	Dr. Dahrul Syah	IPB-Bogor	Anggota
13.	Prof. Dr. Hamam Hadi	UGM-Yogyakarta	Anggota
14.	Felicia N. Utorodewo, SS, M.Si.	UI- Jakarta	Anggota

6 | Metode Penyusunan Standar

Proses penyusunan standar sarana dan prasarana pendidikan vokasi pada perguruan tinggi mencakup tahapan teknis, partisipatif dan legal. Pada tahapan teknis, proses ini menghasilkan naskah akademik dan rancangan teknis standar. Pada tahap partisipatif, penyusunan rancangan standar ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang mewakili para pengguna dan pemerintah. Pada tahap legal, setelah disempurnakan berdasarkan masukan dari proses review dan validasi, rancangan teknis standar tersebut dikaji dari aspek hukumnya oleh Biro Hukum Kementerian Pendidikan Nasional.

7 | Tahapan Penyusunan Standar

Kegiatan penyusunan standar sarana dan prasarana pendidikan vokasi pendidikan tinggi dilaksanakan di Jakarta, kecuali tahapan kegiatan tertentu dilaksanakan di daerah. Kegiatan dimulai pada bulan Februari 2010 dan berakhir pada bulan Oktober 2010, dengan sebelas langkah kegiatan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Waktu	Tempat	Peserta
1	Penyusunan Desain	24-26 Februari 2010	Jakarta	20 orang
2	Kajian Bahan Dasar	10-12 Maret 2010	Jakarta	20 orang
3	Penyusunan Draf Standar	15-17 April 2010	Jakarta	20 orang
4	Reviu dan Perbaikan Draf Standar	7-9 Mei 2010	Jakarta	34 orang
5	Validasi Draf Standar 4 Provinsi (Dalam Jawa 2 dan Luar Jawa 2).	2-10 Juni 2010	UNIMED, UNNES, ITS, dan UNM	40 org/ Prov
6	Analisis Hasil Validasi Draf Standar	8-10 Juli 2010	Jakarta	20 orang

No	Kegiatan	Waktu	Tempat	Peserta
7	Perbaikan Draf Standar Hasil Validasi	29-31 Juli 2010	Jakarta	20 orang
8	Pembahasan Draf Standar dengan Unit Utama Undangan (DKI : 9, Dalam Jawa : 3 Luar Jawa : 2)	19-21 Agustus 2010	Jakarta	34 orang
9	Finalisasi Standar untuk Uji Publik	28-30 Agustus 2010	Jakarta	20 orang
10	Uji Publik Draf Standar 4 Provinsi (2 dalam Jawa: dan 2 luar Jawa)	3-7 Oktober 2010	ITB, UGM, Udayana, dan Unlam	40 org/ prov
11	Finalisasi Standar	14-16 Oktober 2010	Jakarta	20 orang

8 | Hambatan dan Solusi

Dalam penyusunan standar proses pada satuan pendidikan tinggi ini secara umum tidak ada kendala dan hambatan yang signifikan. Namun demikian, secara khusus dapat disebutkan di sini adanya undangan dari *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang berhalangan hadir dalam tahapan kegiatan atau yang bersangkutan mewakili kepada pihak lain. Keadaan ini disikapi dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan saran mereka secara tertulis via email terhadap draf standar yang dikembangkan oleh tim *ad hoc*.



PENYUSUNAN STANDAR BIAYA SMK DAN INDEKS BIAYA PENDIDIKAN TAHUN 2010

Badan Standar Nasional Pendidikan



Tim ahli standar biaya

BAB 6 PENYUSUNAN STANDAR BIAYA SMK DAN INDEKS BIAYA PENDIDIKAN TAHUN 2010

1 | PENDAHULUAN

Pada tahun 2008 Tim Standar Biaya telah menyusun standar biaya operasional non personalia untuk 96 tingkat satuan pendidikan/program keahlian SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB dan SMK. Khusus tingkat satuan pendidikan SMK telah dihitung standar biaya pendidikan untuk 76 program keahlian (PK) dari total 121 Program Keahlian yang ada di SMK pada waktu itu.

Pada tahun 2009, Tim Standar Biaya telah menyusun indeks biaya pendidikan (IBP) untuk 85 kabupaten/kota dari total 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagai dasar penetapan standar biaya operasional non personalia ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Sampai dengan akhir tahun 2009, standar biaya non personalia di SMK yang belum dihitung adalah sebanyak 45 program keahlian berdasarkan data program keahlian pada tahun 2008. Namun, pada tahun 2008 terjadi perubahan spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan melalui SK Dirjen Dikdasmen nomor 251/C/EPP/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008. Berdasarkan SK tersebut, terjadi perubahan kurikulum dari program keahlian (PK) menjadi kompetensi keahlian (KK) yang seluruhnya berjumlah 121 Kompetensi Keahlian.

Pada tahun 2010 dilakukan penghitungan standar biaya operasional 35 KK dari 45 KK yang masih tersisa, sementara 10 KK

lainnya tidak dihitung mengingat sumber data relatif terbatas dan/atau belum ada SMK yang menyelenggarakannya.

2 | TUJUAN DAN MANFAAT

- a. Menyediakan suatu pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
- b. Sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menentukan dan mengalokasikan sumber dana yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 | LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR BIAYA

Penyusunan Standar Biaya Pendidikan ini menggunakan landasan:

1. Bab IX UU Sisdiknas mengatur tentang perlunya ditentukan standar nasional pendidikan. Standar nasional tersebut terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah menjabarkan lebih lanjut ketentuan dalam UU Sisdiknas. Dalam Bab II Pasal 2 dijelaskan lingkup Standar Nasional Pendidikan yang meliputi: a) standar isi, b) standar proses, c) standar kompetensi lulusan, d) standar pendidik dan tenaga kependidikan, e) standar sarana dan

- prasarana, f) standar pengelolaan, g) standar pembiayaan, dan h) standar penilaian pendidikan.
3. Bab VIII pasal 52 mengatur tentang keharusan satuan pendidikan memiliki pedoman yang mengatur tentang: a) kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus; b) kalender pendidikan/ akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; c) struktur organisasi satuan pendidikan; d) pembagian tugas di antara pendidik; e) pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; f) peraturan akademik; g) tata tertib satuan pendidikan yang minimal: meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; h) kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat; dan i) biaya operasional satuan pendidikan.
 4. Penjelasan tentang biaya pendidikan diatur dalam Bab IX pasal 62, yaitu:
 - (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal; (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap; (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan; (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana

dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya; (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

4. | TIM AHLI

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0037/SK/BSNP/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Tim Ahli Standar Pembiayaan telah disusun Tim Penyusun Standar Biaya Pendidikan dan Indeks Biaya Pendidikan SMK yang terdiri atas 14 orang anggota dari berbagai kalangan, yaitu dari kalangan akademisi yang menguasai pembiayaan pendidikan, pendidikan umum, pendidikan kejuruan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional dan Badan Pusat Statistik. Susunan Tim Standar Biaya tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4-1. Anggota BSNP dalam Standar Biaya tahun 2010

NO	NAMA	INSTANSI	ASAL
1	Prof.Dr.Zaki Baridwan (<i>Koordinator</i>)	UGM	Yogyakarta
2	Prof.Dr.Edy Tri Baskoro	ITB	Bandung
3	Prof.Dr.DR.Farid Anfasa Moeloek, Sp.OG	UI	Jakarta
4	Dr.Teuku Ramli Zakaria, MA	UIN-Hidayatullah	Jakarta

Tabel 4-2. Tim Penyusun Standar Biaya Tahun 2010

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	BIDANG KEAHLIAN	NO HP
1	Dr. Moch. Alip	Ketua	Univ Negeri Yogyakarta	Pendidikan Kejuruan	0818277331
2	Dr. Khomsiyah	Wakil Ketua	Univ. Trisakti	Pembiayaan pendidikan	0818892975
3	Halmawati, SE. M.Si	Sekretaris	Univ. Negeri Padang	Pembiayaan pendidikan	0815 925 2374
4	Dr. Eddi Mashuri, MM	Anggota	Direktorat Pembinaan SMK Depdiknas	Pendidikan Kejuruan	085219350337
5	Dra. Trie Widayati. M.Pd.	Anggota	Direktorat PSLB Depdiknas	Pendidikan Luar Biasa	0811158194
6	Riduan, M.Si	Anggota	Badan Pusat Statistik	Statistik/ Indeks	08128926920
7	C.D Fajarini, SE. M.Si	Anggota	Balitbang Depdiknas	Pembiayaan pendidikan	081310262816
8	Dra. Sri Kusumawati	Anggota	Badan Pusat Statistik	Statistik/ Indeks	0811957567
9	Dr. Mega Iswari, M.Pd.	Anggota	Univ. Negeri Padang	Pendidikan Luar Biasa	081322684861
10	Drs. Lutfi Baraja, Ak, MBA	Anggota	Univ. Trisakti	Informasi/IT	081319541588
11	Dra. Ninik Sulistianik, M.Pd.	Anggota	Kepala SMKN 6, Surabaya	Pendidikan Kejuruan	0811336673
12	Drs. Mustangid, M.Pd.	Anggota	Kepala SMKN Wonosari, Yogyakarta	Pendidikan Kejuruan	087838264634
13	Suyanto, SE, MBA, AK.	Anggota	UGM, Yogyakarta	Informasi/IT	08112511850

5. | TAHAPAN KEGIATAN

Kegiatan penyusunan standar biaya pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Indeks biaya pendidikan, dan database dilakukan melalui 13 tahap kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Desain

Penyusunan desain dimulai dengan kegiatan *brainstorming* seluruh anggota Tim untuk menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan masukan-masukan dari anggota BSNP. Kegiatan awal tersebut menghasilkan jadwal, rencana kegiatan selama satu tahun, dan *review* terhadap literatur/teori, peraturan, serta hasil penelitian sebelumnya.

b. Kajian Bahan Dasar

Kegiatan ini dimulai dengan penyusunan kisi-kisi sebagai dasar penyusunan instrumen atau kuesioner berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain menghasilkan instrumen juga ditetapkan rencana kegiatan pengumpulan data, metode pengumpulan data, jumlah responden dari setiap SMK yang akan diundang, jadwal, penunjukan anggota tim untuk melakukan pengumpulan data, dan penetapan provinsi tujuan/tempat pengumpulan data.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ditujukan untuk memperoleh data harga (daftar harga barang-barang yang terkait dengan pendidikan) di daerah/provinsi sampel yang dilakukan melalui kegiatan *workshop* dengan mengundang *stakeholder* pendidikan (kepala sekolah SMK, kepala program studi, guru, kepala laboran, kepala tata usaha, dan pejabat dinas pendidikan yang terkait). Tim ahli pengumpul data yang bertugas di tiap provinsi sampel

sebanyak 2 orang dan jumlah responden tiap provinsi lebih kurang 35 s/d 40 orang. Kegiatan pengumpulan data dilakukan selama 3 (tiga) hari termasuk perjalanan. Kegiatan pengumpulan data dilakukan di lima (5) provinsi, yaitu: Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Tabel 5-1. Jadwal dan Lokasi Pengumpulan Data

NO	NAMA TIM AHLI	PROVINSI TUJUAN	TANGGAL
1	<ul style="list-style-type: none"> ● Dr. Moch Alip ● Drs Mustangid. MPd 	Jateng	15 – 17 April
2	<ul style="list-style-type: none"> ● C.D Fajarini, SE, M.Si ● Halmawati, SE, M.Si 	Jatim	15 – 17 April
3	<ul style="list-style-type: none"> ● Dr. Edi Mashuri ● Dra. Ninik Sulistianik, MPd 	Jabar	15 – 17 April
4	<ul style="list-style-type: none"> ● Dr. Edi Mashuri ● Dra. Trie Widayati. M.Pd. 	DKI Jakarta	21 -23 April
5	<ul style="list-style-type: none"> ● Ir. Riduan M.Si ● Drs Lutfi Baraja. MBA 	Sum sel	15 – 17 April

Tabel 5-2. Responden (SMK)–Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah			
No	SMK yang diundang	No. KK	Kompetensi Keahlian
1	SMK Migas Cepu	1	Teknik Produksi Perminyakan
		2	Teknik Pemboran Minyak
		3	Teknik Pengolahan Minyak, Gas Dan Petrokimia
2	SMKN 3 Pekalongan	4	Teknik Penyempurnaan Tekstil
		5	Garmen
3	SMKN 7, Semarang	6	Teknik Transmisi Tenaga Listrik
4	SMKN 11, Semarang	7	Persiapan Grafika
5	SMKN 1, Jepara	8	Agribisnis Rumput Laut
	5 SMK	8 KK	

Tabel 5-3. Responden (SMK)–Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur			
No	SMK yang diundang	No. KK	Kompetensi Keahlian
1	SMKN 3 Buduran Sidoarjo	1	Teknik Pengelasan Kapal
		2	Instalasi Pemesinan Kapal
		3	Kelistrikan Kapal
		4	Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal
		5	Konstruksi Kapal Kayu
		6	Konstruksi Kapal Fibreglass
		7	Interior Kapal
		8	Teknik Konstruksi Kapal Baja
2	SMKN 1, Singosari	9	Teknik Alat Berat
		10	Teknik Konstruksi Baja
3	SMK Pgri 3, Malang	11	Teknik Speda Motor
		12	Teknik Perbaikan Body Otomotif
4	SMKN 5 Surabaya	13	Instalasi Tenaga Listrik
5	SMKN 7, Surabaya	14	Teknik Ototronik
6	SMK Farmasii Surabaya	15	Farmasi
6 SMK		15 KK	

Tabel 5-4. Responden (SMK)–Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat			
No	SMK yang diundang	No. KK	Kompetensi Keahlian
1	SMKN 1, Cimahi	1	Teknik Mekatronika
2	SMKN 12, Bandung	2	Konstruksi Rangka Pesawat Udara
		3	Konstruksi Badan Pesawat Udara
3	SMKN 1 Cariu/Gunung Putri Bogor	4	Teknik Instrumentasi Logam
		5	Teknik Instrumentasi Gelas
4	SMKN 1, Cibadak	6	Mekanisasi Pertanian
		7	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian
5	SMKN Kehutanan Kadipaten Cirebon	8	Kehutanan
6	SMKN 1, Mundu, Cirebon	9	Teknika Kapal Penangkap Ikan
6 SMK		9 KK	

Tabel 5-5. Responden (SMK)–DKI Jakarta

DKI Jakarta			
No	SMK yang diundang	No. KK	Kompetensi Keahlian
1	SMM Perguruan Cikini	1	Seni Musik Klasik
2	SMK Dit. Kesad, Jakarta	2	Analisis Kesehatan
3	SMK Kesdam, Jakarta	3	Keperawatan
4	SMKN 29, Jakarta	4	Pemesinan Pesawat Udara
5	SMKN 7, Jakarta	5	Produksi Grafika
6	SMK Sandyputra Jakarta	6	Teknik Transmisi Telekomunikasi
		7	Teknik Akses Kabel
7	SPRG, Jakarta	8	Keperawatan Gigi
8	SMK Caraka Nusantara, Jakarta	9	Farmasi Industri
	8 SMK	9 KK	

Tabel 5-6. Responden (SMK)–Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan			
No	SMK yang diundang	No. KK	Kompetensi Keahlian
1	Sppn Sembawa, Palembang	1	Penyuluhan Pertanian
2	SMK Kimia Yanitas	2	Kimia Industri
3	SMK Pelayaran Makarya	3	Teknika Kapal Penangkap Ikan
	3 SMK	3 KK	

d. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan proses pengolahan terhadap data yang sudah dijangkau dalam kegiatan pengumpulan data. Sebelum data diolah terlebih dahulu diseleksi/disortir agar diperoleh data yang valid. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Terdapat 35 KK yang layak diolah, sedangkan sisanya tidak bisa dikerjakan karena sumber data yang terbatas dan/atau belum ada SMK yang menyelenggarakannya.

Pengolahan data untuk IBP dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu **indeks tingkat kompetensi keahlian**, selanjutnya dipakai *simple average* untuk memperoleh **indeks**

- biaya pendidikan kabupaten/kota.** Hasil perolehan indeks tiap tingkat satuan pendidikan/ kompetensi keahlian dikalikan dengan menggunakan pembobotan jumlah sekolah di setiap tingkat satuan pendidikan/kompetensi keahlian untuk menghasilkan "nilai". Kemudian semua nilai digabung untuk dibagi dengan total jumlah sekolah sebagai dasar pembobotan. Hasil akhir diperoleh indeks biaya pendidikan kabupaten/kota
- e. Penyusunan draft
Penyusunan draft standar biaya dan indeks merupakan proses penyusunan hasil pengolahan data daerah yang diperoleh pada tahapan sebelumnya.
 - f. Reviu dan Perbaikan Draft Standar
Dalam kegiatan review dan perbaikan draft standar, tim Adhoc memaparkan hasil draft standar dan indeks yang telah diperoleh untuk didiskusikan dalam rapat tim dan direview secara komprehensif. Draft standar yang telah direview akan digunakan sebagai materi untuk kegiatan validasi pada tahapan berikutnya. Pertemuan ini juga membahas rencana kegiatan validasi yang berkaitan dengan jadwal kegiatan validasi, provinsi yang terpilih serta anggota tim yang akan melaksanakannya di provinsi terpilih.
 - g. Validasi Draft Standar
Kegiatan validasi dilakukan di 4 (empat) Provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa timur. Kegiatan validasi dilakukan selama 3 hari termasuk perjalanan dan kegiatan dilakukan dalam bentuk *workshop* dengan mengundang *stakeholder* pendidikan (kepala sekolah SMK, kepala program studi, guru, kepala laboran, kepala tata usaha, dan pejabat dinas pendidikan yang terkait).

Tabel 5-7. Jadwal kegiatan Validasi

No	Nama Tim Ahli	Provinsi Tujuan	Tanggal
1	1. Prof. Dr. Zaki Baridwan	Jatim	23 - 25 Juni
	2. Dr. M. Alip		
	3. Dr. Khomsiyah		
2	1. Ir. Riduan M.Si	Jateng	23 - 25 Juni
	2. Dra. C.D. Fajarini, M.Si		
3	1. Prof. Dr. Edi Baskoro	Jabar	23 - 25 Juni
	2. Dr. Eddi Mashuri		
	3. Halmawati, SE, M.Si		
4	1. Dr. Mega Iswari	Sumsel	24 - 26 Juni
	2. Dra. Lutfi Baraja, MBA		
	3. Drs. Mustangid, M. Pd		

- h. Analisis Hasil Validasi Draft Standar
Kegiatan ini menampung masukan hasil validasi, dan selanjutnya dilakukan proses editing terhadap masukan hasil validasi yang dianggap relevan. Kegiatan ini menghasilkan draft standar biaya dan draft indeks biaya pendidikan di tingkat kabupaten/kota.
- i. Perbaikan Draft Standar Hasil Validasi
Menyempurnakan draft standar biaya pendidikan berdasarkan hasil validasi yang akan dijadikan bahan diskusi dengan Unit Utama pada pertemuan berikutnya.
- j. Pembahasan Draft Standar dengan Unit Utama
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memvalidasi draft standar biaya pendidikan yang dilakukan oleh Unit Utama antara lain Direktorat Pembinaan SMK dan beberapa Kementerian/Badan terkait melalui kegiatan *workshop*.
- k. Finalisasi Draft Standar untuk Uji Publik
Kegiatan ini dilakukan untuk merevisi Draft standar biaya

pendidikan dan draft IBP kab/kota berdasarkan masukan-masukan dari unit utama pada kegiatan sebelumnya.

I. Uji Publik Draft Standar

Kegiatan Uji publik dilakukan di empat (4) provinsi, yaitu: Sulawesi selatan, Lampung, Kalimantan Barat. Disamping menjangkau masukan dan pandangan dari stakeholder pendidikan, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melakukan pre-sosialisasi Permendiknas no 69 tentang standar biaya dan Indeks Biaya Pendidikan tahun 2009.

Tabel 5-8. Jadwal Kegiatan Uji Publik

No	Nama Tim Ahli	Provinsi Tujuan	Tanggal (27 Sept- 2 Oktober)
1	1. Dr. Ramli Zakaria	Aceh/NAD	29 September-1 Oktober
	2. Suyanto, SE, MBA, AK.		
	3. Dr. Eddi Mashuri		
2	1. Dr. Moch. Alip	Lampung	27 September -29 Oktober
	2. Halmawati, SE. M.Si		
	3. BSNP/Sekretariat		
3	1. Dra. Fajarini, M.Si	Sulawesi Selatan	27 September -29 Oktober
	2. Drs. Mustangid		
	3. BSNP/Sekretariat		
4	1. Drs. Lutfi Baraja. MBA	Yogyakarta	28 – 30 September
	2. Dra. Ninik Sulistianik. MPd		
	3. Prof. Dr. Zaki Baridwan		

m. Finalisasi Standar

Kegiatan finalisasi standar ini merupakan pembahasan terakhir draft standar dan IBP, yang melibatkan Biro Hukum Depdiknas untuk menyusun rekomendasi draft standar dan IBP yang akan diserahkan kepada Menteri Pendidikan Nasional sebagai dasar penetapan standar biaya operasional pendidikan untuk kabupaten/kota diluar DKI Jakarta (dalam hal ini, DKI Jakarta digunakan sebagai base).

Ringkasan Jadwal Penyusunan Standar Biaya Dan IBP Tahun

2010

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	PESERTA	OUTPUT
1.	24 -26 Feb	Penyusunan desain	Jakarta	BSNP + Tim Ahli	Rencana kegiatan, desain studi dan outline naskah akademik
2.	17 -19 Maret	Kajian Bahan Dasar	Jakarta	BSNP + Tim Ahli	Kisi-kisi dan Instrumen pengumpulan data
3.	16-18 April	Pengumpulan data	5 Provinsi (DKI Jakarta, Jateng, Jabar, Jatim, dan Sumsel)	BSNP + Tim Ahli	Data lapangan
4.	28-30 April	Pengolahan dan Analisis Data	Jakarta	BSNP + Tim Ahli	Data olahan/ tabel analisis pengolahan data dan analisis hasil pengolahan data
5.	12-14 Mei	Penyusunan draft standar	Jakarta	BSNP + Tim Ahli	Draft standar biaya dan Draft Naskah Akademik
6.	2-4 juni	Review dan perbaikan draft standar	Jakarta	BSNP + Tim Ahli	dan Draft standar biaya setelah review dan Draft Naskah Akademik
7.	23-25 juni	Validasi draft standar	4 Provinsi (Jateng, Jabar, Jatim, dan Sumsel)	BSNP + Tim Ahli	Data tambahan /masukan untuk penyempurnaan Draft Standar Biaya
8.	30 juni-2 juli	Analisis hasil validasi draft standar	Jakarta	BSNP + Tim Ahli	Draft standar biaya perbaikan setelah masukan hasil validasi
9.	14-16 Juli	Perbaikan draft standar hasil validasi		BSNP + Tim Ahli	Penyempurnaan Draft Standar Biaya (siap utk didiskusikan dg unit utama)

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	PESERTA	OUTPUT
10.	30 Juli -1 Agustus	Pembahasan draft standar dengan unit utama	Jakarta	BSNP + Tim Ahli	Kumpulan masukan dari Unit Utama
11.	11-13 Agustus	Finalisasi draft standar untuk uji publik	Jakarta	BSNP + Tim Ahli	Draft standar biaya dan IBP final siap utk uji publik
12.	27 Sept – 2 Oktober	Uji publik draft standar	4 Provinsi (NAD, Yogya, Sulsel, dan Lampung)	BSNP + Tim Ahli	Daftar/kumpulan masukan uji publik
13	20 - 22 Oktober	Finalisasi standar	Jakarta	BSNP + Tim Ahli	<ul style="list-style-type: none"> ▪ draft standar biaya 2010 ▪ draft Indeks Biaya Pendidikan ▪ draft naskah akademik ▪ Laporan kegiatan

6 | HASIL YANG DIPEROLEH

Tim standar biaya tahun 2010 menghasilkan:

- (1) Naskah Akademik penyusunan standar biaya pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan penyusunan Indeks Biaya Pendidikan tahun 2010. (Dilampirkan bersama dengan laporan ini)
- (2) Standar Biaya Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2010

Standar Biaya Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang dihitung pada tahun 2010 sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kompetensi Keahlian (KK) yaitu KK yang belum dihitung pada tahun 2008.

Dengan menggunakan data tahun 2008 dengan dasar data DKI

Jakarta, Standar Biaya Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2010 dapat dihitung sebanyak 121 KK sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktorat Menengah Kejuruan (Dikmenjur) tahun 2009.

Standar Biaya Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan disajikan dalam bentuk Draft Permendiknas dengan 2 (dua) versi yaitu versi 35 KK dan 121 KK

(3) Indeks Biaya Pendidikan tahun 2010

Indeks Biaya Pendidikan (IBP) yang dihitung tahun 2010 ini menggantikan IBP tahun 2009.

Perhitungan IBP tahun 2010 menggunakan metoda yang sama dengan perhitungan IBP tahun 2009 dengan dasar tahun 2010 namun dengan kabupaten/kota yang agak berbeda.

(4) Database biaya operasional pendidikan tahun 2010 dan program aplikasinya.

Database biaya operasional pendidikan merupakan kumpulan data biaya pendidikan tahun 2008 dan 2010. Diharapkan database ini dapat digunakan untuk penetapan standar biaya pendidikan tahun-tahun yang akan datang dengan melakukan penyesuaian berdasarkan data inflasi yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang berwenang yaitu Biro Pusat Statistik (BPS).

Program aplikasi yang disusun oleh tim dapat digunakan juga untuk menjangking data dari responden (yaitu sekolah-sekolah) melalui kuesioner/instrumen yang ada di web BSNP.

7 | MASALAH/KENDALA YANG DIHADAPI

- 1) Penyusunan standar biaya pendidikan Sekolah menengah kejuruan
 - Adanya keterbatasan kualifikasi responden yang kurang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh BSNP

mengakibatkan kurang sesuai/kurang lengkapnya kualitas dan validitas data.

- Beragamnya spesifikasi alat dan bahan habis pakai menyebabkan variasi data harga sehingga diperlukan keahlian dan ketelitian khusus untuk mengidentifikasi setiap butir biaya alat dan bahan habis pakai.
 - Perubahan nama dan konten Program Keahlian (PK) menjadi Kompetensi Keahlian (KK) pada tahun 2009 menyebabkan penentuan standar biaya pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2010 cukup menyulitkan bagi tim untuk menggabungkan PK tahun 2008 (75 PK) dengan KK tahun 2010 (35 KK). Kegiatan penggabungan ini memerlukan keahlian khusus untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan kompetensi disetiap PK yang telah disusun di tahun 2008.
 - Jumlah responden peserta workshop yang dilaksanakan di tiap provinsi didasarkan pada jumlah Kompetensi Keahlian yang diselenggarakan oleh SMK yang ada di provinsi tersebut. Hal ini mengakibatkan keragaman jumlah responden pada tiap provinsi, padahal jumlah responden yang ditetapkan oleh Bagian Keuangan adalah sama untuk tiap provinsi. Keragaman jumlah responden ini menimbulkan kesulitan tersendiri karena kurang didukung oleh pengaturan keuangan yang tidak dapat dilakukan dengan sistem subsidi silang atau substitusi.
- 2) Penyusunan Indeks Biaya Pendidikan
- Indeks Biaya Pendidikan idealnya disusun berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah kabupaten/kota berdasarkan anggaran yang tersedia. Sehingga data Indeks Biaya Pendidikan tahun 2010 hanya mampu dihitung sebanyak

96 kabupaten/kota dari sekitar 570 kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

- 3) **Penyusunan Database Biaya Pendidikan**
Pengembangan database standar biaya menghadapi beberapa kendala terutama pengumpulan data dilakukan tidak dalam kurun waktu yang relatif bersamaan, perubahan peraturan yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar biaya, dan variasi/format pengumpulan yang berbeda-beda, sehingga untuk data tahun 2008 dan 2009 dibutuhkan beberapa penyesuaian sebagai berikut:
 - i) Agar dapat digabungkan dengan data tahun 2010, maka data tahun 2008 dan 2009 dimutakhirkan menjadi tahun 2010 dengan data inflansi tahun 2008 dan 2009.
 - ii) Perubahan peraturan dalam penyebutan keahlian/kon-sentrasi dari program keahlian (PK) menjadi kompetensi keahlian (KK), sehingga data tahun 2008 dan 2009 disesuaikan dengan penyebutan di peraturan terbaru.
 - iii) Format pengumpulan data dari tahun ke tahun yang berbeda-beda membutuhkan data cleasing dan standarisasi format data.

8 | REKOMENDASI

- 1). Penggunaan program aplikasi database biaya pendidikan tahun 2010 sebagai dasar untuk menentukan standar biaya tahun-tahun berikutnya dan untuk menjaring data baru dari responden (sekolah-sekolah) memerlukan sumber daya manusia yang mampu untuk mengoperasikan dan memelihara program tersebut (termasuk kapasitas perangkat kerasnya)

- 2). Hanya BSNP yang berhak untuk mengubah data yang ada di database, agar tamu yang membuka kuesioner di website BSNP tidak dapat mengubah data berkaitan dengan data biaya (terutama nama butir biaya dan spesifikasi) diperlukan kunci untuk mencegah terjadinya perubahan data biaya tersebut.
- 3). Kemungkinan terjadinya pengembangan Kompetensi Keahlian (kemungkinan tahun 2011 menjadi 171KK) menyebabkan perlunya identifikasi ulang beberapa KK yang berubah.
- 4). Penyusunan indeks biaya pendidikan tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan dengan menggunakan cara pengumpulan data melalui website BSNP dan diolah dengan menggunakan program aplikasi yang telah dibuat oleh tim standar biaya tahun 2010. Diperlukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan dinas pendidikan di seluruh Indonesia berkaitan dengan penggunaan metoda pengumpulan data melalui web ini.



PEMANTAUAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Badan Standar Nasional Pendidikan



Mansyur Ramly (berbaju putih) Kepala Balitbang Kemdiknas dalam rapat dengan BSNP tentang standar nasional pendidikan

BAB 7 PEMANTAUAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

1 | Pendahuluan

Pada tahun 2010 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) kembali melakukan pemantauan pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005), BSNP dibentuk dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan. Pemantauan Standar Nasional Pendidikan juga telah dilakukan pada tahun 2008 dan 2009 untuk standar pendidikan yang telah ditetapkan minimal 1 tahun. Pada pemantauan tahun 2010 ini dilakukan pemantauan empat standar lainnya yang telah ditetapkan pada tahun 2007.

Berdasarkan Pasal 78 PP No. 19 Tahun 2005, satuan pendidikan, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pendidikan dalam rangka melakukan evaluasi pendidikan. Pada Pasal 80, 81, dan 82 PP No. 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa salah satu evaluasi kinerja pendidikan yang harus dilakukan adalah evaluasi terhadap pengelola pendidikan. Pasal 83 ayat (2) huruf c menyebutkan tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai salah satu aspek evaluasi terhadap pengelola pendidikan. Selain itu,

pasal tersebut mengharuskan agar hasil evaluasi dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, informasi tentang pencapaian Standar Nasional Pendidikan seharusnya tersedia pada satuan pendidikan, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat.

Kerjasama dan pembagian tugas dalam pengumpulan data untuk pemantauan Standar Nasional Pendidikan, perlu diatur dan disepakati antara BSNP untuk data nasional di satu pihak dan satuan pendidikan, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, serta pemerintah pusat di pihak lain. Ketepatan dan cakupan informasi merupakan komponen yang sangat penting dalam pemantauan Standar Nasional Pendidikan mengingat luasnya wilayah Indonesia dan besarnya variasi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang dipantau. Model terdistribusi, yaitu pengumpulan dan pengolahan data dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi merupakan salah satu model yang disarankan. Pemerintah pusat dan BSNP dapat langsung mengakses data primer yang tersimpan di pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi untuk diolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pemerintah Pusat atau BSNP masih bisa melakukan pemantauan secara langsung jika diperlukan.

Sampai dengan tahun 2010, data yang diperlukan untuk menyusun laporan pencapaian SNP secara nasional belum tersedia pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Oleh karena itu BSNP perlu untuk melakukan pemantauan Standar Nasional Pendidikan dengan mengumpulkan data secara langsung. Standar Nasional Pendidikan yang perlu dipantau adalah yang belum dipantau pada tahun sebelumnya dan telah diberlakukan minimal 1 tahun. SNP yang telah dipantau tahun lalu meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, Standar Kepala Sekolah/Madrasah, dan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Pada tahun 2010 pemantauan dilakukan terhadap pencapaian Standar

Sarana Prasarana, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Standar Pengelolaan.

Pencapaian SNP secara nasional disimpulkan berdasarkan pengamatan langsung berbagai indikator yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan standar, baik pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, dan provinsi. Banyak indikator dapat diamati berdasarkan bukti-bukti yang berupa dokumen atau bukti lainnya, tetapi banyak pula yang hanya bisa dilakukan melalui observasi pada periode waktu tertentu oleh orang dengan keahlian tertentu. Namun mengingat terbatasnya waktu dan dana pengumpulan data tentang standar-standar tersebut dilakukan melalui wawancara oleh sejumlah pewawancara yang terlatih (surveyor) terhadap responden yang dianggap relevan. Para responden ditanya tentang pengalaman dan persepsi mereka yang terkait dengan standar tersebut.

Pada tahun 2010, pengumpulan data dilakukan untuk melakukan pemantauan Standar Pendidikan Nasional berikut.

- (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pemantauan mencakup aspek-aspek berikut:

- (1) ketersediaan dokumen,
- (2) sosialisasi,
- (3) pelaksanaan standar, dan
- (4) tingkat pencapaian standar.

Unit yang menjadi fokus dalam pemantauan Standar Nasional Pendidikan adalah:

- (1) satuan pendidikan (sekolah/madrasah),
- (2) dinas pendidikan kabupaten/kota,
- (3) dinas pendidikan provinsi,
- (4) kantor kementerian agama kabupaten/kota,
- (5) kantor wilayah kementerian agama,
- (6) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

2 | Tujuan dan Manfaat

Tujuan pemantauan Standar Nasional Pendidikan tahun 2010 adalah untuk memperoleh:

- (1) informasi mengenai ketersediaan, sosialisasi, dan pemahaman dokumen Standar Sarana Prasarana, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Standar Pengelolaan di lapangan dan
- (2) informasi mengenai tingkat penerapan dan pencapaian standar-standar tersebut di lapangan.

3 | Landasan Hukum

Landasan hukum bagi kegiatan pemantauan ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 ayat (3), dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 73 ayat (1).

4 | Metode Pemantauan

Kegiatan pemantauan tahun 2010 dilaksanakan di 60 kabupaten/kota yang terletak pada 10 provinsi. Pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan 4 surveyor dan 1 pendamping di setiap kabupaten/kota. Para surveyor dan pendamping tersebut mengumpulkan data dengan cara mewawancarai responden yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu guru, kepala sekolah, siswa, pengawas, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, Kepala Kantor Wilayah Depag Provinsi, Kepala Kantor Depag Kabupaten/kota, dan Kepala LPMP. Pada masing-masing kabupaten/kota dipilih 12 sekolah/madrasah. Pemilihan sekolah didasarkan pertimbangan antara lain: status sekolah (negeri atau swasta), jenis sekolah (sekolah atau madrasah), dan jenjang pendidikan. Tabel berikut ini memberikan distribusi sekolah yang dipantau.

	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK	Jumlah
Negeri	396	10	56	8	16	5	6	497
Swasta	45	54	40	33	20	13	18	223
Jumlah	441	64	96	41	36	18	24	720

Pada masing-masing sekolah terpilih, yang menjadi responden adalah kepala sekolah, dua orang guru, dan seorang siswa. Sedangkan pada masing-masing kabupaten/kota dipilih 4 orang pengawas sebagai responden. Tabel berikut ini memberikan jumlah responden secara keseluruhan.

Nomor	Kelompok Responden	Jumlah
1	Kepala sekolah/madrasah	720
2	Guru	1440
3	Siswa	720
4	Pengawas sekolah/madrasah	240
5	Kepala Dinas Kementerian Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota	60
6	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota	60
7	Kepala Dinas Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi	10
8	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi	10
9	Kepala LPMP	10
Jumlah		3270

Tahapan kegiatan Pemantauan Standar tahun 2010 dapat dipaparkan sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Waktu/Tempat
1	Penyusunan Desain Pemantauan	12-14 Pebruari/Jakarta
2	Persiapan Pelatihan Surveyor	5 – 7 Maret/Jakarta
3	Pelatihan Surveyor	7 – 23 April/10 Provinsi
4	Persiapan Pengumpulan Data	28-30 Mei/Jakarta
5	Pengumpulan Data	20 Juni-30 Juli/10 Provinsi
6	Pengolahan Data Hasil Pemantauan	6-8 Oktober/Jakarta
7	Analisis Data Hasil Pemantauan	16-18 Oktober/Jakarta
8	Penyusunan Laporan Pemantauan	22-24 Oktober/Jakarta

5 Hasil yang diperoleh

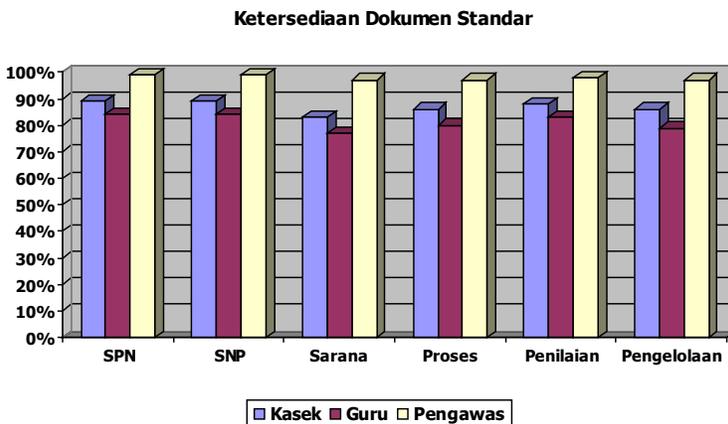
Berdasarkan hasil analisis data, yang diperoleh melalui wawancara dengan para responden, ditarik kesimpulan berikut ini.

5.1 Kesimpulan Umum

- (1) Belum adanya aturan mengenai mekanisme dan prosedur pengumpulan data tentang pencapaian Standar Nasional

Pendidikan, dari tingkat satuan pendidikan, pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi, serta pendidikan nasional.

- (2) Belum adanya kesepakatan tentang indikator pencapaian SNP yang bisa digunakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan kementerian pendidikan nasional dan BSNP.
- 5.2 Ketersediaan dan Sosialisasi Dokumen Standar dan Pendukungnya



- (1) Ketersediaan empat dokumen standar di sekolah lebih dari 82%. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ketersediaan dokumen untuk standar isi, standar kompetensi lulusan di sekolah hasil pemantauan pada tahun lalu. Namun demikian ketersediaan dokumen SPN dan SNP (89%) mengalami kenaikan dibandingkan hasil pemantauan tahun lalu sebesar 82%.
- (2) Kepemilikan dokumen yang tinggi oleh pengawas (lebih dari 96%) belum memberikan dampak terhadap kepemilikan dokumen oleh kepala sekolah dan guru.

- (3) Terdapat kesenjangan ketersediaan dokumen dan sosialisasinya antara Jawa dan luar Jawa, sekolah dan madrasah, negeri dan swasta, sekolah di ibukota dan diluar ibukota. Perbedaan yang paling besar terjadi pada sekolah yang berada di Jawa dan Luar Jawa.
- (4) Upaya penyebarluasan dokumen standar oleh atasan kurang optimal, paling besar hanya sebesar 65% kepada guru, 62% kepada kepala sekolah, dan 47% pengawas.

5.3 Standar Sarana dan Prasarana

- (1) Sekitar 88% satuan pendidikan telah menggunakan bangunan permanen, namun masih ada sekitar 20% bangunan satuan pendidikan yang berpotensi membahayakan pengguna.
- (2) Kesadaran tentang status hukum bangunan satuan pendidikan masih rendah, dapat dilihat dari kecilnya prosentase bangunan yang dilengkapi IMB (51%).
- (3) Hanya 7% bangunan yang dilengkapi akses dan fasilitas untuk penyandang cacat.
- (4) Ketersediaan listrik dijumpai pada 94% satuan pendidikan, tetapi yang memenuhi syarat kecukupan daya hanya 77% dari yang memiliki instalasi listrik.
- (5) Sebanyak 60% satuan pendidikan memiliki jumlah ruang kelas mencukupi untuk jumlah rombongan belajarnya. Namun demikian, syarat luas hanyadipenuhi oleh 88% ruang kelas.
- (6) Hanya 71% sekolah memiliki perpustakaan. Perpustakaan yang ada yang telah memenuhi syarat luas ruang hanya 37%. Pemenuhan koleksi perpustakaan masih sangat rendah baik dari jumlah judul maupun eksemplar.
- (7) Terdapat 58 % satuan pendidikan yang dilengkapi dengan minimal tiga jamban.

5.4 Standar Proses

- (1) Hampir semua sekolah (98%) telah mengembangkan KTSP, namun hanya 49% yang melakukan secara mandiri. Sedangkan mata pelajaran yang telah memiliki silabus dan RPP mencapai 68%, dimana 51% di antaranya dikembangkan sendiri oleh guru, namun sekolah yang seluruh mata pelajarannya telah memiliki silabus dan RPP hanya 20%. Dari segi jenis dan status, sekolah lebih baik dari madrasah, dan negeri lebih baik dari swasta dalam pengembangan silabus dan RPP.
- (2) Sebanyak 74% sekolah telah memenuhi standar dalam hal jumlah siswa maksimal setiap rombongan belajarnya.
- (3) Sejumlah 65% guru memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka perminggu, terdapat disparitas, sekolah lebih baik dari madrasah, negeri lebih baik dari swasta, di Jawa lebih baik luar Jawa, dan sekolah dasar lebih baik dari sekolah menengah.
- (4) Sebanyak 94% guru menggunakan BTP sebagai sumber belajar, namun hanya 47 % mata pelajaran yang diampu telah sesuai dengan standar yaitu satu murid satu buku, dan 70% guru juga menggunakan BSE sebagai sumber belajar.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan proses pembelajaran secara utuh yang meliputi pembukaan, inti, dan penutup, sebanyak 60% sekolah telah menyelenggarakan proses pembelajaran yang utuh tersebut. Terdapat disparitas, sekolah lebih baik dari madrasah, negeri lebih baik dari swasta, di Jawa lebih baik luar Jawa.
- (6) Hampir semua kepala sekolah/madrasah (97%) telah melaksanakan kegiatan pengawasan proses pembelajaran. Meskipun demikian hanya 55% kepala sekolah yang menyelenggarakan kegiatan pengawasan tersebut secara

menyeluruh yang meliputi kegiatan pemantauan, supervisi dan evaluasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.

- (7) Paling sedikit 62% kepala sekolah telah melaksanakan kegiatan tindak lanjut pengawasan proses pembelajaran dalam bentuk pemberian penguatan dan penghargaan terhadap guru yang telah memenuhi standar, mengikut sertakan guru pada kegiatan penataran/pelatihan bagi yang belum memenuhi standar dan melaksanakan teguran yang bersifat mendidik kepada guru-guru yang tidak sesuai atau menyalahi standar.
- (8) Lebih dari 84% guru menyatakan pertemuan tatap muka telah terlaksana lebih dari 75%, dan 80% guru menyatakan minimal 75% isi RPP telah terlaksana dengan baik.
- (9) Paling sedikit 92 % kepala sekolah menyatakan bahwa penerapan standar proses berdampak positif terhadap kinerja guru khususnya pada proses perencanaan, antusiasme dalam mengajar, interaksi guru-siswa, penggunaan metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan kegiatan refleksi dalam pembelajaran.
- (10) Sebanyak 86% guru menyatakan bahwa penerapan standar proses berdampak positif kepada kepala sekolah yaitu makin intensifnya interaksi kepala sekolah dengan guru dan siswa, sementara 52% guru menyatakan dengan adanya standar proses strategi supervisi kepala sekolah menjadi makin bervariasi.

5.5 Standar Penilaian

- (1) Kurang dari 45% guru yang menyampaikan kepada siswa tentang teknik penilaian pada saat menyampaikan silabus di awal semester. Dari ketiga aspek yang seharusnya disampaikan (pokok-pokok materi yang akan

diajarkan, tujuan pembelajaran KD, dan teknik penilaian), teknik penilaian merupakan aspek yang paling sedikit diinformasikan.

- (2) Belum semua guru (kurang dari 61%) mengembangkan sendiri indikator pencapaian KD pada saat menyusun silabus mata pelajarannya masing-masing.
- (3) Belum sampai 60% guru membuat kisi-kisi soal untuk UTS, UAS, dan ulangan harian. Dengan demikian, siswa tidak dapat optimal mempersiapkan UTS, UAS dan ulangan harian.
- (4) Sebagian besar guru (87%) menganggap perlu dibuat kisi-kisi secara nasional untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam UN.
- (5) Pada umumnya (97%) guru menyatakan bahwa materi yang diajarkannya sesuai dengan kisi-kisi UN. Dengan demikian, guru telah menggunakan Standar Isi sebagai pedoman dalam mengajarkan mata pelajaran yang diujikan dalam UN.
- (6) Kurang dari 63% sekolah/madrasah mempunyai kisi-kisi, format penilaian dan pelaporan kepribadian dan akhlak siswa. Keterlibatan semua guru dalam penilaian akhir akhlak dan kepribadian siswa baru pada kelulusan siswa, dan kurang terlibat pada penilaian setiap akhir semester yang diperlukan sebagai bagian proses pembelajaran.
- (7) Hampir semua guru menggunakan teknik penilaian tes dan pemberian tugas, tetapi penggunaan teknik penilaian melalui pengamatan baru mencapai 78%.
- (8) Belum semua guru (70%) mengoreksi dan mengembalikan baik tugas maupun ulangan siswa untuk memberikan umpan balik pembelajaran, maupun menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Sedangkan pemanfaatan hasil analisis butir soal US dilakukan oleh

87% guru.

- (9) Tidak semua guru (76%) menerima laporan hasil analisis daya serap UN dan (87%) di antara mereka memanfaatkan hasil analisis daya serap materi pelajaran UN untuk merencanakan peningkatan kualitas pembelajaran.

5.6 Standar Pengelolaan

- (1) Ketersediaan dokumen pendukung standar pengelolaan yang berupa dokumen visi, misi dan tujuan sekolah/madrasah lebih dari 92% , namun kepemilikan RKAT hanya 79% dan RKJM 66%.
- (2) Paling banyak 59% sekolah/madrasah memiliki RKAT yang memuat semua elemen yang disyaratkan dalam Standar Pengelolaan
- (3) Sekolah/madrasah dalam menyusun RKJM atau RKAT, melibatkan dewan guru dan komite sekolah/madrasah pada awal proses penyusunan dan hanya sedikit yang melibatkannya pada proses dan akhir penyusunan, sehingga masih ada (lebih dari 35%) sekolah/madrasah yang belum memenuhi standar dalam penyusunan RKJM dan RKAT. Dalam penetapan RKJM dan RKAT sebagian Sekolah/madrasah (lebih dari 60%) mendapat pertimbangan komite Sekolah/madrasah dan disetujui dalam rapat dewan guru serta disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan/kantor kementerian agama.
- (4) Belum semua kepala sekolah/madrasah (23%) mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan sekolah/madrasah kepada rapat dewan guru maupun rapat komite sekolah/madrasah. Hal ini menunjukkan adanya kepala sekolah/madrasah yang kurang perhatian dalam memberikan laporan atau pertanggung-jawaban terhadap semua rencana kerja, rencana anggaran kerja, hasil kerja

maupun penggunaan anggaran kerja.

- (5) Terdapat 49% sekolah/madrasah yang memiliki dokumen Sistem Informasi Manajemen dan dokumen program pengawasan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan ketersediaan dokumen hasil evaluasi diri. Sekolah/madrasah yang menggunakan petunjuk pelaksanaan operasional pengawasan dan evaluasi diri baru mencapai 65%.
- (6) Sebagian besar sekolah/madrasah (97%) telah menggunakan dokumen evaluasi diri untuk mengevaluasi Program Kerja Tahunan pada akhir tahun anggaran. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, perbaikan kegiatan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, evaluasi Proses Pembelajaran, dan evaluasi Program Kerja Tahunan dalam rangka pencapaian RKAT.
- (7) Terdapat 63% sekolah/madrasah yang melakukan evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan dalam bertugas, meliputi pendayagunaan pendidik dan tenaga pendidikan melalui evaluasi kesesuaian tugas dan keahlian, keseimbangan beban kerja, kinerja pendidik berdasarkan pencapaian prestasi dan perubahan perilaku siswa, dan evaluasi kinerja pendidik dalam melaksanakan tugas.

6 | Tim Ahli

Pelaksana pemantauan terdiri dari anggota BSNP dan tim ahli yang bersifat ad hoc, dua table berikut ini merupakan anggota tim pemantauan.

Tabel. Anggota BSNP dalam Pemantauan Standar

NO	NAMA	INSTANSI	ASAL
1	Prof. Dr. Ir. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc.	IPB	Bogor
2	Prof. Dr. Djemari Mardapi	UNY	Yogyakarta
3	Prof. Dr. Edy Tri Baskoro	ITB	Bandung
4	Prof. Dr. Furqon	UPI	Bandung
5	Prof. Dr. Djaali	UNJ	Jakarta
6	Prof. Dr.dr. Farid Anfasa Moeloek, Sp.OG.	-	Jakarta
7	Dr. Teuku Ramli Zakaria	-	Jakarta
8	Pdt. Weinata Sairin	-	Jakarta

Tim Pemantauan Standar

NO.	NAMA	INSTANSI	ASAL
1	Prof. Dr. Bambang Soehendro	UGM	Yogyakarta
2	Dr. Sisworo	UM	Malang
3	Prof. Dr. A. Azis Wahab, MA (M.Ed)	UPI	Bandung
4	Dra. Samitha D. Djajanti	ITB	Bandung
5	Prof. Dr. H. Achmad Slamet, M.Si.	UNNES	Semarang
6	Dr. Mardjohan	UNP	Padang
7	Dr. Made Gede Wirakusuma, SE, M.Si.	UNUD	Bali
8	Ir. Pudji Muljono, M.Si.	IPB	Bogor
9	Prof. Dr. H. Achmad Syahrani, Apt.,M.S.	UNAIR	Surabaya
10	Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA	UNHAS	Sulsel
11	Drs. Ahmad Ridwan, M.si.	UNJ	Jakarta
12	Dr. Dadan Rosana, M.Si.	UNY	Yogyakarta
13	Dr. Kiki Yulianti	UNSRI	Palembang
14	Dr. Suharsono, M.M., M.Pd.	STBA PERTIWI	Jakarta
15	Dr. Irwan Baadillah, M.Pd.	UHAMKA	Jakarta
16	Dr. Prihat Assih, M.Si., Ak.	UNMER	Malang
17	Prof. Dr. R. Urip Purwono, M.Sc., Ph.D.	UNPAD	Bandung
18	Prof. Dr. M. Salman	ITB	Bandung
19	Dr. Sumarno, M.Pd.	UNIMED	Medan
20	Arif Rifai Dwiyanto, S.T	-	Jakarta

7 | Hambatan, Permasalahan, dan Saran

Terdapat cukup banyak aspek di dalam 4 standar yang dipantau, sehingga item di dalam instrumen pemantauan juga cukup banyak meskipun sudah dipilih aspek-aspek yang utama. Hal tersebut membuat proses wawancara membutuhkan waktu yang cukup lama, selain itu, tidak mudah mencari surveyor dan pendamping yang dapat memahami 4 standar tersebut dengan baik. Oleh karena itu, pada kegiatan pemantauan berikutnya sebaiknya standar-standar tidak dipantau secara bersamaan, atau apabila sumberdayanya memungkinkan bisa dilaksanakan oleh tim yang berbeda secara parallel, artinya diperlukan tim dan dana yang lebih besar.

Dengan metode wawancara, tidak mudah untuk mengisi instrumen untuk responden kepala dinas kementerian pendidikan nasional kabupaten/kota dan provinsi, demikian pula untuk kepala kantor dan kantor wilayah kementerian agama. Untuk pemantauan berikutnya perlu dicarikan mekanisme yang lain agar data yang diharapkan dari responden-responden tersebut dapat dikumpulkan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam tahapan pemantauan ini tidak terdapat kegiatan entry data, padahal kegiatan tersebut memerlukan waktu dan tenaga yang cukup banyak, dengan demikian penambahan langkah entry data untuk kegiatan pemantauan berikutnya merupakan suatu keharusan.

Berdasarkan hasil pemantauan implementasi Standar Sarana dan Prasarana, Proses, Penilaian, dan pengelolaan, dipaparkan beberapa **Rekomendasi** sebagai berikut.

- (1) Ketersediaan dokumen standar di sekolah/madrasah perlu ditingkatkan hingga mencapai angka ideal 100%. Dinas pendidikan kabupaten/kota seyogyanya bertanggung Jawab terhadap ketersediaan dokumen standar di sekolah, pengawas dapat lebih diberdayakan untuk keperluan tersebut.

- (2) Perlu dilakukan sosialisasi tentang standar sarana prasarana. Penekanankhususperlu dilakukandalamhalpemahaman tentang perlunya mempunyai IMB bagi bangunan satuan pendidikan dan proses pengurusan IMB, serta tentang kesamaan hak atas pendidikan, pengadaan akses dan fasilitas untuk penyandang cacat. Khusus untuk sekolah yang menjalankan program inklusi, pemenuhan akses dan fasilitas untuk penyandang cacat harus menjadi prioritas.
- (3) Kebutuhan paling dasar dalam proses pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar adalah ruang kelas dan perpustakaan dan pada jenjang pendidikan menengah ditambah dengan ruang laboratorium. Karena itu, keterpenuhan kebutuhan paling dasar ini baik prasarana maupun sarananya harus segera dipenuhi.
- (4) Pemerintah perlu mendorong pengelola satuan pendidikan untuk menggunakan bangunan permanen, minimal kelas B sebagaimana disebutkan dalam standar, guna menjaga keamanan bangunan bagi pengguna. Selain itu, mengingat masih besarnya prosentase satuan pendidikan yang bangunannya berpotensi mencelakakan, bangunan yang rusak harus segera diperbaiki.
- (5) Ketersediaan dan kecukupan listrik perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat semakin banyaknya piranti pendidikan yang memerlukan listrik. Kecukupan air bersih dan jamban merupakan syarat pencapaian kesehatan sehingga perlu dipenuhi.
- (6) Guru perlu diberi pelatihan dan pendampingan secara intensif tentang pengembangan KTSP dan silabus mata pelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing.
- (7) Dinas pendidikan, baik pada tingkat propinsi maupun kabupaten/kota perlu melakukan supervisi akademik yang intensif dalam hal pengembangan KTSP untuk mendorong kepala sekolah bertanggung jawab dalam pengembangan KTSP sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing.

- (8) Kepala sekolah/madrasah dan guru perlu didorong untuk mengembangkan RPP secara mandiri sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan RPP menurut standar proses.
- (9) Pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu meningkatkan upaya-upaya pembangunan ruang kelas baru untuk memenuhi syarat jumlah siswa maksimal untuk setiap rombongan belajar.
- (10) Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya perlu melakukan upaya untuk mengoptimalkan beban kerja minimal guru 24 jam tatap muka per minggu.
- (11) Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pengadaan buku teks pelajaran dan memperluas akses buku sekolah elektronik untuk digunakan sebagai sumber belajar di sekolah supaya rasio buku dengan peserta didik sesuai dengan standar.
- (12) Kepala sekolah/madrasah dan dinas pendidikan perlu melakukan pengawasan secara komprehensif dan berkelanjutan agar pelaksanaan pertemuan tatap muka dan pembahasan materi yang terdapat dalam RPP tersebut dapat direalisasikan secara penuh oleh semua guru di semua sekolah.
- (13) Satuan pendidikan perlu mendorong semua guru untuk menyampaikan silabus kepada siswa pada awal semester mencakup pokok-pokok materi yang akan diajarkan, tujuan pembelajaran, dan teknik penilaian.
- (14) Perlu ada upaya yang efektif dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan dan motivasi guru untuk mengembangkan sendiri indikator pencapaian KD mata pelajaran yang diampunya.
- (15) Satuan pendidikan perlu memastikan bahwa semua guru membuat kisi-kisi soal untuk UTS, UAS, dan ulangan harian.
- (16) Perlu disusun kisi-kisi soal secara nasional untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam UN.
- (17) Perlu diupayakan agar satuan pendidikan dapat menyusun kisi-kisi, format penilaian dan mekanisme yang lebih rinci untuk pelaporan penilaian kepribadian dan akhlak siswa, baik sebagai ba-

- gian proses pembelajaran maupun pada saat kelulusan siswa.
- (18) Perlu diupayakan peningkatan kemampuan dan komitmen guru agar dapat lebih banyak menggunakan teknik penilaian selain tes dan tugas.
 - (19) Satuan pendidikan perlu berupaya secara efektif untuk meningkatkan pemanfaatan hasil penilaian dan analisis butir soal untuk perbaikan pembelajaran.
 - (20) Pemahaman dan kemampuan guru tentang pelaksanaan remedi perlu ditingkatkan agar guru tidak hanya melakukan tes ulang sebagai pelaksanaan remedi dan mampu melaksanakan remedi secara benar untuk mencapai tujuan remedi.
 - (21) Perlu diterapkan mekanisme yang baik untuk memastikan bahwa satuan pendidikan menerima laporan hasil analisis daya serap UN dan menggunakannya untuk merencanakan peningkatan kualitas pembelajaran.
 - (22) Dinas Pendidikan Nasional pada berbagai jenjang perlu mengupayakan agar satuan pendidikan secara konsisten meningkatkan pemanfaatan hasil UN untuk seleksi siswa baru, perbaikan proses pembelajaran, dan pemetaan mutu.
 - (23) Sekolah/madrasah perlu didorong untuk menyusun RKAT dan RKJM sekaligus perlu dibantu dalam penyusunan RKAT yang sesuai dengan Standar Proses.
 - (24) Sekolah/madrasah masih perlu mengupayakan pedoman mengenai struktur organisasi disertai deskripsi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk konselor, wakil kepala sekolah, dan staf administrasi.
 - (25) Sekolah/madrasah perlu berupaya mengoptimalkan ketersediaan dokumen SIM, program pengawasan, dan hasil evaluasi diri sesuai yang ditetapkan dalam standar.
 - (26) Sekolah/madrasah perlu meningkatkan penggunaan dokumen evaluasi diri dalam evaluasi program kerja tahunan pada akhir tahun untuk menilai pencapaian RKAT.

- (27) Sekolah/madrasah perlu mengembangkan SIM untuk mendukung administrasi pendidikan, dan ketersediaan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses, dengan menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk menyediakan informasi berkaitan dengan pengelolaan sekolah/madrasah, melaporkan data informasi sekolah/madrasah kepada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama, serta berkomunikasi antar warga sekolah/madrasah dengan lingkungan sekolah/madrasah.
- (28) Perlu adanya aturan mengenai mekanisme dan prosedur pengumpulan data tentang pencapaian Standar Nasional Pendidikan, dari tingkat satuan pendidikan, pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi, serta pendidikan nasional.
- (29) Perlu adanya kesepakatan tentang indikator pencapaian SNP yang bisa digunakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan kementerian pendidikan nasional dan BSNP.



EVALUASI IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Badan Standar Nasional Pendidikan



Delegasi AusAid beraudiensi dengan anggota BSNP tentang standar nasional pendidikan

BAB 8 EVALUASI IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan

1 | Pendahuluan

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk menyempurnakan standar nasional pendidikan maka diperlukan informasi implementasi standar nasional pendidikan di satuan pendidikan. Untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi standar nasional pendidikan perlu dilakukan evaluasi terhadap sejauh mana standar nasional pendidikan di satuan pendidikan.

Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Selanjutnya pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional

Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Pada pasal 2 ayat (3) menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Selanjutnya dalam pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.

Sesuai dengan tugas dan kewenangan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional, BSNP perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi dan ketepatan standar nasional pendidikan di satuan pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hambatan dan dukungan terhadap implementasi standar nasional pendidikan. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan semua standar yang telah dikembangkan oleh BSNP.

2 | Tujuan dan Manfaat

Evaluasi implementasi standar nasional pendidikan bertujuan untuk mengetahui sejauhmana implementasi standar nasional pendidikan pada pendidikan formal yang dikembangkan BSNP dan telah menjadi Peraturan Menteri. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk menyusun rekomendasi penyempurnaan standar nasional pendidikan khususnya Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas).

3 | Tim ahli

a. Anggota BSNP

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Instansi	No. HP
1.	Prof. Dr. Furqon	Koordinator	UPI Bandung	0812 2374 875
2.	Dr. Teuku Ramli Zakaria, MA	Anggota	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	0812 9626 494
3.	Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd.Kons.	Anggota	Unnes Semarang	0815 6610 531
4.	Prof. Dr. Edy Tri Baskoro	Anggota	ITB Bandung	0812 2358 976
5.	Prof. Dr. Djaali	Anggota	UNJ Jakarta	0816 1863 927
6.	Prof. Dr. Djemari Mardapi	Anggota	UNY Yogyakarta	0812 2952 895
7.	Prof. Dr. Ir. Moehammad Aman Wirakartakusumah	Anggota	IPB Bogor	0816 792 197
8.	Prof. Dr. Johannes Gunawan	Anggota	Universitas Parahyangan Bandung	816 015

b. Tim Ahli

No	Nama	Jabatan dalam tim	Instansi	Nomor HP/ Email address
1	Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis	Ketua	UI Jakarta	08129277594 lola.aswin@yahoo.com
2	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf	Wakil Ketua	UIN Jakarta	08129403146 yusufyunan@yahoo.com
3	Drs. Kaharuddin Arafah, M.Si	Sekretaris	UNM Makassar	081398567766 eltigakahar@yahoo.com
4	Prof. Dr. Asmadi Asla	Anggota	UGM Yogyakarta	08122943804 asmalsa@ugm.ac.id
5	Dr. Wasis	Anggota	UNESA Surabaya	08121718941 wasisfaa@yahoo.com

No	Nama	Jabatan dalam tim	Instansi	Nomor HP/ Email address
6	Dr. Badrun	Anggota	UNY Yogyakarta	08122781548 badrunkw@yahoo.com
7	Prof. Dr. Wayan Maba	Anggota	UNMAS Denpasar Bali	08123663158 direktur@ pasca.unmas.ac.id
8	Dr. Sri Budiarti	Anggota	IPB Bogor	s_budiarti@yahoo.com
9	Prof. Dr. M.Sidin Ali	Anggota	UNM Makassar	081242555666 sidinali@ ymail.com
10	Drs. Muchtar Abdul Karim, MA	Anggota	UM Malang	081334798225 mukarimma@yahoo.com
11	Dr. Syafrizal Sy	Anggota	UNAND Padang	081371829327 syafrizalsy@gmail.com
12	Dr. Adi Rahmat	Anggota	UPI Bandung	08122045702 adirahmat@yahoo.com
13	Dr. Asep Saefuddin	Anggota	IPB Bogor	0811119287 asaefuddin@gmail.com
14	Drs. Komarudin, M.Si	Anggota	UNJ Jakarta	08128421953 komarudinsahid@yahoo. com
15	Dr. Sony Warsono	Anggota	UGM Yogyakarta	08179423068 swarsono@ feb.ugm.ac.id
16	Prof. Dr Pujiati Suyata	Anggota	UNY Yogyakarta	08122961280 pujiati_ suyata@uny.ac.id
17	Prof. Dr. Ali Saukah	Anggota	UM Malang	08123393189 alisaukah@ yahoo.com
18	Dr. Sri Hayati	Anggota	UPI Bandung	0811239914
19	Prof. Dr. Djoko Suryo	Anggota	UGM Yogyakarta	0811256229 djoko98@ yahoo.com

4 | Tahapan Kegiatan

Langkah-langkah penyusunan instrumen pemilihan dan instrumen penilaian BTP untuk peserta didik berkebutuhan khusus sebagai berikut.

- a. Menetapkan tim ahli yang bersifat adhoc.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan oleh BSNP seperti berikut ini:
 - (1) Penyusunan Desain

Kegiatan penyusunan desain dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 26 – 28 Februari 2010 dengan tujuan untuk merumuskan draf desain kegiatan evaluasi yang akan digunakan. Pada hari pertama dilakukan perkenalan antar tim dan antara tim dengan anggota BSNP. Setelah itu dilakukan *brainstorming* tentang evaluasi implementasi standar. Pada hari itu juga dilakukan pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris tim yang akan memimpin sidang pada pertemuan selanjutnya. Hari kedua dan ketiga dilakukan penelaahan dokumen SI dan SKL. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota BSNP dan anggota tim. Pada akhir pertemuan ini, dirumuskan jadwal kegiatan evaluasi implementasi SI dan SKL selama 8 (delapan) kali pertemuan berikutnya.
 - (2) Kajian Bahan Dasar

Kajian bahan dasar dilaksanakan pada tanggal 27 – 29 Maret 2010 di Jakarta yang dihadiri oleh anggota BSNP bersama dengan tim ahli. Tujuan kegiatan ini adalah untuk merumuskan isu-isu pokok tentang hasil pemantauan SI dan SKL serta dokumen lain yang merupakan penunjang untuk merumuskan draf rancangan evaluasi yang akan dilakukan. Pada pertemuan ini dilakukan juga pembahasan hasil pemantauan SKL dan SI serta dokumen lain yang relevan dan perumusan isu-isu pokok hasil pembahasan.
 - (3) Penyusunan Draft Instrumen

Kegiatan penyusunan draft instrumen evaluasi dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 9 – 11 April 2010, dengan tujuan untuk merumuskan draft instrumen evaluasi imple-

mentasi SI dan SKL. Untuk itu pada hari pertama dilakukan diskusi yang dilanjutkan dengan kerja kelompok untuk merumuskan rancangan metode dan instrumen pengumpulan data. Hari kedua dan ketiga diadakan kerja kelompok untuk menyusun kisi-kisi dan draf instrumen evaluasi implementasi SI dan SKL. Kegiatan ini diikuti anggota BSNP dan seluruh anggota tim ahli serta didukung oleh staf sekretariat BSNP. Pada akhir pertemuan ditentukan juga calon peserta yang akan diundang pada pertemuan berikutnya untuk merevisi draf instrumen yang telah dirumuskan oleh tim ahli.

(4) Reviu dan Perbaikan Draft Instrumen

Draf instrumen yang telah dikembangkan oleh tim ahli selanjutnya direviu oleh para ahli yang diundang oleh BSNP. Para ahli ini terdiri atas pengembang SI dan SKL, ahli mata pelajaran, dan ahli psikometri. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 April – 2 Mei 2010. Pada hari kedua, anggota tim ahli mendiskusikan hasil reviu para pakar dan hasil diskusi ini dijadikan bahan untuk menyempurnakan instrumen untuk uji coba lapangan.

(5) Uji Coba Instrumen

Untuk melihat sejauhmana instrumen yang telah dikembangkan tim ahli dapat menjangkau informasi yang dibutuhkan dalam evaluasi implementasi SI dan SKL, dilakukan uji coba instrumen. Kegiatan uji coba instrumen dilaksanakan pada tanggal 17 – 22 Mei 2010 di 5 (lima) provinsi, yaitu: Jawa Barat, Daerah Istimewah Yogyakarta, Nangroeh Aceh Darussalam, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini diikuti oleh dua orang anggota tim yang didukung oleh satu orang staf sekretariat BSNP dan satu orang staf keuangan BSNP.

- (6) **Analisis Hasil Uji Coba dan Perbaikan Instrumen**
Kegiatan analisis hasil uji coba dan perbaikan instrumen dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 Juni 2010 di Jakarta yang dihadiri oleh anggota BSNP dan anggota tim ahli. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menganalisis hasil uji coba di masing-masing Provinsi, laporan hasil uji coba di masing-masing provinsi serta perbaikan instrumen. Instrumen yang telah disempurnakan berdasarkan masukan pada uji coba lapangan, selanjutnya dijadikan alat pengumpul data untuk evaluasi implementasi SI dan SKL.

- (7) **Evaluasi Implementasi Standar**
Kegiatan evaluasi implementasi standar bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai implementasi SI dan SKL pada satuan pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan di 5 (lima) provinsi dengan dua tahap yaitu: pengumpulan data di provinsi Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan pada tanggal 4 – 8 Juli 2010. Kegiatan pengumpulan data di provinsi Lampung dan Kalimantan Barat pada tanggal 19 – 24 Juli 2010. Setiap provinsi, tim pengumpul data terdiri atas 4 orang yaitu: 2 (dua) orang anggota tim ahli, satu orang staf sekretariat BSNP, dan satu orang staf keuangan BSNP.

- (8) **Analisis Hasil Evaluasi (30 Juli – 1 Agustus 2010)**
Kegiatan analisis hasil evaluasi dilaksanakan pada tanggal 30 Juli – 1 Agustus 2010 di Jakarta yang dihadiri oleh anggota BSNP dan anggota tim ahli. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menganalisis hasil evaluasi pada masing-masing provinsi dan interpretasi hasil evaluasi. Anggota tim ahli dibagi atas empat kelompok untuk menginterpretasi data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dibuat draf laporan evaluasi implementasi SI dan SKL.

- (9) Penyusunan Laporan dan Rekomendasi
 Pertemuan terakhir anggota tim dengan anggota BSNP bertujuan untuk menyusun laporan dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20 – 22 Agustus 2010.

Secara ringkas kegiatan evaluasi implementasi SI dan SKL disajikan dalam tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Tempat	Tanggal	Target
1	Penyusunan desain	Jakarta	26 – 28 Februari 2010	Desain evaluasi
2	Kajian bahan dasar	Jakarta	27 – 29 Maret 2010	Rancangan draf instrumen
3	Penyusunan draf instrumen	Jakarta	9 – 11 April 2010	Draf instrumen
4	Reviu dan perbaikan draf instrumen	Jakarta	30 April – 2 Mei 2010	Draf instrumen yang siap diujicoba
5	Uji coba instrumen	Jawa Barat, DIY, NAD, Kalteng, Sultra	17 – 22 Mei 2010	Masukan pakar untuk perbaikan instrumen
6	Analisis hasil uji coba dan perbaikan instrumen	Jakarta	12 – 14 Juni 2010	Instrumen yang telah disempurnakan
7	Evaluasi implementasi standar	Banten, Jatim Sulsel Lampung, Kalbar	4 – 8 Juli 2010 19 – 24 Juli 2010	Pengumpulan data
8	Analisis hasil evaluasi	Jakarta	30 Juli – 1 Agustus 2010	Data hasil evaluasi implementasi SI SKL
9	Penyusunan laporan dan rekomendasi	Jakarta	20 – 22 Agustus 2010	Laporan dan rekomendasi

5 | Hasil yang Diperoleh

Kegiatan evaluasi implementasi SI dan SKL pada satuan pendidikan menghasilkan satu dokumen berupa laporan implementasi SI dan SKL pada satuan pendidikan dan rekomendasi perbaikan SI dan SKL.

6 | Refleksi

Kegiatan evaluasi implementasi SI dan SKL berjalan dengan lancar walau terdapat beberapa kendala antara berupa: terbatasnya langkah kegiatan, terbatasnya daerah uji coba instrumen, serta terbatasnya daerah yang menjadi sasaran pengumpulan data dalam rangka evaluasi implementasi standar. Untuk itu, dalam kegiatan evaluasi implementasi standar nasional yang lain pada masa yang akan datang, sebaiknya:

- a. Langkah kegiatan diperbanyak atau kegiatan pengembangan instrumen evaluasi dipisah dengan kegiatan pengumpulan data untuk evaluasi implementasi standar
- b. Jumlah daerah sasaran pengumpulan data diperbanyak, jika memungkinkan seluruh provinsi dijadikan sasaran untuk pengumpulan data evaluasi implementasi standar.



**PENGEMBANGAN
INSTRUMEN MODIFIKASI
BUKU TEKS PELAJARAN
PESERTA DIDIK
BERKEBUTUHAN KHUSUS**

Badan Standar Nasional Pendidikan



BAB 9 PENGEMBANGAN INSTRUMEN MODIFIKASI BUKU TEKS PELAJARAN PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS

1 | Pendahuluan

Dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan pasal tersebut, diperlukan buku teks pembelajaran sebagai penunjang pembelajaran. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pasal 43 ayat (4) yang menyatakan bahwa standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik. Lebih lanjut dalam Pasal 43 ayat (5) dinyatakan bahwa Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Untuk memenuhi maksud di atas, sejak tahun 2006 BSNP telah mengembangkan instrumen penilaian Buku Teks Pelajaran (BTP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Instrumen penilaian BTP ini selanjutnya digunakan sebagai alat untuk menilai BTP yang penggunaannya dimulai pada akhir tahun 2006. Dalam melakukan

penilaian BTP, BSNP telah bekerjasama dengan Pusat Perbukuan (Pusbuk) Kemdiknas.

BTP yang telah dinilai dan dinyatakan layak oleh BSNP selanjutnya ditetapkan kelayakannya oleh Mendiknas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas). BTP yang telah ditetapkan melalui Permendiknas, sebagian telah dibeli hak ciptanya oleh Pemerintah dan telah digandakan dalam bentuk buku Sekolah elektronik (bse), sebagiannya lagi digandakan oleh penerbit.

BTP tersebut selain dapat dimanfaatkan oleh peserta didik pada Sekolah/madrasah umum, juga dapat dimanfaatkan oleh anak berkebutuhan khusus setelah melalui proses modifikasi. Bagian BTP yang harus mengalami modifikasi sangat bergantung kepada jenis kebutuhan peserta didik yang akan memanfaatkannya.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu dilakukan pemilihan dan pemodifikasian BTP yang telah dinyatakan layak oleh BSNP untuk memenuhi kebutuhan BTP peserta didik berkebutuhan Khusus.

2 | Tujuan dan Manfaat

Kegiatan pengembangan instrumen pemilihan dan penilaian BTP untuk peserta didik berkebutuhan khusus bertujuan untuk menghasilkan instrumen yang dapat dipergunakan untuk:

- a. memilih BTP yang telah dinyatakan layak oleh BSNP dan telah ditetapkan melalui Permendiknas agar dapat digunakan dalam proses belajar oleh peserta didik: tuna netra; tuna rungu; tuna laras; dan tuna daksa ringan.
- b. menjadi panduan bagi calon pemodifikasi BTP yang dapat digunakan dalam proses belajar oleh peserta didik: tuna netra; tuna rungu; tuna laras; dan tuna daksa ringan.
- c. menilai BTP hasil modifikasi yang dapat digunakan dalam proses

belajar oleh peserta didik: tuna netra; tuna rungu; tuna laras; dan tuna daksa ringan.

Manfaat instrumen penilaian BTP untuk peserta didik berkebutuhan khusus adalah diperolehnya alat penilaian BTP yang terstandar dan dapat dipergunakan untuk menilai BTP untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang memenuhi kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikaan.

3 | Tim ahli

1. Anggota BSNP

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Instansi	No. HP
1.	Pdt. Weinata Sairin	Penanggung jawab	Lembaga Alkitab Indonesia	0813 1711 7699
2.	Prof. Dr. Richardus Eko Indrajit	Sekretaris	ABFI Institute Perbanas	0818 925 926
3.	Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd.Kons.	Anggota	Unnes Semarang	0815 6610 531
4.	Prof. Dr. Edy Tri Baskoro	Anggota	ITB Bandung	0812 2358 976
5.	Prof. Dr. Djaali	Anggota	UNJ Jakarta	0816 1863 927
6.	Prof. Dr. Djemari Mardapi	Anggota	UNY Yogyakarta	0812 2952 895
7.	Prof. Dr. Ir. Moehammad Aman Wirakartakusumah, M.Sc.	Anggota	IPB Bogor	0816 792 197

2. Tim Ahli

No	Nama	Jabatan dalam tim	Instansi	Mata Pelajaran	Nomor HP/ Email address
1	Dr. M. Syaifudin	Ketua	UMM Malang	Psikometri	08123253034 mfud03@yahoo.com.au
2	Dr. Asep Supena, M.Si.	Anggota	UNJ Jakarta	Tuna Rungu	supena2007@yahoo.com
3	Dr. Triyanto Pristiwaluyo	Anggota	UNM Makassar	Tuna Daksa Ringan	081510375693 mastrie_mr@yahoo.com

4	Dra. Endang Supartini, M.Pd.	Anggota	UNY Yogyakarta	Tuna Laras	galuh_kapudaga@yahoo.com
5	Drs. H. Munawir Yusuf, M.Psi.	Anggota	UNS Surakarta	Tuna Laras	munawir_uns@yahoo.co.id
6	Dr. Djadja Raharja, M.Pd	Anggota	UPI Bandung	Tuna Netra	djadja.rahardja@yahoo.com
7	Drs. Kaharuddin Arafah, M.Si	Anggota	UNM Makassar	Psikometri	081398567766 eltigakahar@yahoo.com

4 Tahapan Kegiatan

Langkah-langkah penyusunan instrumen pemilihan dan instrumen penilaian BTP untuk peserta didik berkebutuhan khusus sebagai berikut.

- a. Menetapkan tim ahli yang terdiri atas ahli materi/pembelajaran mata pelajaran, dan ahli psikometri.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan oleh BSNP seperti berikut ini:

- 1) Temu Awal, Kajian Bahan Dasar dan Penyusunan Desain Instrumen

Kegiatan ini dilaksanakan di hotel Golden Boutique Melawai Jakarta Selatan pada tanggal 2 – 3 Mei 2010 yang dihadiri oleh koordinator tim dan 6 orang anggota BSNP, Kepala Pusat Perbukuan, Kabid Bangnas Daltuku Pusat Perbukuan, Kasubbid Daltuku, 7 orang anggota tim ahli, dan staf teknis Pusbuk.

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan kerangka Naskah Akademik (NA) dan draf awal pengembangan instrumen penilaian BTP SDLB, SMPLB dan SMALB. Untuk mencapai tujuan tersebut, tim ahli melakukan *brainstorming* tentang jenis buku yang ingin dimodifikasi, mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran terkait, serta contoh instrumen penilaian buku teks pelajaran yang telah

dikembangkan BSNP pada tahun sebelumnya.

- 2) **Penyusunan Kriteria Pemilihan BTP**
Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Golden Boutique Jakarta pada tanggal 14 – 16 Mei 2010 dengan tujuan untuk menyusun kriteria pemilihan BTP yang telah ditetapkan melalui Permendiknas agar dapat digunakan oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, akan dikembangkan juga rambu-rambu yang modifikasi. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota BSNP, tim ahli, Pimpinan dan staf teknik Pusbuk Kemdiknas.

- 3) **Penyempurnaan Instrumen Pemilihan, Pemodelifkasion dan Penilaian BTP**
Penyempurnaan instrumen pemilihan BTP, rambu-rambu modifikasi dan instrumen penilaian BTP hasil modifikasi dilaksanakan di Hotel Grand Tropic Jakarta Barat pada tanggal 23 – 25 Mei 2010. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyempurnakan draf instrumen pemilihan BTP, rambu-rambu modifikasi dan instrumen penilaian BTP hasil modifikasi yang dihasilkan pada pertemuan sebelumnya. Instrumen ini akan divalidasi oleh para pakar PLB pada pertemuan Selanjutnya. Sehubungan dengan hal ini, pada pertemuan ini dihasilkan juga daftar nama-nama calon validator serta jadwal pelaksanaan validasi instrumen. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota BSNP, tim ahli, Pimpinan serta staf teknis Pusbuk Kemdiknas.

- 4) **Validasi Draf Instrumen Pemilihan, Pemodelifkasion dan Penilaian BTP**
Validasi draf instrumen dilaksanakan tanggal 12 -13 Juni 2010 di Jakarta dengan tujuan untuk mendapatkan masukan berupa tingkat keterbacaan masing-masing butir dan deskripsi instrumen dari para ahli pembelajaran, ahli materi, dan guru masing-

masing mata pelajaran dan jenis ketunaan (tuna netra, tuna rungu, tuna laras, dan tuna daksa ringan). Kegiatan ini dihadiri oleh anggota BSNP, tim ahli, Pimpinan serta staf teknis Pusbuk Kemdiknas

5) Finalisasi Instrumen Pemilihan, Pemodelan dan Penilaian BTP

Instrumen yang telah divalidasi pada pertemuan sebelumnya kemudian sempurnakan oleh tim ahli berdasarkan masukan para validator. Selanjutnya instrumen tersebut diplenokan di hadapan anggota BSNP dan difinalkan berdasarkan masukan anggota BSNP. Instrumen hasil penyempurnaan melalui pleno kemudian disahkan oleh BSNP sebagai tanda bahwa instrumen tersebut telah sah untuk digunakan menilai BTP PLB dan siap untuk disosialisasikan kepada penerbit dan calon penulis. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 – 28 Juni 2010 di hotel Golden Boutique Melawai Jakarta Selatan yang dihadiri oleh anggota BSNP, tim ahli, dan staf Pusbuk.

6) Persiapan Sosialisasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 - 30 November 2010 di hotel Mega Anggrek Jakarta Barat yang dihadiri oleh anggota BSNP, tim ahli, dan staf Pusbuk. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan bahan sosialisasi beserta instrumen yang siap disosialisasikan kepada para Penerbit dan calon pemodifikasi BTP di lima Provinsi.

Secara ringkas kegiatan pengembangan instrumen penilaian BTP PLB disajikan dalam tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Tempat	Tanggal	Target
1	Temu Awal, Kajian Bahan Dasar dan Penyusunan Desain Instrumen	Hotel Golden Boutique Melawai Jaksel	2 – 3 Mei 2010	Kerangka naskah akademik dan kerangka instrumen
2	Penyusunan kriteria pemilihan BTP	Hotel Grand Tropic Jakbar	14 – 16 Mei 2010	Kriteria Pemilihan BTP PLB
3	Penyempurnaan draf instrumen pemilihan, pemodifikasian dan penilaian BTP	Hotel Grand Tropic Jakbar	23 – 25 Mei 2010	Draf Instrumen Pemilihan, Pemodifikasian dan Penilaian BTP
4	Validasi draf instrumen pemilihan, pemodifikasian dan penilaian BTP	Hotel Golden Boutique Melawai Jaksel	12 -13 Juni 2010	Data penyempurnaan draf Instrumen Pemilihan, Pemodifikasian dan Penilaian BTP
5	Finalisasi instrumen pemilihan, pemodifikasian dan penilaian BTP	Hotel Golden Boutique Melawai Jaksel	26 – 28 Juni 2010	Instrumen Final untuk Pemilihan, Pemodifikasian dan Penilaian BTP
6	Persiapan sosialisasi instrumen pemilihan, pemodifikasian dan penilaian BTP	Hotel Mega Anggrek Jakbar	29 - 30 Nov 2010	Daerah sosialisasi, peserta sosialisasi dan tim sosialisasi

5 Hasil yang Diperoleh

Kegiatan pengembangan instrumen penilaian BTP peserta didik berkebutuhan khusus menghasilkan dokumen berupa:

- a. Naskah akademik penyusunan instrumen pemilihan, pemodifikasian, dan penilaian BTP PLB.
- b. Instrumen pemilihan, rambu-rambu pemodifikasian, dan instrumen penilaian BTP PLB. Rincian instrumen yang dihasilkan dalam kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:
 - (1) Instrumen pemilihan BTP Tuna Netra SDLB, SMPLB dan SMALB
 - (2) Rambu-rambu pemodifikasian BTP Tuna Netra SDLB, SMPLB dan SMALB

- (3) Instrumen penilaian hasil modifikasi BTP Tuna Netra SDLB, SMPLB dan SMALB
- (4) Instrumen pemilihan BTP Tuna Rungu SDLB, SMPLB dan SMALB
- (5) Rambu-rambu pemodifikasian BTP Tuna Rungu SDLB, SMPLB dan SMALB
- (6) Instrumen penilaian hasil modifikasi BTP Tuna Rungu SDLB, SMPLB dan SMALB
- (7) Instrumen pemilihan BTP Tuna Laras SDLB, SMPLB dan SMALB
- (8) Rambu-rambu pemodifikasian BTP Tuna Laras SDLB, SMPLB dan SMALB
- (9) Instrumen penilaian hasil modifikasi BTP Tuna Rungu SDLB, SMPLB dan SMALB
- (10) Instrumen pemilihan BTP Tuna Daksa Ringan SDLB, SMPLB dan SMALB
- (11) Rambu-rambu pemodifikasian BTP Tuna Daksa Ringan SDLB, SMPLB dan SMALB
- (12) Instrumen penilaian hasil modifikasi BTP Tuna Daksa Ringan SDLB, SMPLB dan SMALB

6 | Refleksi

Dalam penyusunan instrumen penilaian BTP untuk anak berkebutuhan khusus tidak ditemui kendala yang berarti. Namun demikian, dalam pengembangan instrumen ini tidak semua anggota BSNP dapat mengikuti semua tahapan kegiatan ini karena padatnya kegiatan BSNP terutama berkaitan dengan jadwal pengembangan standar dan kegiatan penilaian BTP. Hal ini diduga berdampak pada ketidakmaksimalan diskusi tentang desain pemilihan dan pemodifikasian BTP untuk anak berkebutuhan khusus.



PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TAHUN 2010

Badan Standar Nasional Pendidikan



BAB 10 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TAHUN 2010

A | PENDAHULUAN

Salah satu tugas BSNP adalah menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 67 ayat (1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.

Seperti tahun 2009, untuk tahun 2010 susunan penyelenggara UN terdiri atas Penyelenggara Tingkat Pusat, Penyelenggara Tingkat Provinsi, Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota, dan Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan, Penyelenggara UN disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penyelenggara UN

Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Satuan Pendidikan
1. BSNP	1. Gubernur	1. Bupati/Walikota	1. PT: Pengawas Satuan Pendidikan
2. Depdiknas	2. PTN	2. PT	2. PT: Tim Pemantau
3. MRPTNI	3. Dinas Pend.	3. Dinas Pend.	Independen (TPI)
4. Depag	4. Kanwil Depag	4. Kandepag	

Perguruan Tinggi (PT) berperan serta dalam struktur Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi, yaitu sebagai koordinator penyelenggara pengawas UN di SMA/MA, sedangkan di SMP/MTs, dan SMK PT sebagai Tim Pemantau Independen (TPI). Sebagai koordinator, perguruan

tinggi bertanggung jawab untuk:

- a. membentuk tim kerja UN di tingkat provinsi yang bertugas:
 - 1) menunjuk perguruan tinggi yang bertugas sebagai koordinator pengawas pada kabupaten/ kota di provinsi yang menjadi kewenangannya;
 - 2) menetapkan tata kerja penggandaan dan pendistribusian bahan UN;
 - 3) menetapkan tata kerja pengawasan penyelenggaraan UN;
 - 4) mensosialisasikan pengawasan penyelenggaraan UN;
- b. menjamin objektivitas dan kredibilitas pelaksanaan UN di wilayahnya;
- c. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Departemen Agama dalam penyelenggaraan UN;
- d. menetapkan pengawas satuan pendidikan di setiap sekolah/ madrasah penyelenggara UN;
- e. menetapkan pengawas ruang ujian UN bersama dengan Penyelenggara UN Kabupaten/kota;
- f. menjaga keamanan dan kerahasiaan penggandaan dan pendistribusian bahan UN;
- g. menjaga keamanan dan kerahasiaan LJUN yang sudah diisi oleh peserta UN serta bahan pendukungnya;
- h. melakukan pemindaian LJUN untuk SMA dan MA dengan menggunakan perangkat lunak yang ditetapkan oleh BSNP;
- i. menjamin keamanan dan kerahasiaan proses pemindaian LJUN;
- j. menyerahkan hasil pemindaian LJUN ke Penyelenggara UN Tingkat Pusat;
- k. menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas, dan akuntabilitas pada semua proses di atas;
- l. membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Provinsi untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui BSNP

yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN dan dilengkapi dengan:

- 1) surat keputusan Penyelenggara UN Tingkat Provinsi;
- 2) data sekolah/madrasah penyelenggara UN;
- 3) data ruang ujian tiap sekolah/madrasah;
- 4) data pengawas ruang ujian setiap sekolah/madrasah;

Ada beberapa perbedaan penyelenggaraan UN tahunan pelajaran 2009/2010 dibanding tahun sebelumnya, yaitu adanya ujian ulang, ujian teori kejuruan SMK yang diujinasionalkan, dan peranan perguruan tinggi yang diperluas. Selain itu untuk meningkatkan kredibilitas hasil UN ada penandatanganan **Pakta Integritas** oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Ketua BSNP dengan disaksikan oleh Mendiknas.

B | JADWAL UJIAN

Jadwal UN Utama SMA/MA, SMK, dan SMALB tahun pelajaran 2009/2010 dilaksanakan mulai tanggal 22 sampai dengan 26 Maret 2010 dan UN Ulangan mulai tanggal 10 Mei sampai dengan 14 Mei 2010. Jadwal UN utama dan susulan untuk SMA, MA, SMK, dan SMALB, secara rinci secara berturut-turut disajikan pada Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7.

Tabel 2. Jadwal UN Utama dan Susulan SMA Tahun Pelajaran 2009/2010

No	Hari dan Tanggal	Jam	Mata pelajaran			
			Program IPA	Program IPS	Program Bahasa	Program Keagamaan
1.	UN Utama Senin 22 Maret 2010	08.00– 10.00	Bahasa Indonesia Biologi	Bahasa Indonesia Sisiologi	Bahasa Indonesia Sejarah Budaya/ Antropologi	Bahasa Indonesia Fikih
	UN Susulan Senin 29 Maret 2010	11.00– 13.00				
2.	UN Utama Selasa 23 Maret 2010	08.00– 10.00	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
	UN Susulan Selasa 30 Maret 2010					
3.	UN Utama Rabu, 24 Maret 2010	08.00– 10.00	Matematika	Matematika	Matematika	Matematika
	UN Susulan Rabu 31 Maret 2010					
4.	UN Utama Kamis 25 Maret 2010	08.00– 10.00	Fisika	Geografi	Sastra Indonesia	Hadis
	UN Susulan Kamis 1 April 2010					
5.	UN Utama Jumat, 26 Maret 2010	08.00– 10.00	Kimia	Ekonomi	Bahasa Asing	Tafsir
	UN Susulan Senin, 5 April 2010					

Tabel 3. Jadwal UN Ulangan SMA Tahun Pelajaran 2009/2010

No	Hari dan Tanggal	Jam	Mata pelajaran			
			Program IPA	Program IPS	Program Bahasa	Program Keagamaan
1.	Senin, 10 Mei 2010	08.00 – 10.00 11.00 – 13.00	Bahasa Indonesia Biologi	Bahasa Indonesia Sosiologi	Bahasa Indonesia Sejarah Budaya/ Antropologi	Bahasa Indonesia Fiqih
2.	Selasa, 11 Mei 2010	08.00 – 10.00	Matematika	Matematika	Matematika	Matematika
3.	Rabu, 12 Mei 2010	08.00 – 10.00 11.00 – 13.00	Bahasa Inggris Kimia	Bahasa Inggris Geografi	Bahasa Inggris Bahasa Asing	Bahasa Inggris Tafsir
4.	Jumat, 14 Mei 2010	08.00 – 10.00	Fisika	Ekonomi	Sastra Indonesia	Hadis

Tabel 4. Jadwal UN Utama dan Susulan SMK Tahun Pelajaran 2009/2010

No	Hari dan Tanggal	Jam	Mata pelajaran
1.	UN Utama: Senin, 22 Maret 2010	08.00 – 10.00	Bahasa Indonesia
	UN Susulan: Senin, 29 Maret 2010		
2.	UN Utama: Selasa, 23 Maret 2010	08.00 – 10.00	Bahasa Inggris
	UN Susulan: Selasa, 30 Maret 2010		
3.	UN Utama: Rabu, 24 Maret 2010	08.00 – 10.00	Matematika
	UN Susulan: Rabu, 31 Maret 2010		
4.	UN Utama: Kamis, 25 Maret 2010	08.00-10.00	Teori Kejuruan
	UN Susulan: Kamis, 1 April 2010		

Tabel 5. Jadwal UN Ulangan SMK Tahun Pelajaran 2009/2010

No	Hari dan Tanggal	Jam	Mata Pelajaran
1.	Senin, 10 Mei 2010	08.00 – 10.00	Bahasa Indonesia
2.	Selasa, 11 Mei 2010	08.00 – 10.00	Bahasa Inggris
3.	Rabu, 12 Mei 2010	08.00 – 10.00	Matematika
4.	Jumat, 14 Mei 2010	08.00-10.00	Teori Kejuruan

Tabel 6. Jadwal UN Utama dan Susulan SMALB Tahun Pelajaran 2009/2010

No	Hari dan Tanggal	Jam	Mata Pelajaran
1.	UN Utama: Senin, 22 Maret 2010	08.00 – 10.00	Bahasa Indonesia
	UN Susulan: Senin, 29 Maret 2010		
2.	UN Utama: Selasa, 23 Maret 2010	08.00 – 10.00	Bahasa Inggris
	UN Susulan: Selasa, 30 Maret 2010		
3.	UN Utama: Rabu, 24 Maret 2010	08.00 – 10.00	Matematika
	UN Susulan: Rabu, 31 Maret 2010		

Tabel 7. Jadwal UN Ulangan SMALB Tahun Pelajaran 2009/2010

No	Hari dan Tanggal	Jam	Mata Pelajaran
1.	Senin, 10 Mei 2010	08.00 – 10.00	Bahasa Indonesia
2.	Selasa, 11 Mei 2010	08.00 – 10.00	Bahasa Inggris
3.	Rabu, 12 Mei 2010	08.00 – 10.00	Matematika

Pada tahun pelajaran 2009/2010, sebelum UN SMK utama dilaksanakan, diadakan uji kompetensi kejuruan berupa ujian praktik. Ujian praktik diujinasikan dengan jadwal tersendiri yang dilaksanakan oleh Asosiasi Profesi bersama sekolah. Untuk ujian teori kejuruan dilaksanakan secara nasional seperti tertera pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Pelaksanaan UN Utama SMP/MTs dan SMPLB dimulai dari tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan 1 April 2010 dan UN Ulangan tanggal 17 Mei sampai dengan 20 Mei 2010 seperti disajikan pada Tabel 8 dan Tabel 9.

Tabel 8. Jadwal UN Utama dan Susulan SMP/MTs, dan SMPLB Tahun Pelajaran 2009/2010

No	Hari dan Tanggal	Jam	Mata pelajaran
1	UN Utama: Senin, 29 Maret 2010	08.00 – 10.00	Bahasa Indonesia
	UN Susulan: Senin, 5 April 2010		
2	UN Utama: Selasa, 30 Maret 2010	08.00 – 10.00	Bahasa Inggris
	UN Susulan: Selasa, 6 April 2010		
3	UN Utama: Rabu, 31 Maret 2010	08.00 – 10.00	Matematika
	UN Susulan: Rabu, 7 April 2010		
4	UN Utama: Kamis, 1 April 2010	08.00 – 10.00	Ilmu Pengetahuan Alam
	UN Susulan: Kamis, 8 April 2010		

Tabel 9. Jadwal UN Ulangan SMP/MTs, dan SMPLB Tahun Pelajaran 2009/2010

No	Hari dan Tanggal	Jam	Mata Pelajaran
1	Senin, 17 Mei 2010	08.00 – 10.00	Bahasa Indonesia
2	Selasa, 18 Mei 2010	08.00 – 10.00	Bahasa Inggris
3	Rabu, 19 Mei 2010	08.00 – 10.00	Matematika
4	Kamis, 20 Mei 2010	08.00 – 10.00	Ilmu Pengetahuan Alam

UASBN tahun 2010 dilaksanakan dari tanggal 4 sampai dengan 6 Mei 2010 dengan jadwal seperti Tabel 10.

Tabel 10. Jadwal UASBN Tahun Pelajaran 2009/2010

No.	Jenis UASBN	Hari dan Tanggal	Pukul	Mata Pelajaran
1.	UASBN Utama	Selasa, 4 Mei 2010	08.00 – 10.00	Bahasa Indonesia
	UASBN Susulan	Senin, 10 Mei 2010		
2.	UASBN Utama	Rabu, 5 Mei 2010	08.00 – 10.00	Matematika
	UASBN Susulan	Selasa, 11 Mei 2010		
3.	UASBN Utama	Kamis, 6 Mei 2010	08.00 – 10.00	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
	UASBN Susulan	Rabu, 12 Mei 2010		

Ujian Program Paket A, Paket B, dan Paket C tahun 2010 dilaksanakan dua periode dengan jadwal seperti Tabel 11

Tabel 11. Jadwal Ujian Program Paket A, Paket b, dan Paket C Tahun 2010

Program	Hari	Tanggal		Jam	Mata Ujian
		Periode I	Periode II		
Paket C IPS	Selasa	22 Juni 2010	2 November 2010	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Inggris
	Rabu	23 Juni 2010	3 November 2010	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Sosiologi Geografi
	Kamis	24 Juni 2010	4 November 2010	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Bahasa Indonesia Ekonomi
	Jum'at	25 Juni 2010	5 November 2010	14.00 – 16.00	Matematika
Paket C IPA	Selasa	22 Juni 2010	2 November 2010	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Inggris
	Rabu	23 Juni 2010	3 November 2010	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Biologi Kimia
	Kamis	24 Juni 2010	4 November 2010	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Bahasa Indonesia Fisika
	Jum'at	25 Juni 2010	5 November 2010	14.00 – 16.00	Matematika
Paket C Kejuruan	Selasa	22 Juni 2010	2 November 2010	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Inggris
	Rabu	23 Juni 2010	3 November 2010	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Bahasa Indonesia Matematika
Paket B	Selasa	29 Juni 2010	9 November 2010	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Pendidikan Kewarganegaraan Matematika
	Rabu	30 Juni 2010	10 November 2010	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Ilmu Pengetahuan Sosial Bahasa Indonesia
	Kamis	1 Juli 2010	11 November 2010	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Bahasa Inggris Ilmu Penget. Alam
Paket A	Selasa	29 Juni 2010	9 November 2010	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Pendidikan Kewarganegaraan Ilmu Penget. Alam
	Rabu	30 Juni 2010	10 November 2010	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Ilmu Pengetahuan Sosial Bahasa Indonesia
	Kamis	1 Juli 2010	11 November 2010	13.00 – 15.00	Matematika

C | KRITERIA KELULUSAN

Kriteria kelulusan UN tahun pelajaran 2009/2010 sama dengan UN tahun pelajaran sebelumnya, yaitu sebagai berikut.

Peserta UN dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan UN sebagai berikut.

- 1) Memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya
- 2) Khusus untuk SMK nilai ujian praktik kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata UN
- 3) Pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan dapat menetapkan batas kelulusan di atas nilai sebagaimana dimaksud di atas.

Kriteria kelulusan UASBN ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan menetapkan:

- 1) Nilai minimum setiap mata pelajaran yang diujikan;
- 2) Nilai rata-rata minimum untuk ketiga mata pelajaran.
- 3) Kelulusan UASBN digunakan sebagai salah satu pertimbangan penentuan kelulusan dari satuan pendidikan atau sekolah/madrasah.
- 4) Kelulusan dari satuan pendidikan ditentukan melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan nilai UASBN

D | HASIL UN TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Hasil UN secara keseluruhan yang mencakup ujian utama dan ujian ulangan disajikan table 12.

Tabel 12. Prosentase Kelulusan

	Tidak Lulus UN Utama	Tidak Lulus UN Ulang	Total Tidak Lulus	Prosentase Kelulusan
SMP/MTs	9,762	4,296	0,578	99,422
SMA/MA IPA	6,021	4,665	0,338	99,662
SMA/MA IPS	12,499	8,323	1,212	98,788
SMA/MA Bahasa	20,817	6,823	1,661	98,339
MA Keagamaan	16,417	9,610	1,732	98,268
SMK	10,707	3,875	0,729	99,271

Jumlah peserta dan hasil UN tahun pelajaran 2009/2010 adalah sebagai berikut.

1. SMP/MTs

UN SMP/MTs diikuti oleh 3608495 siswa SMP/MTs/SMP Terbuka baik negeri maupun swasta, dengan jumlah sekolah 43728. Adapun prosentasi ketidakkelulusan siswa SMP/MTs adalah 0,578% (20854 siswa). Tabel berikut menyajikan hasil UN lima tahun terakhir, bila dibandingkan dua tahun terakhir hasil pencapaian UN secara nasional meningkat.

Tahun	% lulus	BIN	ING	MAT	IPA	TOTAL
2005/2006	92,10	7,46	6,62	7,13	-	21,21
2006/2007	94,34	7,39	6,72	6,96	-	21,07
2007/2008	92,76	6,96	6,81	6,69	7,00	27,46
2008/2009	95,08	7,35	7,15	7,59	7,30	29,30
2009/2010	99,42	7,39	6,98	7,31	7,16	28,84

Selanjutnya pencapaian setiap provinsi dalam empat matapelajaran yang diujikan pada UN SMP/MTs tahun pelajaran 2009/2010 dapat disajikan Tabel 13.

Tabel 13. Tingkat Kelulusan UN tiap Provinsi

NAMA PROPINSI	JUMLAH			MATA UJIAN				
	Peserta	Tdk. Lls	%	BIN	ING	MAT	IPA	Total
DKI JAKARTA	135252	269	0,2	7,4	7,06	7,07	7,14	28,67
JAWA BARAT	636521	350	0,05	7,34	7,22	7,6	7,18	29,34
JAWA TENGAH	512565	5162	1,01	7,74	6,65	7,06	7,19	28,64
DI YOGYAKARTA	49128	3197	6,51	7,99	6,34	6,79	6,99	28,11
JAWA TIMUR	534020	1509	0,28	7,87	7,35	7,85	7,6	30,67
NEGGROE ACEH DARUSSALAM	81478	874	1,07	7,12	7,82	7,7	7,79	30,43
SUMATERA UTARA	242573	338	0,14	7,69	7,74	8,17	7,66	31,26
SUMATERA BARAT	80985	816	1,01	7,37	6,89	7,35	7,31	28,92
RIAU	86606	226	0,26	7,27	7,18	7,77	7,47	29,69
JAMBI	45499	81	0,18	7,39	7,45	7,85	7,19	29,88
SUMATERA SELATAN	112380	66	0,06	7,52	7,52	7,84	7,35	30,23
LAMPUNG	123009	159	0,13	7,41	7,28	7,74	7,4	29,83
KALIMANTAN BARAT	58034	1130	1,95	7,23	6,55	6,81	6,34	26,93
KALIMANTAN TENGAH	29400	336	1,14	7,08	6,56	6,6	6,44	26,68
KALIMANTAN SELATAN	45042	90	0,2	7,36	7,19	7,65	7,45	29,65
KALIMANTAN TIMUR	50450	397	0,79	7,06	6,33	6,73	6,65	26,77
SULAWESI UTARA	34646	38	0,11	7,54	7,3	7,8	7,5	30,14
SULAWESI TENGAH	39431	348	0,88	7,12	7,02	7,34	7,33	28,81
SULAWESI SELATAN	126458	297	0,23	7,17	7,53	8,02	7,84	30,56
SULAWESI TENGGARA	39257	308	0,78	6,89	6,75	7,25	7,34	28,23
MALUKU	29769	149	0,5	7,1	7,45	7,67	7,14	29,36
BALI	55182	20	0,04	7,94	7,95	8,32	8,45	32,66
NUSA TENGGARA BARAT	78176	611	0,78	7,02	7,19	7,49	7,51	29,21
NUSA TENGGARA TIMUR	72494	2416	3,33	6,71	6,19	6,76	6,49	26,15
PAPUA	26797	190	0,71	7,17	6,8	7,22	7,18	28,37
BENGKULU	27400	218	0,8	7,11	6,61	6,1	7,26	27,08
MALUKU UTARA	20162	99	0,49	6,89	6,99	7,36	6,94	28,18
BANGKA BELITUNG	14987	326	2,18	7,17	6,3	6,57	6,74	26,78
GORONTALO	14742	112	0,76	7,06	6,81	7,67	7,58	29,12
BANTEN	158513	314	0,2	7,47	7,39	7,81	7,29	29,96
KEPULAUAN RIAU	18840	238	1,26	7,36	6,68	6,91	6,65	27,6
SULAWESI BARAT	17692	152	0,86	6,92	6,67	7	7,06	27,65
PAPUA BARAT	10998	22	0,2	7,02	6,54	7,03	6,87	27,46

2. SMA/MA

Ada empat program pada UN SMA/MA yaitu program IPA, IPA, Bahasa, dan khusus MA program keagamaan. Total jumlah peserta 1522383 yang berasal dari 27131 sekolah/madrasah baik swasta maupun negeri, dengan prosentase ketidakkulusan mulai dari 0,338% (untuk program IPA), 1,212% (untuk program IPS), 1,601% (untuk program Bahasa), dan 1,732% (untuk MA program Keagamaan). Tabel 14 menyajikan jumlah peserta, jumlah sekolah, dan prosentase ketidakkulusan UN SMA/MA tahun pelajaran 2009/2010.

Tabel 14. Jumlah Kelulusan UN untuk tiap Program Studi

Program Studi	IPA	IPS	BAHASA	KEAGAMAAN	TOTAL
Jumlah peserta	628667	844765	40752	8199	1522383
Jumlah sekolah	10341	15259	1260	271	27131
% ketidakkulusan	0,338	1,212	1,661	1,732	

Perkembangan rata-rata nilai matapelajaran UN SMA/MA tahun pelajaran 2007/2008, 2008/2009, dan 2009/2010 untuk program IPA dapat dilihat pada Tabel 15, program IPS disajikan pada Tabel 16, dan untuk program Bahasa pada Tabel 17.

Tabel 15. Perkembangan Nilai Rata-Rata UN untuk Program IPA

Thn Pelajaran	BIN	ING	MAT	FIS	KIM	BIO	TOTAL
2007/2008	7,6	7,32	7,48	6,91	7,76	7,8	44,87
2008/2009	6,82	7,81	7,76	7,97	8,34	7,2	45,90
2009/2010	7,39	7,63	8,05	7,84	8,05	7,31	46,27

Tabel 16. Perkembangan Nilai Rata-Rata UN untuk Program IPS

Thn Pelajaran	BIN	ING	MAT	EKO	SOS	GEO	TOTAL
2007/2008	6,95	6,74	7,09	7,67	7,6	6,46	42,51
2008/2009	6,31	7,25	7,7	7,36	6,81	6,88	42,31
2009/2010	6,82	7,06	7,89	6,93	6,54	6,82	42,06

Tabel 17. Perkembangan Nilai Rata-Rata UN untuk Program Bahasa

SMA/MA Bhs	BIN	ING	MAT	SAS	ANTR	B.ASING	TOTAL
2007/2008	6,56	6,71	6,88	6,95	7,45	7,59	42,14
2008/2009	6,78	7,16	6,77	6,73	5,83	7,91	41,18
2009/2010	5,76	6,83	6,94	6,72	6,18	7,84	40,27

Jumlah peserta dan pencapaian setiap provinsi dalam enam matapelajaran yang diujikan pada UN SMA/MA IPA, IPS, dan Bahasa tahun pelajaran 2009/2010 secara berturut-turut disajikan pada Tabel 18, Tabel 19, dan Tabel 20. Dua provinsi tidak ada program bahasa yaitu provinsi Sulawesi barat dan Papua Barat.

Tabel 18. Jumlah dan Hasil UN SMA program IPA semua Provinsi

NAMA PROPINSI	JUMLAH			MATA UJIAN						Total
	Peserta	Tdk. Lls	%	BIN	ING	MAT	FIS	KIM	BIO	
DKI JAKARTA	23523	103	0,44	7,57	7,71	7,44	7,74	8	7,01	45,47
JAWA BARAT	86617	12	0,01	7,66	7,94	8,42	8,26	8,35	7,66	48,29
JAWA TENGAH	62389	389	0,62	7,62	7,51	7,28	7,89	8,16	7,33	45,79
DI YOGYAKARTA	8270	157	1,9	7,65	7,66	7,03	6,71	7,29	6,96	43,3
JAWA TIMUR	85256	71	0,08	7,55	8	8,63	8,38	8,32	7,66	48,54
NEGGROE ACEH DARUSSALAM	34402	177	0,51	7,5	7,78	7,94	7,56	8,13	7,2	46,11
SUMATERA UTARA	63107	87	0,14	7,38	8,16	8,64	8,22	7,89	7,77	48,06
SUMATERA BARAT	16905	54	0,32	7,75	7,29	8,71	7,3	8,06	7,32	46,43
RIAU	16907	5	0,03	7,67	8,64	8,87	7,45	8,33	8,53	49,49
JAMBI	8234	4	0,05	7,58	7,85	8,41	7,49	8,34	8,04	47,71
SUMATERA SELATAN	24306	18	0,07	7,43	7,44	8,41	8,34	8,19	7,1	46,91
LAMPUNG	18394	16	0,09	7,61	7,72	8,52	8,45	8,22	7,68	48,2
KALIMANTAN BARAT	6859	34	0,5	7,48	6,94	7,7	7,75	7,56	7,41	44,84
KALIMANTAN TENGAH	4956	66	1,33	7,12	6,76	6,79	6,58	7,09	6,58	40,92
KALIMANTAN SELATAN	6783	3	0,04	7,57	7,44	7,9	7,14	8,22	7,36	45,63
KALIMANTAN TIMUR	8770	41	0,47	7,43	7,23	7,27	6,91	7,77	6,77	43,38
SULAWESI UTARA	6292	5	0,08	7,35	7,55	8,17	8,18	8,04	7,3	46,59

NAMA PROPINSI	JUMLAH			MATA UJIAN						
	Peserta	Tdk. Lls	%	BIN	ING	MAT	FIS	KIM	BIO	Total
SULAWESI TENGAH	8527	70	0,82	6,89	6,61	7,63	7,71	7,92	6,69	42,91
SULAWESI SELATAN	33334	85	0,25	7,07	7,77	8,19	7,96	8,29	7,59	46,87
SULAWESI TENGGARA	10073	26	0,26	7,22	6,69	8,18	7,27	7,72	6,52	43,6
MALUKU	7282	31	0,43	6,97	7,24	8,02	7,27	8,22	7,25	44,97
BALI	11328	3	0,03	7,79	8,57	9,3	9,04	9	8,49	52,19
NUSA TENGGARA BARAT	14821	66	0,45	7,1	7,02	7,49	7,33	7,56	6,77	43,27
NUSA TENGGARA TIMUR	8348	242	2,9	6,98	6,61	6,76	6,53	6,7	6,43	40,01
PAPUA	5135	31	0,6	7,22	7,12	7,71	7,51	7,68	6,82	44,06
BENGKULU	5865	12	0,2	7,57	7,46	8,5	8,48	7,56	7,14	46,71
MALUKU UTARA	6980	186	2,66	6,51	6,37	7,15	6,05	7,56	6,34	39,98
BANGKA BELITUNG	2445	81	3,31	7,44	7,02	6,98	7,14	7,9	7,1	43,58
GORONTALO	2592	4	0,15	7,18	6,84	7,09	6,69	6,84	6,63	41,27
BANTEN	22089	20	0,09	7,33	7,34	7,48	7,73	7,78	7,19	44,85
KEPULAUAN RIAU	2739	4	0,15	7,39	7,64	7,17	7,17	7,36	6,74	43,47
SULAWESI BARAT	2801	5	0,18	6,96	6,75	7,31	7,13	7,32	7,09	42,56
PAPUA BARAT	2338	14	0,6	7,35	7,03	7,34	7,02	7,62	6,97	43,33

Tabel 18. Jumlah dan Hasil UN SMA program IPS semua Provinsi

NAMA PROPINSI	JUMLAH			MATA UJIAN						
	Peserta	Tdk. Lls	%	BIN	ING	MAT	EKO	SOS	GEO	Total
DKI JAKARTA	35419	683	1,93	7,06	7,07	7,33	6,71	6,74	6,56	41,47
JAWA BARAT	101730	29	0,03	7,24	7,52	8,23	7,20	6,90	7,30	44,39
JAWA TENGAH	94445	1491	1,58	7,11	6,91	7,85	7,16	7,06	6,38	42,47
DI YOGYAKARTA	10833	851	7,86	7,04	6,87	7,51	6,49	6,55	6,49	40,95
JAWA TIMUR	113065	454	0,40	7,06	7,54	8,38	7,64	6,71	7,35	44,68
NEGGROE ACEH DARUSSALAM	23030	490	2,13	7,11	7,50	8,12	7,05	6,50	6,42	42,70
SUMATERA UTARA	58190	182	0,31	7,12	7,85	8,56	7,20	6,94	7,60	45,27
SUMATERA BARAT	25305	340	1,34	7,18	6,85	7,98	6,52	6,49	7,56	42,58
RIAU	27451	48	0,17	7,20	8,17	8,50	7,48	6,75	6,79	44,89
JAMBI	14721	25	0,17	7,12	7,63	8,30	7,10	7,24	6,72	44,11
SUMATERA SELATAN	35431	51	0,14	7,05	7,07	8,28	7,36	6,58	6,99	43,33
LAMPUNG	31694	60	0,19	7,17	7,36	8,42	7,14	6,74	7,46	44,29
KALIMANTAN BARAT	21107	415	1,97	7,07	6,46	7,75	6,66	6,69	6,53	41,16

NAMA PROPINSI	JUMLAH			MATA UJIAN						
	Peserta	Tdk. Lis	%	BIN	ING	MAT	EKO	SOS	GEO	Total
KALIMANTAN TENGAH	9386	581	6,19	6,70	6,43	6,94	5,94	5,87	6,03	37,91
KALIMANTAN SELATAN	12833	40	0,31	7,08	7,08	7,76	6,94	7,42	6,68	42,96
KALIMANTAN TIMUR	13579	286	2,11	6,91	6,74	6,93	6,13	6,03	6,16	38,90
SULAWESI UTARA	7470	16	0,21	7,00	7,28	8,33	7,26	6,67	6,77	43,31
SULAWESI TENGAH	13216	393	2,97	6,40	6,35	7,24	6,25	6,28	6,64	39,16
SULAWESI SELATAN	31582	269	0,85	6,70	7,57	8,50	6,42	6,52	7,07	42,78
SULAWESI TENGGARA	12904	195	1,51	6,86	6,50	7,55	6,55	6,15	6,44	40,05
MALUKU	117797	75	0,64	6,75	7,09	8,31	6,70	6,84	6,87	42,56
BALI	9331	3	0,03	7,27	8,14	8,66	7,45	6,94	7,36	45,82
NUSA TENGGARA BARAT	26232	553	2,11	6,61	6,68	7,87	6,59	6,30	6,60	40,65
NUSA TENGGARA TIMUR	20631	1595	7,73	6,42	6,50	7,08	5,95	5,94	5,98	37,87
PAPUA	8853	158	1,78	6,73	6,69	7,38	6,42	6,13	6,28	39,63
BENGKULU	8883	104	1,17	7,10	7,09	8,26	7,52	6,93	7,82	44,72
MALUKU UTARA	7312	213	2,91	6,43	6,29	7,26	6,09	5,90	6,51	38,48
BANGKA BELITUNG	4348	110	2,53	6,96	6,70	7,37	6,72	6,66	6,19	40,60
GORONTALO	4092	90	2,20	6,76	6,70	7,55	6,15	5,88	6,19	39,23
BANTEN	35057	193	0,55	6,92	6,99	7,84	6,94	6,51	6,64	41,84
KEPULAUAN RIAU	6060	72	1,19	6,75	6,88	7,33	6,45	6,25	6,40	40,06
SULAWESI BARAT	4643	108	2,33	6,66	6,51	7,25	6,50	6,14	6,59	39,65
PAPUA BARAT	4135	65	1,57	6,90	6,62	7,20	6,57	6,51	6,40	40,20

Tabel 20. Jumlah dan Hasil UN SMA program Bahasa semua Provinsi

NAMA PROPINSI	JUMLAH			MATA UJIAN						
	Peserta	Tdk. Lis	%	BIN	ING	MAT	SAS	ATR	BAS	Total
DKI JAKARTA	683	2	0,29	6,49	6,89	7,14	7,21	6,59	7,63	41,95
JAWA BARAT	2873			6,31	7,53	7,55	6,77	6,51	8,27	42,94
JAWA TENGAH	4295	54	1,26	6,48	6,95	7,27	7,26	6,76	8,14	42,86
DI YOGYAKARTA	240	9	3,75	6,72	6,58	6,67	6,93	6,37	7,38	40,65
JAWA TIMUR	6705	41	0,61	6,51	7,39	7,44	7,33	6,5	8,6	43,77
NEGGROE ACEH DARUSSALAM	240	8	3,33	5,88	7,52	7,1	6,66	6,58	8,78	41,52
SUMATERA UTARA	229	2	0,87	6,1	8,02	8,05	6,54	6,28	8,36	43,35

NAMA PROPINSI	JUMLAH			MATA UJIAN						
	Peserta	Tdk. Lis	%	BIN	ING	MAT	SAS	ATR	BAS	Total
SUMATERA BARAT	253	2	0,79	6,08	6,63	6,58	7,11	6,16	7,31	39,87
RIAU	101			6,17	8,77	6,59	6,57	6,58	7,21	41,89
JAMBI	368	1	0,27	5,87	7,65	6,71	6,82	6,11	7,53	40,69
SUMATERA SELATAN	125			6,21	7,62	6,87	7,11	6,42	7,76	41,99
LAMPUNG	131			6,34	7,04	7,08	7,34	6,19	7,38	41,37
KALIMANTAN BARAT	359	16	4,46	5,81	6,09	6,63	6,58	5,98	7,14	38,23
KALIMANTAN TENGAH	798	15	1,88	5,91	6,58	7,12	7,12	6,47	8,02	41,22
KALIMANTAN SELATAN	223	3	1,35	6,21	6,77	6,5	6,77	6,3	7,38	39,93
KALIMANTAN TIMUR	1510			6,03	7,33	8,05	6,76	6,26	8,16	42,59
SULAWESI UTARA	772	33	4,27	5,47	6,42	6,48	6,2	5,73	7,59	37,89
SULAWESI TENGAH	817	8	0,98	5,95	7,66	7,28	6,97	5,75	7,73	41,32
SULAWESI SELATAN	106			5,71	6,19	7,03	6,14	5,75	7,13	37,95
SULAWESI TENGGARA	843	3	0,36	5,7	7,03	8,03	6,52	6,22	8,22	41,72
MALUKU	4895			6,19	7,97	8,38	7,26	6,82	7,09	45,71
BALI	5445	155	2,85	5,69	6,64	7,47	6,6	5,96	7,87	40,23
NUSA TENGGARA BARAT	6157	300	4,87	5,86	6,45	6,63	6,01	6,02	7,28	38,25
NUSA TENGGARA TIMUR	732			5,71	7,02	7,02	6,42	6,33	7,74	40,24
PAPUA	156	2	1,28	5,93	6,65	7,53	7,36	6,53	7,93	41,93
BENGKULU	156	4	2,56	6,53	6,44	7,75	6,24	5,49	7,51	39,96
MALUKU UTARA	426			5,85	6,85	7,71	6,28	5,88	7,54	40,11
BANGKA BELITUNG	323	4	1,24	6,12	7,01	6,41	6,67	6,52	7,5	40,23
GORONTALO	38	7	18,42	5,46	6,03	5,64	7,02	6,19	7,07	37,41
BANTEN	464	7	1,51	5,54	6,47	6,69	6,21	6,06	7,8	38,77
KEPULAUAN RIAU	289	1	0,35	6,05	6,57	7,05	6,43	6,06	7,63	39,79

MA program Keagamaan baru ada pada 19 provinsi pada tahun 2009 namun pada tahun 2010 meningkat menjadi 27 provinsi. Pencapaian UN setiap provinsi dalam enam matapelajaran yang diujikan pada UN MA Keagamaan tahun pelajaran 2009/2010 disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Pencapaian MA program Keagamaan

NAMA PROPINSI	JUMLAH			MATA UJIAN						
	Peserta	Tdk. Lls	%	BIN	ING	MAT	TAF	HAD	TWF	Total
DKI JAKARTA	70	-	-	7,26	6,63	7,52	6,73	7,06	6,96	42,16
JAWA BARAT	928	4	0,43	7,14	7,24	7,72	7,25	7,19	7,10	43,64
JAWA TENGAH	990	13	1,31	7,10	6,60	7,36	7,28	7,29	6,93	42,56
DI YOGYAKARTA	162	10	6,17	7,20	6,36	7,90	7,50	7,47	6,92	43,35
JAWA TIMUR	1580	13	0,82	7,25	7,18	8,18	7,47	7,46	7,18	44,72
NEGGROE ACEH DARUSSALAM	136	-	-	7,48	7,77	8,03	7,56	6,46	6,84	44,14
SUMATERA UTARA	174	-	-	7,29	7,88	9,11	6,63	7,06	7,39	45,36
SUMATERA BARAT	1078	72	6,68	7,12	6,46	7,36	6,57	6,54	6,45	40,50
RIAU	185	2	1,08	7,38	7,68	8,05	7,54	7,58	6,43	44,66
JAMBI	641	16	2,50	6,63	7,22	7,51	6,49	6,14	6,33	40,32
SUMATERA SELATAN	419	-	-	6,74	6,37	8,17	7,15	7,21	6,78	42,42
LAMPUNG	332	2	0,60	7,34	7,41	8,48	7,02	6,72	6,52	43,49
KALIMANTAN BARAT	97	2	2,06	7,48	6,14	8,08	5,72	5,95	6,02	39,39
KALIMANTAN SELATAN	544	3	0,55	7,09	6,90	7,57	7,17	6,60	6,67	42,00
KALIMANTAN TIMUR	39	-	-	7,13	6,66	7,13	7,69	5,88	5,72	40,21
SULAWESI UTARA	30	-	-	7,57	6,81	8,03	7,51	5,79	5,41	41,12
SULAWESI TENGAH	158	-	-	6,49	6,80	6,78	6,39	6,34	6,31	39,11
SULAWESI SELATAN	146	-	-	7,00	7,94	8,61	6,60	6,31	7,04	43,50
SULAWESI TENGGARA	17	-	-	6,69	6,42	7,44	6,07	7,38	7,79	41,79
BALI	11	-	-	7,51	7,45	8,14	7,96	7,09	7,04	45,19
NUSA TENGGARA BARAT	196	3	1,53	6,33	6,88	8,10	6,04	5,90	5,63	38,88
NUSA TENGGARA TIMUR	66	-	-	6,02	6,56	7,70	5,75	6,34	5,78	38,15
BENGKULU	22	-	-	6,75	6,45	8,52	5,04	5,52	5,33	37,61
BANGKA BELITUNG	26	1	3,85	6,07	5,27	5,20	7,87	6,51	6,89	37,81
GORONTALO	47	-	-	6,83	6,32	7,89	7,03	6,16	5,68	39,91
BANTEN	70	-	-	6,92	6,63	8,03	6,26	6,29	6,52	40,65
SULAWESI BARAT	35	1	2,86	5,44	5,94	7,63	5,94	6,43	5,25	36,63

3. SMK

UN SMK diikuti oleh 863685 peserta dari 7342 SMK dengan berbagai program keahlian dan prosentase ketidakkulusan UN SMK ini adalah 0,729%. Tabel 22. menyajikan nilai rata-rata UN

siswa SMK tahun pelajaran 2009/2010 pada tiga tahun terakhir per mata pelajaran

Tabel 22. Perkembangan nilai Rata-Rata UN SMK

Thn Pelajaran	BIN	ING	MAT	Teori	Produktif	TOTAL
2007/2008	6,87	6,92	6,63		7,97	28,39
2008/2009	6,73	7,4	7,47		8,36	29,96
2009/2010	6,41	6,59	7,26	6,42	8,49	35,17

Selanjutnya pencapaian setiap provinsi dalam lima mata pelajaran yang diujikan pada UN SMK tahun pelajaran 2009/2010 disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Hasil UN SMK untuk lima Pelajaran pada Semua Provinsi

NAMA PROPINSI	JUMLAH			MATA UJIAN					
	Peserta	Tdk. Lls	%	BIN	ING	MAT	T.KEJ	PRAK	Total
DKI JAKARTA	63829	189	0,3	6,35	6,72	7,13	6,59	8,61	35,4
JAWA BARAT	149210	410	0,27	6,56	7,1	7,53	6,67	8,34	36,2
JAWA TENGAH	145829	970	0,67	6,77	6,51	7,56	6,54	8,71	36,09
DI YOGYAKARTA	22152	540	2,44	6,69	6,15	7,1	6,38	9	35,32
JAWA TIMUR	138315	450	0,33	6,83	6,67	7,63	6,59	8,72	36,44
NEGGROE ACEH DARUSSALAM	9681	335	3,46	6,29	7,08	7,16	5,95	8,03	34,51
SUMATERA UTARA	63078	452	0,72	6,79	6,9	7,72	6,79	8,26	36,46
SUMATERA BARAT	15893	234	1,47	5,95	6,33	6,76	6,2	8,44	33,68
RIAU	15304	51	0,33	6,35	6,56	7,53	6,2	8,61	35,25
JAMBI	8127	81	1	6,17	6,37	7,27	6,1	8,18	34,09
SUMATERA SELATAN	16777	40	0,24	6,57	7,32	7,51	6,59	8,29	36,28
LAMPUNG	23354	50	0,21	6,68	7,06	7,43	6,73	8,46	36,36
KALIMANTAN BARAT	9882	255	2,58	6,21	6,25	6,6	5,97	8,32	33,35
KALIMANTAN TENGAH	4124	119	2,89	6,08	6,4	6,24	5,91	7,95	32,58
KALIMANTAN SELATAN	7795	35	0,45	6,19	6,85	6,95	6,22	8,29	34,5
KALIMANTAN TIMUR	14576	95	0,65	6,23	6,49	6,81	6,15	8,08	33,76
SULAWESI UTARA	8779	60	0,68	6,43	7,23	7,79	6,61	8,32	36,38

NAMA PROPINSI	JUMLAH			MATA UJIAN					Total
	Peserta	Tdk. Lls	%	BIN	ING	MAT	T.KEJ	PRAK	
SULAWESI TENGAH	6924	211	3,05	5,87	6,12	6,49	5,88	8,15	32,51
SULAWESI SELATAN	23955	122	0,51	6,55	7,35	8,03	6,46	8,32	36,71
SULAWESI TENGGARA	4528	91	2,01	5,74	6,11	6,52	5,91	8,27	32,55
MALUKU	3680	81	2,2	6,11	6,52	6,77	5,99	8,32	33,71
BALI	15425	8	0,05	6,46	7,49	8,16	7,4	8,53	38,04
NUSA TENGGARA BARAT	11268	363	3,22	6,09	6,44	6,83	5,89	8,49	33,74
NUSA TENGGARA TIMUR	11626	426	3,66	6,09	6,12	6,65	5,94	8,27	33,07
PAPUA	5368	160	2,98	5,77	6,29	6,95	6,26	8,11	33,38
BENGKULU	5640	89	1,58	6,31	6,54	7,21	6,11	8,13	34,3
MALUKU UTARA	2247	63	2,8	5,97	6,08	6,89	5,76	8,75	33,45
BANGKA BELITUNG	3894	53	1,36	6,33	6,17	6,64	6,18	8,34	33,66
GORONTALO	3249	26	0,8	6,27	6,49	7,1	6,14	8,23	34,23
BANTEN	38654	112	0,29	6,56	7,34	7,61	6,67	8,35	36,53
KEPULAUAN RIAU	4504	22	0,49	6,38	6,79	7,08	6,18	8,34	34,77
SULAWESI BARAT	3435	72	2,1	5,75	6,34	6,38	5,98	8,45	32,9
PAPUA BARAT	2583	31	1,2	6,15	6,37	6,63	6,16	8,07	33,38

E | KASUS-KASUS UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Laporan penyelenggaraan UN tahun pelajaran 2009/2010 di-himpun berdasarkan laporan dari perguruan tinggi baik sebagai koordinator penyelenggara maupun sebagai koordinator TPI, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan Nasional, dan masyarakat dijelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan jumlah penyimpangan terhadap POS UN, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan UN tahun 2010 jauh lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan UN tahun 2009. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya Fakta Integritas yang harus ditan-datangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan berkat partisipasi aktif dari perguruan tinggi melalui koodinasi Majelis Rektor

Perguruan Tinggi Negeri. Walau demikian ada beberapa catatan penyimpangan yang terjadi, sebagai berikut.

1. Sumber penyimpangan dan pelanggaran pelaksanaan UN berasal dari (1) Percetakan, (2) Kepala Sekolah, (3) Guru, dan (4) Pengawas ruang ujian.
 - (a) Penyimpangan pada percetakan adalah pengamanan selama proses percetakan tidak memenuhi POS UN, seperti tidak ada petugas pengaman yang selalu berada di tempat, ada orang lain yang bukan petugas bisa masuk ke ruang percetakan, karyawan percetakan yang tidak profesional, kertas naskah UN yang tidak standar, dan kertas lembar jawaban UN yang tidak standar,
 - (b) Penyimpangan dan pelanggaran oleh Kepala Sekolah, sebagian kepala sekolah kurang memberi kesempatan TPI untuk melaksanakan tugas pengawasan, adanya kerjasama antar sekolah untuk membantu siswa selama ujian berlangsung, ada sejumlah sekolah yang menggunakan guru mata pelajaran sebagai panitia..
 - (c) Penyimpangan oleh guru adalah mereka berada di lingkungan sekolah pada saat mata pelajarannya diujikan.
 - (d) Penyimpangan pengawas ruang ujian, ada pengawas ruang ujian yang tidak memeriksa secara teliti isian identitas dan kode soal yang dikerjakan siswa, membiarkan siswa membawa HP, membiarkan siswa sering ke kamar kecil yang disinyalir ada kunci jawaban di kamar kecil, ada kerjasama antar guru pengawas ruang UN antar sekolah walau sudah dilakukan secara silang.
2. Penyimpangan dan pelanggaran percetakan diantaranya naskah soal tertukar, naskah soal kurang, kualitas kertas soal dan LJUN tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, lokasi percetakan kurang kondusif. Percetakan CV Budi Utomo Medan merupakan rekanan Dinas Pendidikan dari tahun ke tahun, di sini

salah seorang pegawainya sebagai pembocor soal UN, tempat kurang kondusif, ruang sangat sempit, pengawas dari polisi hanya di depan pintu, dan pegawai yang bersangkutan telah diproses oleh polisi.

3. Kasus Palembang: validasi oleh Itjen tidak terbukti, dari media masa terbukti, dari Puspendik akan dilakukan analisa pola jawaban setelah selesai penskoran. Informasi dari media masa dijadikan *entry point* untuk melakukan tindak lanjut.

Kasus-kasus di atas terjadi SMA/MA, beda dengan kasus yang terjadi di tingkat SMP/MTs Pelanggaran yang ada pada UN SMP/MTs sifatnya individual tidak seperti pada UN SMA/MA yang bersifat kolektif. Pelanggaran/penyimpangan POS UN sebagai berikut:

1. Ada kesalahan soal, dan ditemukan jawaban di luar ruang ujian sebelum waktu ujian. Dalam satu kamar mandi, banyak anak di dalamnya.
2. Guru mata pelajaran berada di lingkungan sekolah pada saat mata pelajarannya diujikan.
3. Masalah TPI: beberapa TPI berada di ruang kepala sekolah, tidak melihat situasi sekolah. TPI tidak menegur pengawas. Ada TPI tidak menguasai POS UN. Tidak semua sekolah ada TPI. TPI tidak boleh mengawal LJUN ke rayon. TPI tidak berani menyampaikan laporan apa adanya.
4. Ada kertas bocoran jawaban dimasukkan ke dalam dasi.
5. Pemahaman pengawas ruang tentang POS UN kurang. Indikatornya ada yang membawa HP, ngobrol dengan pengawas, membiarkan siswanya berdiskusi, mengumpulkan LJUN sepuluh menit sebelum ujian selesai.
6. Ada siswa membawa HP di ruang ujian.
7. LJUN tidak dilem di ruang ujian tetapi di ruang panitia dengan alasan mengecek identitas siswa.
8. Sebuah SMP baru di Sukabumi, memiliki peserta UN 200 siswa, namun belum terakreditasi. Siapa yang akan menandatangani

ijazah?

9. Ada siswa selama 30 menit pertama belum menjawab soal dan mengerjakan pada menit-menit terakhir.
10. Di Lampung ada 6 SMP tidak ada TPI karena jumlah TPI kurang dibanding dengan jumlah sekolah.
11. Terjadinya kebocoran sebagai indikator kegagalan pendidikan agama di sekolah/madrasah.
12. Laporan dari Kementerian Agama, terjadinya kebocoran disebabkan bukan oleh petugas atau soal yang dikawal polisi. Ada 4 titik rawan yang memungkinkan terjadi kebocoran soal: Percetakan, petugas/pegawai percetakan, penyusunan kisi-kisi soal, petugas penyusun kisi-kisi soal.
13. Pakta integritas memberikan dampak perbaikan pelaksanaan UN.
14. Di beberapa provinsi, ada petugas polri yang berpakaian dinas berada di lokasi sekolah saat pelaksanaan UN dengan tujuan mengamankan pelaksanaan UN, namun hal ini memberatkan sekolah disamping bisya juga meningkatkan kecemasan peserta UN.
15. Pengawasan pada UN ulangan tidak standar seperti pada pelaksanaan UN utama, bahkan ada yang dilaksanakan di sekolah masing-masing yang seharusnya dilaksanakan di satu sekolah yang berdekatan.
16. POS UN belum dipahami dengan baik oleh pengawas ruang Un dan pengawas di satuan pendidikan.

F | REFLEKSI

Dalam pelaksanaan UN pada tahun pelajaran 2009/2010 ada ujian ulangan, karena jarak antara UN Utama dengan UN Ulangan yang cukup lama, maka anak didik peserta UN menjadi lebih pan-

jang liburnya. Hal ini juga digunakan oleh Dinas Pendidikan hampir di semua provinsi menerima siswa baru dengan mentes lagi semua mata pelajaran yang diUNkan terutama sekolah-sekolah yang berlabel Sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) maupun Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan UN tahun pelajaran 2009/2010 maka disarankan untuk Un tahunan pelajaran 2010/2011 sebagai berikut.

1. Penentuan percetakan sebaiknya lelang terbatas atau penunjukan langsung pada beberapa percetakan yang memiliki kualifikasi seperti pada POS UN.
2. Apabila penentuan percetakan melalui lelang bebas, harus dilakukan verifikasi terhadap percetakan yang diusulkan sebelum ditentukan pemenangnya, yaitu verifikasi terhadap kualitas perusahaan percetakan sesuai dengan POS percetakan bahan UN.
3. Memberi wewenang penuh terhadap perguruan tinggi negeri untuk mengawasi pelaksanaan pencetakan dan distribusi bahan UN di percetakan.
4. Pengawas ruang UN untuk SMA/MA sebaiknya ditentukan oleh perguruan tinggi negeri berdasarkan masukan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. TPI sebaiknya ditiadakan karena fungsinya kurang bermakna, hanya memberi laporan saja, tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan.
6. Ujian ulangan untuk UN tahun mendatang sebaiknya ditiadakan.
7. Perlu formula baru dalam menentukan kelulusan UN, agar tidak hanya hasil UN untuk menentukan kelulusan dari satuan pendidikan.
8. Perlu kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota agar pelaksanaan UN mendatang lebih kredibel.
9. Perlu uji petik pelaksanaan UN tahun mendatang di semua pro-

- vinsi untuk memvalidasi peta kualitas pendidikan di Indonesia.
10. Petugas keamanan dari Polri sebaiknya hanya bertugas di percetakan, tempat penyimpanan bahan UN, dan pendistribusian bahan UN, sehingga tidak perlu berada di sekolah saat UN berlangsung.

Lampiran

PENYELENGGARA UN TAHUN PELAJARAN 2009/2010 TINGKAT PUSAT

- Penanggungjawab : Mendiknas
Ketua BSNP
- Penasehat : Sekretaris Jendral Depdiknas
Kepala Balitbang Depdiknas
Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal
Dirjen Pendidikan Tinggi
Dirjen Pendidikan Islam, Departemen Agama
Irjen Depdiknas
Biro Hukum Depdiknas
Dirjen Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri
- Ketua : Djemari Mardapi
- Wakil Ketua : Nugaan Yuliani Wardani Siregar
- Sekretaris : Furqon
Hari Setiadi
- Sekretariat : Gaguk Margono
Bambang Suryadi
Kaharuddin Arafah
Neneng Tresnaningsih
Candra
Ning Karningsih
Nurul Najmah
- Divisi Perakitan dan Penjaminan Mutu Soal**
- Koordinator : Edy Tri Baskoro
- Anggota : Arniati
Gaguk Margono

Divisi Pelaksanaan Ujian Nasional SD dan MI

: Mungin Eddy Wibowo
Weinata Sairin, M.Th.

Divisi Pelaksanaan Ujian Nasional SMP dan SMA

: Djaali
Edy Tri Baskoro

Divisi Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan

: Jamaris Jamna
Teuku Ramli Zakaria

Divisi Verifikasi Percetakan

Koordinator : Mungin Eddy Wibowo
Gunawan Indrayanto
Anggota : Benny Widaryanto
Rogers Pakpahan

Divisi Penskoran dan Penyajian Hasil

Koordinator : Furqon
Richardus Eko Indrajit
Anggota : Giri Sarana
Yoyok
Doddy Agung. S

Divisi Pemantau Independen

Koordinator : Zaki Baridwan
Anggota : M. Aman Wirakartakusumah
Farid Anfasa Moeloek
Sumarna Surapranata

Divisi Sosialisasi UN

Koordinator : Djaali
Anggota : Teuku Ramli Zakaria
Jamaris Jamna
Abdi Abdul Wahab

Divisi Pengaduan dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional

Koordinator : Johannes Gunawan
Anggota : Weinata Sairin, M.Th.
Bambang Suryadi

Deskripsi Tugas

Divisi Penyiapan Permen dan Pos UN dan US:

1. Menyusun Permen UN dan US untuk SD/MI
2. Menyusun Permen UN dan US untuk SMA/MA/SMK
3. Menyusun POS UN dan US untuk SD/MI
4. Menyusun POS UN dan US untuk SMA/MA/SMK
5. Membuat laporan penyusunan Permen dan POS
6. Menyusun Permen dan POS UN Program Paket

Divisi Perakitan dan Penjaminan Mutu Soal:

1. Menelaah kesesuaian soal dengan SKL
2. Menelaah karakteristik soal
3. Menelaah kesetaraan paket
4. Menelaah hasil analisis aitem
5. Membuat laporan pelaksanaan perakitan dan penjaminan mutu soal.
6. Melakukan *proof reading* master soal

Divisi Pelaksanaan UN:

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan UN di daerah
2. Mengkoordinasikan kontrak kerja dengan pelaksana UN di daerah
3. Memantau kesiapan pelaksanaan UN di daerah
4. Menentukan prosedur pengamanan soal, dan LJUN serta proses scanning di daerah
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan UN
6. Membuat laporan pelaksanaan UN di daerah

Divisi Verifikasi Percetakan:

1. Menentukan kriteria percetakan
2. Memantau kesesuaian percetakan yang ditunjuk dengan kriteria.

3. Menentukan prosedur kerja percetakan
4. Menentukan tugas percetakan
5. Menentukan prosedur pengamanan percetakan
6. Membuat laporan pelaksanaan verifikasi

Divisi Penskoran dan Penyajian Hasil

1. Melaksanakan penskoran hasil *scanning*
2. Melaporkan hasil penskoran
3. Menghitung jumlah peserta yang lulus
4. Membuat laporan kasus penskoran.
5. Membuat laporan pelaksanaan penskoran dan penyajian hasil

DIVISI TIM PEMANTAU INDEPENDEN

1. Mengkoordinasi dinas, LPMP dan pimpinan PT dalam membentuk TPI dari tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat satuan pendidikan
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pemantauan
3. Merumuskan tugas-tugas dan tanggungjawab TPI
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan-laporan khusus dari TPI
5. Memantau pelaksanaan tugas TPI
6. Membuat laporan pelaksanaan pemantauan.

DIVISI SOSIALISASI UN

1. Merencanakan sosialisasi Permen UN dan POS UN
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi
3. Membuat laporan pelaksanaan sosialisasi

Divisi Pengaduan dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional

1. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan pelaksanaan UN
2. Menyusun rancangan evaluasi UN
3. Menyusun instrumen evaluasi UN

4. Menganalisis data evaluasi UN
5. Membuat laporan tentang pengaduan dan pelaksanaan tindak lanjut
6. Menyusun laporan evaluasi UN



Suasana Ujian Nasional di SMA Negeri I Semarang tahun 2010



PENCAPAIAN DAN
EVALUASI KEGIATAN
STANDAR UNTUK
MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN

Badan Standar Nasional Pendidikan



BAB 11 PENCAPAIAN DAN EVALUASI KEGIATAN STANDAR UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

A | Pengembangan Standar

Sampai akhir tahun 2009 BSNP telah menyelesaikan penyusunan 8 standar nasional pendidikan untuk sekolah dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dengan selesainya standar nasional pendidikan untuk sekolah dasar dan menengah, pada tahun 2009 pula, BSNP mulai menyusun standar nasional pendidikan untuk pendidikan tinggi. Ada tiga SNP untuk pendidikan tinggi yang telah selesai disusun pada tahun 2009, yaitu

1. Pengembangan standar dosen akademik dan profesi pendidikan tinggi
2. Pengembangan standar isi pendidikan tinggi
3. Pengembangan standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi: program sarjana

B | Penyelenggaraan Ujian Nasional

Dalam penyelenggaraan UN tahun pelajaran 2009/2010 terdapat beberapa perbedaan dibandingkan dengan UN tahun sebelumnya. Diantara perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun ini ada UN Ulangan bagi siswa yang tidak lulus UN Utama dan UN Susulan. UN Ulangan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban psikologis yang dialami oleh siswa yang tidak lulus pada UN Utama dan UN Susulan. Sebagai konsekuensi logis diadakannya UN Ulangan, penyelenggaraan UN tahun 2010 dimajukan ke bulan Maret yang pada tahun lalu diselenggarakan pada bulan April. Dengan demikian peserta UN Ulangan memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi pada tahun yang sama.
2. Pengawas satuan pendidikan dan Tim Pemantau Independen (TPI) diberi wewenang untuk memasuki ruang ujian jika ada indikasi kecurangan.
3. Diadakan penandatanganan Pakta Integritas antara Menteri Pendidikan Nasional, Ketua BSNP, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi melakukan penandatanganan pakta integritas dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing. Pakta integritas ini seiring dengan tema UN tahun pelajaran 2009/2010 yaitu **Prestasi dan Kejujuran**.

Hasil UN

Tingkat kelulusan UN Utama SMA/MA dan SMALB adalah 89.93% dan UN Ulangan adalah 92.15% sehingga total kelulusan akhir UN SMA/MA dan SMALB adalah 99.04%. Persentase kelulusan ini meningkat 5.43% dibanding dengan kelulusan UN tahun pelajaran 2008/2009, yakni 93.61%.

Tingkat kelulusan UN Utama SMK adalah 89.30% dan UN Ulangan adalah 95.73%, sehingga total kelulusan UN SMK adalah 99.20%. Persentase kelulusan ini meningkat 2.69% dibanding dengan kelulusan UN tahun pelajaran 2008/2009, yakni 96.51%.

Tingkat kelulusan UN Utama SMP/MTs dan SMPLB adalah 90.27% dan UN Ulangan adalah 98.71%, sehingga total kelulusan UN SMP/

MTs dan SMPLB adalah 99.45%. Persentase kelulusan ini meningkat 4.36% dibanding dengan kelulusan UN tahun pelajaran 2008/2009, yakni 95.09%.

Tindak Lanjut Hasil UN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan UN pada tahun yang akan datang, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dari hasil UN tersebut. Dalam hal ini, Puspendik menganalisis hasil UN dan menyampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya Dinas Pendidikan Provinsi mendistribusikan hasil analisis UN ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke sekolah/madrasah. Sekolah/madrasah menindaklanjuti dengan memperbaiki proses pembelajaran. Diantara aspek yang penting untuk ditindaklanjuti adalah aspek peningkatan kompetensi guru dan ketersediaan buku teks pelajaran untuk guru dan siswa.

C | Penilaian buku teks pelajaran

Ada dua kegiatan utama terkait dengan penilaian buku teks pelajaran, yaitu pengembangan instrument penilaian buku teks pelajaran dan penilaian buku teks pelajaran. Pada tahun 2009 BSNP mengembangkan instrument penilaian buku teks pelajaran agama. Ada lima instrument yang selesai dikembangkan yaitu:

1. Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama Islam
2. Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama Kristen
3. Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama Buddha
4. Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama Hindu
5. Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama

Sedangkan buku yang telah dinilai kelayakannya sebanyak 45 judul dan 231 jilid buku teks pelajaran.

D | Pemantauan implementasi standar nasional pendidikan

Setelah empat tahun dibentuk, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) melakukan pemantauan penerapan standar nasional pendidikan pada tahun 2009. Ada lima standar yang dipantau, yaitu Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, Standar Kepala Sekolah/Madrasah, dan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Selain lima standar tersebut, BSNP juga memantau pelaksanaan ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran dan Ujian Nasional. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai ketersediaan, sosialisasi, dan pemahaman dokumen SNP di lapangan. Pemantauan dilaksanakan di 32 provinsi dengan melibatkan 96 kabupaten/kota dan 3.705 responden dari unsur kepala sekolah, guru, pengawas, ketua program studi LPTK, ketua panitia sertifikasi guru di LPTK, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, kepada dinas pendidikan provinsi, kepada departemen agama kabupaten/kota, kepala kantor wilayah departemen agama provinsi, dan kepala LPMP. Kegiatan ini dilakukan selama enam bulan, mulai dari bulan Juni 2009 sampai dengan bulan November 2009. Dalam pelaksanaannya, BSNP membentuk tim pemantauan standar nasional yang bersifat *ad hoc*.

Secara umum, faktor yang paling menghambat pencapaian standar kualifikasi akademik guru, kualifikasi kepala sekolah, dan kualifikasi pengawas adalah biaya. Dilihat dari kategori Jawa-Luar Jawa, sekolah-madrasah, dan negeri-swasta, masih ada kesenjangan dalam pencapaian Standar Kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas. Keadaan sekolah yang terkait dengan jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa setiap rombongan belajar masih jauh dari standar.

Ketersediaan dokumen tentang standar beserta dokumen-

dokumen pendukungnya di sekolah dan unit-unit kerja yang terkait masih belum maksimal. Ketersediaan dokumen tentang standar beserta dokumen-dokumen pendukungnya di luar Jawa lebih rendah daripada di Jawa, dan di sekolah/madrasah swasta lebih rendah daripada di sekolah/madrasah negeri.

E | Evaluasi Kegiatan BSNP tahun 2009

Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemantauan standar nasional pendidikan yang dilakukan oleh BSNP pada tahun 2009, secara umum dapat dikatakan berjalan cukup baik dan lancar. Berbagai hal yang dianggap menjadi hambatan atau perlu diperbaiki pada masa mendatang adalah:

1. Pengembangan standar nasional pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah telah selesai. Namun demikian, sosialisasi standar-standar tersebut kepada masyarakat dirasakan masih belum optimal sehingga pemahaman mereka terhadap standar sangat terbatas.
2. Ujian Nasional masih menuai pro kontra dari masyarakat baik dari aspek kebijakan, implementasi, maupun kredibilitas hasilnya. Di sisi lain, penyelenggaraan UN juga masih sarat dengan kepentingan-kepentingan pihak tertentu.
3. Tindak lanjut dari hasil pemantauan standar oleh satuan pendidikan, dinas pendidikan dan direktorat terkait masih dirasakan lamban.
4. Pencapaian target penilaian buku teks pelajaran masih rendah karena kemampuan menulis dan mutu tulisan yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan.

F | Rencana Kegiatan BSNP tahun 2010

Pada tahun 2010, BSNP akan melaksanakan beberapa kegiatan yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah, antara lain:

1. Pengembangan paradigm pendidikan
2. Pengembantan standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi program vokasi
3. Pengembangan standar proses pendidikan tinggi
4. Pengembangan Standar Dosen Pendidikan Vokasi
5. Pengembangan Standar Biaya SMK
6. Pemantauan Implementasi Standar Dikdasmen
7. Penilaian buku teks pelajaran
8. Penyelenggaraan ujian nasional
9. Penyelenggaraan Rapat Pleno BSNP
10. Pengembangan Manajemen Kesekretariatan BSNP



PLENO BSNP DAN KEGIATAN NARASUMBER

Badan Standar Nasional Pendidikan

BAB 12 PLENO BSNP DAN KEGIATAN NARASUMBER

BSNP diperlengkapi dengan Rapat Pleno untuk menjalankan misinya dengan baik. Rapat pleno ini diadakan secara rutin sekali seminggu. Disamping itu, BSNP juga banyak menerima undangan sebagai nara sumber dari berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi kebijakan standar pendidikan dan pelaksanaannya, ujian nasional dan perbukuan.

1 | Rapat Pleno

Rapat pleno berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan untuk semua kebijakan yang dikeluarkan oleh BSNP. Rapat pleno diselenggarakan sekali seminggu, setiap hari selasa. Setiap pengambilan keputusan harus didasarkan musyawarah mufakat dengan persyaratan kourum hanrus dipenuhi terlebih dahulu, yakni dihadiri oleh sedikitnya 8 (dari 15) anggota BSNP. Rapat Pleno BSNP, diantaranya, membahas tentang rencana kegiatan BSNP, hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan standar nasional pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, penilaian buku teks pelajaran, permasalahan berkaitan ujian nasional, perihal rekomendasi standar nasional pendidikan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan hal-hal yang bersifat strategis lainnya. Semua hasil keputusan rapat pleno BSNP dicatat dan didokumentasikan dalam notulen rapat BSNP yang ditandatangani oleh notulis dan diketahui/

disahkan oleh ketua dan sekretaris BSNP. Notulen Rapat Pleno BSNP dapat dilihat dalam Buku Kumpulan Notulen Rapat BSNP 2010.

2 | Menghadiri Undangan

BSNP menerima banyak undangan dari berbagai pihak sebagai nara sumber tentang kebijakan standar nasional pendidikan serta pelaksanaannya, ujian nasional dan perihal perbukuan. Berikut ini beberapa undangan yang dapat dihadiri oleh BSNP.

JANUARI

1. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan Pelatihan Calon Pelatih (Training of Trainer) bagi Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Propinsi dari Direktorat Pembinaan SMP, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 11 Januari 2010 di Hotel Griya Astoeti - Bogor.
2. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan Focus Group Discussion (FGD) Penyelaras Pendidikan dengan Dunia Kerja dari Direktorat Jenderal PNFI, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 13 Januari 2010 di Kemdiknas Senayan - Jakarta.
3. Prof. Moehammad Aman Wirakartakusumah menghadiri undangan Rapat Pembahasan Perpres KKNi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 13 Januari 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
4. Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan Rapat tentang Sosialisasi Ujian Nasional dari Pusat Informasi dan Humas, tanggal 13 Januari 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
5. Prof. Djaali menghadiri undangan Pelatihan Calon Pelatih (Training of Trainer) bagi Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Propinsi dari Direktorat Pembinaan SMP, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 14 Januari 2010 di Hotel Ina

- Simpang – Surabaya.
6. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Peserta Aktif Sarasehan dari Menteri Pendidikan Nasional, tanggal 14 Januari 2010 di Hotel Bumikarsa Bidakara – Jakarta.
 7. Prof. Djemari Mardapi dan Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan Rapat tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional dari Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 15 Januari 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
 8. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan Rapat tentang Sosialisasi Ujian Nasional 2010 dari Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 18 Januari 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
 9. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan Rapat Pembahasan Deskriptor IQF Bidang Kependidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 18 Januari 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
 10. Dr. Ramli Zakaria menghadiri undangan Rapat Membahas Rencana Sosialisasi Ujian Nasional 2010 dari Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 18 Januari 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
 11. Seluruh anggota BSNP menghadiri undangan Rapat Pembahasan Perpres KKNi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 20 Januari 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
 12. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan terkait dengan rencana publikasi UN 2010 dan Program 100 Hari Kemdiknas dari Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 26 Januari 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
 13. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan rapat Koordinasi dan Sosialisasi Ujian Nasional Tahun 2009/2010 dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, tanggal 28

- 30 Januari 2010 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua.
14. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan sebagai Pembicara pada kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional sebagai Alat Evaluasi Keberhasilan Pendidikan dari Badan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, tanggal 28 Januari 2010 di Hotel Sahid Jaya – Jakarta.
 15. Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan Workshop Penyusunan Pedoman Implementasi Peraturan Mendiknas No. 63 tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dari Direktorat Pembinaan Diklat, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 29 – 30 Januari 2010 di Hotel Atlet Century – Jakarta.
 16. Prof. Djaali menghadiri undangan sebagai Pembicara dalam rangka “Mendampingi dan Mempersiapkan Anak Sukses Ujian Nasional” dari Sekolah Menengah Pertama Labschool Jakarta, tanggal 30 Januari 2010 di Aula Universitas Negeri Jakarta.

FEBRUARI

17. Prof. Djaali menghadiri undangan sebagai Pembicara tentang Membenahi Sistem Ujian Nasional Dalam Upaya Merekonstruksi Sistem Pendidikan Nasional dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, tanggal 1 Februari 2010 di DPR RI – Jakarta.
18. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan terkait dengan rencana publikasi UN 2010 dan Program 100 Hari Kemdiknas dari Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 1 Februari 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
19. Prof. Djemari Mardapi dan Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan Rapat Koordinasi Persiapan Ujian Nasional dengan Bendahara TPI dari Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 3 Februari 2010 di Hotel Mega Anggrek – Jakarta.
20. Prof. Djemari Mardapi dan Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri Rapat Koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional dari Sekretaris

- Jenderal, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 5 Februari 2010 di Pusdiklat Kemdiknas – Sawangan Bogor.
21. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan sebagai Keynote Speaker pada Seminar Nasional Etika Pendidikan dari Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia Daerah Sumatera Utara, tanggal 6 Februari 2010 di Hotel Madani - Medan.
 22. Seluruh anggota BSNP menghadiri undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan USBN PAI dari Direktorat Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama, tanggal 9 Februari 2010 di Hotel Santika – Jakarta.
 23. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan Rapat Persiapan Ujian Nasional dari Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 10 Februari 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
 24. Prof. Djemari Mardapi dan Prof. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan sebagai Pembicara tentang Ujian Nasional TP 2009/2010 dari Direktorat Pembinaan SMP, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 11 Februari 2010 di Pekanbaru dan Jakarta.
 25. Prof. Djaali dan Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan sebagai Pembicara tentang Ujian Nasional TP 2009/2010 dari Direktorat Pembinaan SMP, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 11 Februari 2010 di Makassar dan Surabaya.
 26. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Nara Sumber tentang Ujian Nasional dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, tanggal 11 Februari 2010 di Hotel Mutiara – Pekanbaru.
 27. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan Penandatanganan MoU Ujian Nasional dari Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 12 - 13 Februari 2010 di Hotel Mega Anggrek – Jakarta.
 28. Prof. Djemari Mardapi, Prof. Mungin Eddy Wibowo, Prof. Djaali, Prof. Edy Tri Baskoro, Prof. Furqon dan Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan Forum Diskusi Ujian Nasional dari Pusat

- Penilaian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 18 Februari 2010 di Sahid Grand Jaya Hotel – Jakarta.
29. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dari Direktorat Jenderal PNFI, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 20 Februari 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
 30. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan Rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dari Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 22 Februari 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
 31. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Nara Sumber Sosialisasi Prosedur Operasi Standar (PO) Ujian Nasional Pendidikan Formal dan Ujian Nasional Pendidikan Non Formal dari Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 24 Februari 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
 32. Seluruh anggota BSNP menghadiri undangan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penandatanganan Surat Kerjasama (MoU) Ujian Nasional Program Paket A, B dan C Tahap I Tahun 2010 dari, Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 24 Februari 2010 di Hotel Milenium – Jakarta.
 33. Seluruh anggota BSNP menghadiri undangan Penandatanganan MoU Ujian Nasional dari Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 25 – 26 Februari 2010 di Hotel Kartika Chandra – Jakarta.

MARET

34. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2010 dari Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 2 - 4 Maret 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
35. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan Talkshow tentang

- Ujian Nasional dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 3 Maret 2010 di Studio Televisi Edukasi, Pustekkom – Jakarta.
36. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Workshop Validasi Data Calon Peserta Ujian Nasional TP 2009 / 2010 dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten, tanggal 4 Maret 2010 di Puspendik Kemdiknas – Jakarta.
 37. Prof. Edy Tri Baskoro dan Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan rapat Kerja Dubes/WRI UNESCO dan Atase Pendidikan tahun 2010 dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 5 Maret 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
 38. Prof. Jamaris Jamna menghadiri undangan Rakor Ujian Nasional (UN) dan UASBN Tahun Pelajaran 2009/2010 dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, tanggal 5 – 7 Maret 2010 di Hotel Mutiara Merdeka – Riau.
 39. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Seminar tantang Permasalahan Kurikulum dari Institut Sejarah Sosial Indonesia, tanggal 6 Maret 2010 di Galeri Nasional – Jakarta.
 40. Prof. Djaali menghadiri undangan sebagai Pembicara pada Seminar Nasional Pendidikan Se-Sumatera dari Universitas Jambi, tanggal 7 - 9 Maret 2010 di Universitas Jambi.
 41. Prof. Djaali menghadiri undangan sebagai Nara Sumber Talk Show Radio tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional dari Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 9 Maret 2010 di RRI – Jakarta.
 42. Prof. Moehammad Aman Wirakartakusumah menghadiri undangan pada Kegiatan Skills for Employability Policy Dialogue: Quality Assurance in Technical and Vocational Education and the Role of National Occupational Standards dari British Council, tanggal 9 - 10 Maret 2010 di Le Meridien Hotel – Jakarta.

43. Prof. Djaali menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Event National Consulation Workshop dari Direktorat Jenderal Mandikdasmen, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 10 Maret 2010 di Hotel Padma – Bali.
44. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri dalam Rangka Persiapan Ujian Nasional SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB dan SMK 2010 dari Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 11 Maret 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
45. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan Diskusi tentang Naskah Akademik Penataan Kurikulum Nasional, Daerah, Sekolah dari Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 11 Maret 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
46. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Kegiatan Orientasi Teknis Kebijakan Pendidikan Kesetaraan dengan Mitra Organisasi dari Direktorat Jenderal PNFI, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 12 Maret 2010 di Hotel Saphir – Yogyakarta.
47. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Workshop Validasi Data Calon Peserta Ujian Nasional TP 2009 / 2010 dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten, tanggal 12 Maret 2010 di Hotel Permata Mulia - Tangerang.
48. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan dalam rangka Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 13 Maret 2010 di Hotel Inna Garuda – Yogyakarta.
49. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Pembicara pada Seminar Nasional tentang Ujian Nasional dalam Perspektif Kemajuan Pendidikan Subang dari Pondok Pesantren Darussalam Kasomalang Subang, tanggal 14 Maret 2010 di Pondok Pesantren Darussalam Kasomalang Subang.

50. Prof. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Seminar Nasional dari Dewan Pendidikan Kabupaten Pekalongan, tanggal 16 Maret 2010 di Sekretariat Daerah Pekalongan.
51. Prof. Moehammad Aman Wirakartakusumah menghadiri undangan pada Kegiatan “Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO” dari Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 17 Maret 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
52. Prof. Djemari Merdapi menghadiri undangan sebagai Nara Sumber “Coaching Calon Petugas Pemantau Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2009/2010” dari Direktorat PSMA, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 17 Maret 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
53. Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan Kegiatan Penyusunan Program Diklat Standar Alar dan Media Diklat bagi TK/TK LB, SD/SD LB, SMP/SMP LB, SMA/SMA LB dan SMK/SMK LB dari Direktorat Pembinaan Diklat, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 17 Maret 2010 di Hotel Mirah – Bogor.
54. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan Rapat Koordinasi Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja dari Direktorat Jenderal PNFI, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 17 – 19 Maret 2010 di Hotel Savoy Homan – Bandung.
55. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan Rapat Pembahasan Program Kemitraan dari BAN PNF, tanggal 18 Maret 2010 di BAN PNF – Jakarta.
56. Prof. Jamaris Jamna menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Event National Consultation Workshop dari Direktorat Jenderal Mandikdasmen, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 18 Maret 2010 di Hotel Padma – Bali.
57. Prof. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Workshop Junior Expert dari Direktorat Jenderal PSMP, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 18 Maret 2010 di Kemdiknas

Senayan – Jakarta.

58. Prof. Richardus Eko Indrajit menghadiri undangan sebagai Nara Sumber Talkshow Interaktif Persiapan Ujian Nasional 2010 dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 18 Maret 2010 di Pustekkom – Jakarta.
59. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Nara Sumber Konferensi Pers dari Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 18 Maret 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
60. Pendeta Weinata Sairin menghadiri undangan Rapat Koordinasi Persiapan Ujian Nasional dari Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 18 Maret 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
61. Prof. Gunawan Indrayanto menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Event National Consultation Workshop dari Direktorat Jenderal Mandikdasmen, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 22 Maret 2010 di Hotel Padma – Bali.
62. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Nara Sumber Workshop Pengembangan dan Pemantapan Pendidikan Layanan Khusus tahun 2010 dari Direktorat Pembinaan SLB, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 23 Maret 2010 di Hotel Saphir Yogyakarta.
63. Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Event National Consultation Workshop dari Direktorat Jenderal Mandikdasmen, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 25 Maret 2010 di Hotel Padma – Bali.
64. Prof. Jamaris Jamna menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dari Direktorat Jenderal PNFI, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 25 Maret 2010 di Hotel Sahid Jaya – Makassar.

65. Prof. Djaali menghadiri undangan sebagai Nara Sumber Talkshow Interaktif Persiapan Ujian Nasional 2010 dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 25 Maret 2010 di Pustekkom – Jakarta.
66. Prof. Djaali menghadiri undangan sebagai Nara Sumber Konferensi Pers dari Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 26 Maret 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
67. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Kegiatan TOT Tim Fasilitator Nasional dan Verifikasi SMA Model SKM-PBKL-KTSP, Direktorat Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 29 Maret 2010 di Hotel Inna Garuda – Yogyakarta.
68. Prof. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Semiloka TK Pedesaan dari Direktorat TK dan SD, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 29 Maret 2010 di Hotel Lorin – Solo.
69. Prof. Furqon menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Pelatihan Penguji Uji Kompetensi Bidang Keahlian Bahasa Inggris, Spa, Tata Busana, Tata Kecantikan, Tata Rias Pengantin dan Akupuntur dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 30 Maret 2010 di Galeri Ciumbeuluit Hotel – Bandung.
70. Prof. Moehammad Aman Wirakartakusumah menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Konferensi Pers tentang Ujian Nasional dari Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 30 Maret 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
71. Prof. Moehammad Aman Wirakartakusumah menghadiri undangan Rapat Penyusunan Laporan Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK Tahun Pelajaran 2009/2010 dari Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 30 Maret 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.

APRIL

72. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Konferensi Pers tentang Ujian Nasional dari Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 1 April 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
73. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Kegiatan Kedai Kajian “Prospek Ujian Nasional” dari Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 7 April 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
74. Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan Konferensi Nasional Pendidikan dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, tanggal 7 April 2010 di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdiknas Senayan – Jakarta.
75. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan Vocational Education and Training Workshop dari Australian Embassy Jakarta, tanggal 8 April 2010 di Australian Embassy – Jakarta.
76. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Semiloka Pendidikan dari Panitia Mukatamar XIV (Persatuan Islam), tanggal 9 April 2010 di Sekolah Menengah Atas Plus Muallimien Rajapaloh – Tasikmalaya.
77. Prof. Edy Tri Baskoro dan Prof. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan pada kegiatan Pembahasan dan Diskusi tentang Naskah Akademik Penataan Ulang Kurikulum Sekolah, dari Pusat Kurikulum, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 9 April 2010 di Hotel Golden Boutique Melawai – Jakarta.
78. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan USBN Pendidikan Agama Islam pada SD, SMP, SMA dan SMK dari Direktorat Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, Kementerian Agama, tanggal 9 April 2010 di Golden Boutique Hotel Melawai - Jakarta.
79. Prof. Djemari Mardapi, Prof. Edy Tri Baskoro dan Prof. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Rapat mengenai Ujian Nasional dari

- Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 9 April 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
80. Prof. Edy Tri Baskoro mewakili BSNP Undangan Nara Sumber pada kegiatan Orientasi Teknis Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Dengan Organisasi Mitra Ditjen. PNFI, Kemdiknas tgl 14 April 2010 di Arion Swill-Bellhotel Bandung.
 81. Prof. Djemari Mardapi menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Program Paket A, B, dan C Tahun 2010) dari Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 16 April 2010 di Hotel Mega Anggrek Jakarta.
 82. Prof. Richardus Eko Indrajit menghadiri undangan sebagai Konsultan RBI dari Pusat Telekomunikasi dan Komunikasi, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 16 - 17 April 2010 di The Poencer Hotel - Bogor.
 83. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan Ujian Nasional Program Wajar Dikdas 9 Tahun Pondok Pesantren Salafiyah, dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama, tanggal 19 April 2010 di Kemenag – Jakarta.
 84. Seluruh anggota BSNP menghadiri undangan Dengar Pendapat Komite III DPD RI, dari Dewan Perwakilan Daerah, tanggal 21 April 2010 di Jakarta.
 85. Prof. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Kegiatan Sosialisasi SPMP dari Direktorat Pembinaan Diklat, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 23 April 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
 86. Prof. Djemari Mardapi, Prof. Edy Tri Baskoro, Prof. Mungin Eddy Wibowo, Prof. Djaali, Prof. Moehammad Aman Wirakartakusumah menghadiri undangan Rapat ke-4 Penyusunan Standar Isi Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 23 - 24 April di Hotel Grand Tropic – Jakarta.
 87. Prof. Djaali menghadiri undangan sebagai Nara Sumber rapat Koordinasi Penyelenggaraan USBN PAI Tahun 2010 dari Direktorat Jenderal

- Pendidikan Islam, Kementerian Agama, tanggal 25 April 2010 di Hotel Singgasana – Makassar.
88. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan Rapat Steering Committee Program BERMUTU dari Direktorat Jenderal PMPTK, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 26 April 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
 89. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dari Direktorat PNFI, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 28 April 2010 di Hotel Sunan – Solo.
 90. Prof. Djaali menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Rapat Konsolidasi Teknis Pencapaian Standar Sarana & Prasarana, Pengelolaan Satuan Pendidikan dan Standar Pembiayaan Pendidikan Se Kalimantan Tengah Tahun 2010 dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 29 April 2010 di Hotel Hawaii – Palangkaraya.
 91. Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Kegiatan Muker Tahun 2010 dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandung, tanggal 30 April 2010 di Hotel Bukit Raya Permai - Bogor.

MEI

92. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan dalam rangka Pendistribusian Naskah Soal UASBN SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2009/2010 dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 3 Mei 2010 di Percetakan Balai Pustaka Unit II Jakarta.
93. Prof. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan pada Kegiatan Penyusunan Program Diklat Standar Alat dan Media Diklat bagi TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK/SMKLB Tahap II, dari Direktorat Pembinaan Diklat, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 5 Mei 2010 di Hotel Inna Kuta – Bali.
94. Prof. Djemari Mardapi, Prof. Edy Tri Baskoro, Prof. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Moehammad Aman Wirakartakusumah

- menghadiri undangan Rapat ke-5 Penyusunan Standar Isi Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 7 Mei 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
95. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Pembicara Seminar Pendidikan Guru dari Pusat Penerjemahan dan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah, tanggal 9 Mei 2010 di UIN – Jakarta.
 96. Prof. Mungin Eddy Wibowo dan Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Kegiatan Orientasi Teknis Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Dengan Lembaga Mitra dari Direktorat Pembinaan SLB, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 10 Mei 2010 di Puncak Raya Hotel – Cisarua Bogor.
 97. Prof. Djaali menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Kegiatan Orientasi Teknis Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Dengan Lembaga Mitra dari Direktorat Jenderal PNFI, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 11 Mei 2010 di Hotel Clarion – Makassar.
 98. Prof. Djemari Mardapi dan Prof. Djaali menghadiri Rapat Pembinaan terhadap 320 SMA RSBI dari Direktorat Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 12 Mei 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
 99. Prof. Djaali menghadiri undangan sebagai Panelis pada Musyawarah Kerja Nasional tahun 2010 dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Pusat, tanggal 18 Mei 2010 di Hotel Ritzy – Manado.
 100. Prof. Jamaris Jamna menghadiri undangan Rapat Pembahasan Rakor Panitia Ad Hoc BAN PNF, tanggal 20 Mei 2010 di BAN PNF – Jakarta.
 101. Pendeta Weinata Sairin menghadiri undangan untuk memberikan Ceramah pada acara Konsultasi dengan Pengelola Wisata Ziarah dan Sanggar Seni Keagamaan Se Indonesia dari

- Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Kementerian Agama, tanggal 21 Mei 2010 di Hotel Pardede Puncak – Bogor.
102. Prof. Edy Tri Baskoro dan Prof. Mungin menghadiri undnagan Rapat ke-6 Penyusunan Standar Isi Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 21 - 22 Mei 2010 Hotel Atlet Century – Jakarta.
 103. Prof. Jamaris Jamna menghadiri undangan pada Kegiatan Pelatihan Asesor Akreditasi BAN PNF tahun 2010 dari BAN PNF, tanggal 23 Mei 2010 di Hotel Horison - Bekasi.
 104. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan UN dan UASBN Provinsi DKI Jakarta dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 24 Mei 2010 di Hotel Paragon – Jakarta.
 105. Prof. Edy Tri Baskoro dan Prof. Mungin menghadiri Invitation to Indonesia Education Partnership Forum 24 - 25 May 2010 dari Uni Eropa, tanggal 25 Mei 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
 106. Prof. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan sebagai Resource Speaker for the Indonesia Education Partnership Forum Workshop dari Uni Eropa, tanggal 25 Mei 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
 107. Pendeta Weinata Sairin menghadiri undangan untuk memberikan Ceramah pada acara Konsultasi Seniman dan Budayawan dari Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Kementerian Agama, tanggal 27 Mei 2010 di Hotel Puncak Raya – Bogor.

JUNI

108. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Peserta Akif dari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, tanggal 15 Juni 2010 di Auditorium Ged Pusat Dakwah Muhammadiyah - Jakarta.
109. Prof. Djaali menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada

Workshop TOT PJP/Tim Fasilitator Program RSKM/RSSN dan SMA Model SKM-PBKL-PSB Tk. Prov/Kab/Kota, dari Direktorat Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 22 Juni 2010 di Hotel Horrison - Makassar.

JULI

110. Seluruh anggota BSNP menghadiri undangan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2009/2010 dari Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 9 Juli 2010 di Hotel Millenium – Jakarta.
111. Dr. Teuku Ramli menghadiri undangan Rapat Tindak Lanjut Pengembangan Pendidikan Pancasila dari Sekretariat Wakil Presiden, tanggal 10 Juli 2010 di Wisma Astoeti - Jakarta.
112. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Seminar Hasil Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah dari BAN SM, tanggal 14 Juli 2010 di Hotel Santika – Jakarta.
113. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan Rapat Tindak Lanjut Pengembangan Pendidikan Pancasila dari Sekretariat Wakil Presiden, tanggal 15 Juli 2010 di Hotel Aryaduta – Jakarta.
114. Prof. Richardus Eko Indrajit menghadiri undangan sebagai Penyaji Makalah pada Kegiatan Semiloka dari Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 20 Juli 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
115. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Nara Sumber dalam rangka Persiapan Ujian Nasional (UN) untuk Mata Pelajaran Produktif SMKTP 2010/2011 dari Direktorat Pembinaan SMK, Kememnterian Pendidikan Nasional, tanggal 21 Juli 2010 di Hotel Pitagiri – Jakarta.
116. Seluruh anggota BSNP menghadiri undangan RDPU Komisi X DPR - RI dari DPR – RI tanggal 21 Juli 2010 di ruang Rapat Komisi X DPR Senayan – Jakarta.

117. Prof. Richardus Eko Indrajit menghadiri undangan sebagai Pembicara Utama Semiloka Nasional Pengujian Bahasa dari Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 22 Juli 2010 di Pusat Bahasa – Jakarta.
118. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan Rapat Identifikasi Kebutuhan dari Pusat Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 27 - 29 Juli 2010, di Villa Tjokro – Bogor.
119. Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan Kegiatan Penyusunan Silabus Diklat Standar Alat dan Media dari Direktorat Pembinaan Diklat, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 28 Juli 2010 di Hotel Mirah – Bogor.

AGUSTUS

120. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada kegiatan Forum Ilmiah dari Direktorat PTK-PNF, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 1 Agustus 2010 di Hotel Garden Palace – Surabaya.
121. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Nara Sumber dalam rangka persiapan Ujian Nasional dari Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 5 Agustus 2010 di Hotel Melawai – Jakarta.
122. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada kegiatan Pengembangan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama dari Direktorat Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, Kementerian Agama, tanggal 6 Agustus 2010 di Hotel Endah Parahyangan - Bandung.
123. Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan Diklat Pembinaan KTSP SD Angkatan I dari Direktorat Pembinaan TK dan SD, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 8 Agustus 2010 di Grand Pasundan Hotel - Bandung.

124. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan Rapat Persiapan Penyusunan Kesepakatan Bersama dari Direktorat Jenderal PNFI, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 12 Agustus 2010 di Kemendiknas Senayan – Jakarta.
125. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan Rapat Lanjutan Persiapan Penyusunan Kesepakatan Bersama, Direktorat Jenderal PNFI, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 24 Agustus 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
126. Seluruh anggota BSNP menghadiri undangan RDP Komisi X DPR - RI dari Balitbang, Kemmenterian Pendidikan Nasional, tanggal 24 Agustus 2010, di ruang Rapat Komisi X DPR Senayan – Jakarta.
127. Prof. Djemari Mardapi, Prof. Edy Tri Baskoro dan Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan Rapat dalam rangka Penyempurnaan Ujian Nasional dari Pusat Penilaian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 25 Agustus 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
128. Pendeta Weinata menghadiri undangan Rapat mengenai Permohonan Percepatan Perubahan Tempat dan Tanggal Lahir Pahlawan Nasioal WR Soepratman dari Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 26 Agustus 2010 Pusat Perbukuan – Jakarta.
129. Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan Sebagai Nara Sumber Seminar UASBN SD Tahun 2010 dari Direktorat Pembinaan TK dan SD, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 29 Agustus 2010 di Hotel Garden Palace - Surabaya.

SEPTEMBER

130. Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan Kegiatan Penyusunan Instrumen ICT untuk Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dari Direktorat Pembinaan Diklat, Kemdenterian Pendidikan Nasional, tanggal 1 - 3 September 2010 di Hotel Salak The

Heritage - Bogor.

131. Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Workshop TOT PJP dan Fasilitator Prov/Kab/Kota Bimtek KTSP SMA Tahun 2010 dari Direktorat Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 20 September 2010 di Hotel Singgasana - Surabaya.
132. Seluruh anggota BSNP menghadiri undangan Rapat Pembahasan DAK SD dari Direktorat Jenderal Mandikdasmen, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 21 September 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
133. Prof. Djemari Mardapi, Prof. Djaali dan Prof. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan dalam rangka Penyempurnaan Ujian Nasional dari Pusat Penilaian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 22 September 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
134. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan Rapat Lanjutan Persiapan Penyusunan Kesepakatan Bersama dari Direktorat Jenderal PNFI, Kememnterian Pendidikan Nasional, tanggal 28 September 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.

OKTOBER

135. Prof. Djaali menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Workshop TOT PJP dan Fasilitator Prov/Kab/Kota Bimtek KTSP SMA Tahun 2010, Direktorat Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 4 Oktober 2010 di Hotel Clarion – Makassar.
136. Prof. Moehammad Aman Wirakartakusumah menghadiri undangan Rapat Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Instrumen Akreditasi Program Pendidikan Profesi Guru dari BAN PT, tanggal 4 - 5 Oktober 2010 di Hotel Horison – Bekasi.
137. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan Nara Sumber tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada

- Jenjang Dasar dan Menengah Angkatan Pertama dari Direktorat Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 4 - 7 Oktober 2010 di Hotel Jaya Raya - Bogor.
138. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan Rakor Pokja dari BAN PNF, tanggal 7 Oktober 2010 di Hotel Horison – Bekasi.
 139. Prof. Djemari Mardapi dan Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi UN Program Paket A, B, C dan C Kejuruan Periode II Tahun 2010 dari Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 8 Oktober 2010 di Hotel Mega Anggrek – Jakarta.
 140. Prof. Farid Anfasa Moeloek menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Munas APTIKOM 2010 dari Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer dan Informatika (APTIKOM), tanggal 9 Oktober 2010 di Kampus Politeknik Telkom - Bandung.
 141. Pendeta Weinata Sairin menghadiri undangan Seminar Peta Konsep Bahasa Arab dan Bahasa Jepang dari Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 12 Oktober 2010 di Pusat Perbukuan - Jakarta.
 142. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Workshop TOT PJP dan Fasilitator Prov/Kab/Kota Bimtek KTSP SMA Tahun 2010 dari Direktorat Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 12 Oktober 2010 di Hotel Clarion Makassar.
 143. Prof. Moehammad Aman Wirakartakusumah menghadiri undangan Rapat Persiapan Penyusunan Master Plan Link & Match dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tanggal 12 Oktober 2010 di Kemnakertrans – Jakarta.
 144. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan Nara Sumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis, tentang Kebijakan Ujian Nasional Tahun 2010/2011 2011 dari Direktorat Pembinaan SMP, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 12 Oktober 2010 di

- Pekanbaru.
145. Prof. Richardus Eko Indrajit menghadiri undangan Workshop Analisis Layanan Pendidikan Berbasis TIK dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 13 - 15 Oktober 2010 di Hotel Permata - Bogor.
 146. Prof. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Nara Sumber Workshop Penyusunan Standarisasi TK Tahun 2010 dari Direktorat Pembinaan TK dan SD, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 14 Oktober 2010 di Grand Pasundan Convention Hotel – Bandung.
 147. Seluruh anggota BSNP menghadiri undangan Lokakarya Ujian Nasional dari Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 15 Oktober 2010 di Hotel Nikko - Jakarta.
 148. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Nara Sumber Kegiatan Penyusunan Bahan Ajar Diklat Berbasis Kompetensi Tahap I dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 18 Oktober 2010 di PPPPTK Bahasa - Jakarta.
 149. Prof. Jamaris Jamna menghadiri undangan mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kursus dari Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 18 Oktober 2010 di Kemdiknas - Jakarta.
 150. Seluruh anggota BSNP menghadiri undangan RDP Panja UN dari Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 19 Oktober 2010 di DPR – RI Jakarta.
 151. Prof. Djemari Mardapi dan Prof. Djaali menghadiri undangan Rapat dalam rangka Penyusunan Desain Tes Ujian Nasional dengan Konsep Item Response Theory / IRT dari Pusat Penilaian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 20

- Oktober 2010 di Hotel Pangrango - Bogor.
152. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan RDP Panja Evaluasi Ujian Nasional dari DPR – RI, tanggal 21 Oktober 2010 di Ruang Rapat Komisi X DPR – RI Jakarta.
 153. Prof. Djaali menghadiri undangan Nara Sumber tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Dasar dan Menengah Angkatan Kedua dari Direktorat Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 21 - 24 Oktober 2010 di Hotel Jaya Raya - Bogor.
 154. Prof. Djemari Mardapi dan Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 24 - 25 Oktober 2010 di Hotel Inna Garuda – Yogyakarta.
 155. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Kebijakan Ujian Nasional Tahun 2010/2011 dari Direktorat Pembinaan SMP, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 25 Oktober 2010 di Makassar.
 156. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Kebijakan Ujian Nasional Tahun 2010/2011 dari Direktorat Pembinaan SMP, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 25 Oktober 2010 di Jakarta.
 157. Prof. Moehammad Aman Wirakartakusumah menghadiri undangan Nara Sumber tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Dasar dan Menengah Angkatan Ketiga dari Direktorat Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 25 - 28 Oktober 2010 di Hotel Jaya Raya - Bogor.
 158. Prof. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan sebagai Nara Sumber Workshop, Pembinaan Kreatifitas TK dari Direktorat Pembinaan TK dan SD, Kementerian Pendidikan Nasional,

- tanggal 26 Oktober 2010 di Wisma Pembina – Jakarta.
159. Seluruh anggota BSNP menghadiri undangan Rapat Evaluasi dan Pembahasan Pelaksanaan USBN PAI Tahun Pelajaran 2010/2011 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, tanggal 26 Oktober 2010 di Hotel Santika - Jakarta.
 160. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Nara Sumber Workshop Bahan Ajar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Berbasis TIK untuk KKG dan MGMP Daerah Terpencil) dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 28 - 29 Oktober 2010 di PPPPTK Bahasa - Jakarta.

NOVEMBER

161. Prof. Richardus Eko Indrajit menghadiri undangan Konsinyasi Penyusunan Bahan Ajar Pendidikan Agama Khonghucu dari Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama, tanggal 1 November 2010 di Hotel Jayakarta - Bali.
162. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan Nara Sumber tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Dasar dan Menengah Angkatan Keempat dari Direktorat Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 1 – 4 November 2010 di Hotel Jaya Raya - Bogor.
163. Prof. Djemari Mardapi dan Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis, tentang Kebijakan Ujian Nasional Tahun 2010/2011 2011 dari Direktorat Pembinaan SMP, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 2 November 2010 di Surabaya.
164. Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan Nara Sumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis, tentang Kebijakan Ujian Nasional Tahun 2010/2011 2011 dari Direktorat Pembinaan SMP, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 5 November 2010 di Jakarta.
165. Seluruh anggota BSNP menghadiri undangan Seminar Profil Hasil Ujian

- Nasional dan UASBN Tahun 2010 dari Pusat Penilaian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 5 November 2010 di Hotel Garden Permata – Bandung.
166. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan Nara Sumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis, tentang Kebijakan Ujian Nasional Tahun 2010/2011 2011 dari Direktorat Pembinaan SMP, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 15 November 2010 di Banjarmasin.
 167. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan sebagai Nara Sumber Rakor Kepala Sekolah se-Kota Tarakan dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan, tanggal 19 Nopember 2010 di Tarakan.
 168. Dr. Teuku Ramli menghadiri undangan Seminar Quality Assurance dari Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 24 November 2010 di Hotel Batavia – Jakarta.
 169. Prof. Edy Tri Baskoro menghadiri undangan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemda dan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Kominfo Perindustrian dan Pendidikan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Perdagangan, tanggal 25 - 27 November 2010 di Hotel Travellers - Jakarta.
 170. Prof. Djaali menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada Kegiatan Sosialisasi Standar Nasional Pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, tanggal 26 November 2010 di Bali Kuta Resort – Bali.
 171. Prof. Moehammad Aman Wirakartakusumah menghadiri undangan Rapat Pembahasan surat jawaban terhadap surat ALBA Jawa Tengah Nomor 003/ALBA Jateng/X/210 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Permendiknas Nomor 66 Tahun 2009 dari Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 26 November 2010 di Kemdiknas Senayan – Jakarta.
 172. Prof. Djaali, Prof. Moehammad Aman Wirakartakusumah, Prof. Richardus Eko Indrajit, Prof. Jamaris Jamna dan Pendeta Weinata Sairin menghadiri undangan Uji Publik Naskah Akademik Penataan Ulang Kurikulum dari

Wakil Menteri Pendidikan Nasional, tanggal 29 - 30 November 2010 di Hotel Mercure Ancol – Jakarta.

173. Pendeta Weinata Sairin menghadiri undangan Pembahasan RPP tentang Pelaksanaan UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dari Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 30 November - 1 Desember 2010 di Hotel Imperial Aryaduta Boulevard – Tangerang.

DESEMBER

174. Dr. Teuku Ramli Zakaria menghadiri undangan Fasilitator Penyusunan Bank Soal Produktif SMK dari Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 11 Desember 2010 di Hotel Batavia – Jakarta.
175. Seluruh anggota BSNP menghadiri undangan Presentasi Laporan Kunjungan Studi Benchmarking Ujian Nasional ke 10 Negara dari Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 17 Desember 2010 di Hotel Sultan – Jakarta.
176. Seluruh anggota BSNP menghadiri undangan Sosialisasi Kebijakan Ujian Nasional dari Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 17 Desember 2010 di Hotel Sultan -Jakarta
177. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan Seminar dan Sosialisasi SNP dari Dewan Pendidikan Provinsi NTT, tanggal 18 Desember 2010 di Hotel Ina Boi – Kupang.
178. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan Sosialisasi Penyelenggaraan Ujian Nasional dari Pusat Penilaian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 30 Desember 2010 di Hotel Lorin - Solo.



EPILOG

Badan Standar Nasional Pendidikan

BAB 13 EPILOG

Selama kurun waktu empat tahun, BSNP dengan komitmen kuat, kerja keras telah berupaya untuk melaksanakan program-programnya sebagaimana yang telah direncanakan. Sepanjang perjalanan empat tahun itu memang tak bisa dipungkiri ada kegalauan, ada kegamangan, ada rasa skeptis, ada berbagai suasana yang mewarnai kedirian BSNP dan yang kesemuanya telah ikut membentuk BSNP sebagai lembaga yang mandiri, professional dan independen.

Dalam melaksanakan programnya kami mencatat dengan penuh syukur dan apresiasi kerjasama sinergis yang telah terwujud dengan berbagai pihak, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun dengan lembaga-lembaga lain. Kerjasama dan pengembangan relasi sinergis seperti ini merupakan modal utama dan energi yang amat bermakna dalam upaya kita bersama memajukan pendidikan nasional di republik ini sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Di masa depan, hubungan, dialog, kerjasama sinergis, tolong-menolong diantara semua elemen bangsa kita adalah kata-kata kunci yang mesti menjadi bagian dari kehidupan bangsa.

Seiring dengan waktu yang mengalir, maka pada tahun 2011 BSNP telah menyusun program-programnya, baik sebagai kelanjutan program tahun 2010 maupun program baru yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan zaman. Kami amat merindukan agar hubungan dan kerjasama yang telah dikembangkan dengan baik pada tahun ini dapat tetap diwujudkan dalam pelaksanaan program

2011, demi optimalisasi pelaksanaan program BSNP. Kami yakin dan percaya dengan pengembangan kerjasama sinergis dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, BSNP akan mampu memberi yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.